



PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI KALANGAN BIROKRAT

MODUL 4

Disusun oleh :
NUNUS SUPARDI, dkk.

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2004**



PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI KALANGAN BIROKRAT

MODUL 4

Disusun Oleh :
Nunus Supardi
Sunardi Dwidjoesastro
Hasa Alwi

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2004**

**PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
DIKALANGAN BIROKRAT**

TIM PENYUSUN

TIM DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

PENERBIT

PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

GAMBAR SAMPUL

CANDI BENTAR

HAK CIPTA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ISBN 979-99131-6-0

Pengantar

Dalam era globalisasi dan reformasi sekarang ini, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah yang mendasar. Ada tiga masalah yang berkaitan dengan eksistensi bangsa (*nation*). *Pertama*, berkaitan dengan munculnya fenomena disintegrasi bangsa yang bila hal ini dibiarkan dapat memecah-belah kehidupan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Kedua*, menyangkut masalah pembangunan karakter (*character*) bangsa, yang akhir-akhir ini cenderung makin melemah. Bila hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa. *Ketiga*, kondisi birokrasi Indonesia yang merosot tajam citranya, sebagai akibat makin maraknya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan lemahnya penegakan hukum, sehingga Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara terkorup di dunia. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera seperti yang dicita-citakan sejak awal membangun kesatuan bangsa sulit untuk terwujud.

Ketiga masalah besar itu mewarnai kondisi psikososial masyarakat Indonesia yang ditandai oleh terjadinya berbagai macam krisis (etika, moral, disiplin, kejujuran, dll) yang ujung-ujungnya disimpulkan sebagai krisis budaya. Bagian yang paling meresahkan adalah terdapatnya krisis pola pikir (*mindset*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Krisis itu telah mengakibatkan kaburnya pola pikir tentang apa hak dan kewajiban

sebagai warganegara yang hidup bersama dalam satu bangsa seperti halnya bangsa-bangsa yang lain.

Menghadapi realita seperti itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengambil prakarsa untuk melaksanakan pendidikan karakter dan pekerti bangsa. Sasaran pelaksanaan pendidikan mencakup lima kelompok masyarakat yang berbeda-beda, yakni: (1) Kelompok Anak dan Remaja; (2) Kelompok Wanita dan Ibu; (3) Kelompok Pendidik; (4) Kelompok Birokrat; dan (5) Kelompok Media.

Dipilihnya kelompok birokrat sebagai salah satu titik sasaran pendidikan tidak terlepas dari peran birokrat dalam pembangunan bangsa. Kalangan birokrat mempunyai peranan penting dalam mendorong dan menumbuhkan kesadaran tentang penting persatuan dan kesatuan bangsa yang multietnik dan multikultur, tentang jati diri bangsa dan kebanggaan nasional.

Untuk mewujudkan kebijakan ini diperlukan suatu langkah pelaksanaan yang strategis dan pendekatan yang tepat sehingga tumbuh kesediaan setiap individu untuk mau menyadari, menghayati dan mengimplementasikan pola kehidupan berbangsa yang memiliki karakter. Diharapkan masing-masing peserta 'pendidikan' akan mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai individu memiliki sikap mental sebagai bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi sistem nilai budaya sebagai acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal penyusunan Modul sebagai salah satu alat 'pendidikan' untuk Kelompok Birokrat, yaitu **Modul No. 4**,

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI KALANGAN BIROKRAT

PENGANTAR

BAB I: PEDOMAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BAGI FASILITATOR

BAB II:

SUBMODUL 1

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI KALANGAN BIROKRAT

BAB III:

SUBMODUL 2

KONDISI BANGSA DAN BIROKRAT

BAB IV:

SUBMODUL 3

TANTANGAN INDONESIA KE DEPAN

BAB V:

SUBMODUL 4

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

BAB VI:

SUBMODUL 5

PENDIDIKAN BUDAYA KERJA

BAB VII: PENUTUP

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
BAB I PEDOMAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA	1
BAB II SUBMODUL 1: PENGANTAR PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BAGI FASILITATOR	21
BAB III SUBMODUL 2: KONDISI BANGSA DAN BIROKRAT	47
BAB IV SUBMODUL 3: TANTANGAN BANGSA DAN BIROKRAT KE DEPAN	83
BAB V SUBMODUL 4: PENDIDIKAN NILAI BUDAYA BANGSA DI KALANGAN BIROKRAT	117
BAB VI SUBMODUL 5: PENDIDIKAN BUDAYA KERJA DI KALANGAN BIROKRAT	149
BAB VII PENUTUP	191

“.....tatkala kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi itu bukan hanya berarti proklamasi daripada sesuatu negara yaitu Republik Indonesia, tetapi proklamasi daripada kepribadian kita sendiri. Kemerdekaan berarti: bangun kembali, kembali, kembali kepada kepribadian sendiri. Kerjakanlah darma kewajiban itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

(Bung Karno, pada Ulang Tahun Kerja sama Kesenian Mahasiswa Indonesia, 16 April 1959)

BAB I

PEDOMAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA KELOMPOK BIROKRAT BAGI FASILITATOR

NUNUS SUPARDI
SUNARDI DWIDJOSOESASTRO
HASAN ALWI

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2004**

A. Pendahuluan

Setiap orang idealnya mempunyai pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Ia tidak hanya *berhak* untuk mendapatkan pengakuan akan keberadaannya sebagai warganegara serta berhak hidup dan mendapat perlindungan dan pekerjaan yang layak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Tetapi lebih dari itu, setiap warga juga *wajib* menjalankan kaidah-kaidah kehidupan bersama. Dalam hal ini kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menanggapi lingkungannya, berperan sebagai acuan dalam tata kehidupan bersama itu. Baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dalam kehidupan dengan bangsa-bangsa lain. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi sistem nilai budaya yang melekat dan menjadi penanda jati dirinya sebagai bangsa. Kewajiban itu tidak hanya terbatas pada status sebagai warga suku bangsa, tetapi juga sebagai warga bangsa.

Kini, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi yang ujung-ujungnya disebut sebagai krisis budaya. Krisis itu terjadi karena penafsiran tentang hak dan kewajiban sebagai bangsa sedang mengalami proses pergeseran. Sebagaimana biasa terjadi pada setiap proses perubahan, pada awalnya akan terjadi benturan-benturan pandangan. Lebih-lebih perubahan (reformasi) yang kini sedang berlangsung menyangkut hal-hal yang amat mendasar sehingga kemungkinan terjadi kekaburan pola pikir

(*mindset*)¹ tentang mana yang hak dan mana yang kewajiban sangat besar. Yang paling mengkhawatirkan apabila kekaburan pola pikir itu menjurus ke arah yang salah yaitu dari penerapan *sistem nilai budaya positif* ke arah penerapan *sistem nilai budaya negatif*. Apa yang dimaksud *sistem nilai budaya negatif* menurut istilah Prof. Dr. Koentjaraningrat termasuk golongan pranata kemasyarakatan yang '*tidak mendapat tempat*'² dalam masyarakat manusia.

Pergeseran pola pikir yang menimbulkan kekhawatiran itu dapat dilihat dari munculnya fenomena baru. Dalam kehidupan sehari-hari orang dengan mudah menyaksikan praktek-praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak elok seperti: konflik antarsuku bangsa yang berdarah-darah, baku tembak untuk memenuhi tuntutan menjadi negara merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (*disintegrasi bangsa*), kekerasan, ketidakjujuran, melemahnya rasa malu, memudarnya rasa tanggung jawab, tidak disiplin, tidak arif, tidak tekun, tidak sabar, serta mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, dan lain-lain. Meniru pola hidup boros dan berfoya-foya, telah menjebak masyarakat untuk mengikuti pola kehidupan konsumtif, yang pada gilirannya menumbuhkan sikap 'jalan pintas' untuk memenuhi keinginannya.

¹ Kata '*mindset*' menurut Webster's Ensiklopedie Unabridged Dictionary of English Language (New York: Gramercy Books, 1996) secara umum dapat diartikan sebagai: sikap, pengarahan, kesadaran tentang kekuatan atau kemampuan intelektual, atau pun suatu cara berpikir, perasaan, pendapat, atau cara pandang. Dalam tulisan ini digunakan istilah "pola-pikir", yang di dalamnya terkandung pula arahan, cara pandang, cara berpikir, dan perasaan yang terkait dengannya.

² Koentjaraningrat, *ibid*

Praktek kehidupan yang teratur dan disiplin berubah menjadi longgar, sehingga pelanggaran peraturan perundang-undangan tanpa dirasakan sebagai tindak pelanggaran. Hukum tidak dapat berdiri tegak dan keadilan menjadi mustahil, karena aparaturnya yang seharusnya menegakkan hukum ikut terjebak dalam kehidupan yang tidak disiplin. Bila hal seperti ini dibiarkan berkembang akan memecah belah kehidupan bersama dalam persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun melalui perjuangan yang panjang. Di samping itu akan merusak citra bangsa yang dikenal memiliki budaya bangsa yang tinggi.

Pergeseran pola pikir dan penerapan sistem nilai budaya seperti di atas menimpa hampir semua sendi pranata kehidupan berbangsa, termasuk pranata kehidupan birokrat pemerintahan. Kondisi birokrasi pemerintah merosot derajatnya di mata masyarakat. Masyarakat tidak sepenuhnya percaya terhadap keberadaan birokrasi sebagai '*abdi masyarakat*', '*pelayan masyarakat*', '*pelindung masyarakat*'. Etos kerja, bekerja tertib dan disiplin Pegawai Negeri menurun sehingga tingkat produktivitasnya sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Upacara pengambilan dan pengucapan sumpah pegawai dan sumpah jabatan hanya menjadi sekedar upacara seremonial. Yang paling membuat parah kondisi birokrasi pemerintah adalah maraknya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Praktek KKN seolah-olah menjadi hal biasa. Korupsi telah merasuki seluruh sendi organisasi pemerintahan, mulai dari birokrasi tingkat RT/RW hingga lembaga

tertinggi, sehingga Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara urutan ke 5 negara yang korup di antara negara-negara berkembang. Korupsi di Indonesia sering disebut telah "*terstruktur*," atau menurut Bung Hatta telah "*membudaya*". Bahkan ada yang berseloroh '*korupsi dilakukan secara berjamaah*'.

B. Beberapa Faktor Penyebab

Dalam melakukan upaya perbaikan di segala bidang, maka perlu pula dikenali faktor-faktor yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya kondisi bangsa dan birokrasi seperti di atas. Faktor penyebab itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu factor dari dalam dan dari luar. Faktor-faktor penyebab yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam:
 - a. Masih lemahnya penghayatan agama
 - b. Sistem sentralisasi pemerintahan
 - c. Tidak berkembangnya pemahaman tentang 'Bhinneka Tungga Ika'
 - d. Ketidakadilan di bidang ekonomi
 - e. Kurangnya keteladanan
 - f. Tidak berjalannya penegakan hukum
 - g. Keterbatasan kemampuan budaya lokal
 - h. Meningkatnya pelanggaran etika dan moral
2. Faktor dari luar:
 - a. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas

- b. Makin kuatnya intervensi kekuatan global dalam kebijakan nasional
- c. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

C. Kebijakan

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan bangsa dan birokrat seperti di atas, MPR menetapkan TAP No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Maksud dari TAP tersebut adalah: *untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.* Adapun tujuannya adalah: *menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berakhlak, dan memiliki jati diri bangsa yang kuat.*

Dalam TAP tersebut digariskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengaktualisasikan kehidupan agama dan budaya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Melakukan pengenalan melalui pendidikan yang bersifat terpadu (pendidikan watak dan budi pekerti).**
3. Mengupayakan setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan manusia Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Berdasarkan pada garis kebijakan butir 2 TAP tersebut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan program Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa bagi seluruh warganegara Indonesia. Untuk melaksanakan prakarsa tersebut perlu disiapkan bahan dalam bentuk modul. Pelaksanaan pendidikan karakter dan pekerti bangsa akan dapat berjalan optimal bila pendekatannya melalui gerakan nasional yang berwawasan budaya, dan seyogyanya gerakan itu dapat dicanangkan oleh Presiden RI. Pelaksanaan pendidikan ditentukan mencakup lima kelompok masyarakat yang berbeda-beda, yakni: (1) Kelompok Anak dan Remaja; (2) Kelompok Wanita dan Ibu; (3) Kelompok Pendidik; (4) Kelompok Birokrat; dan (5) Kelompok Profesional dan Media. Dengan demikian modul yang akan dihasilkan dalam rangka pendidikan karakter dan pekerti bangsa akan menjadi 5 modul, dan **Kelompok Birokrat** adalah **Modul No. 4**.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil Jajak Pendapat (JP) yang dilaksanakan oleh Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan Kompas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrat. Penyebabnya karena birokrat tidak memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat dan tindak KKN yang menyebabkan Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara korup. Sementara itu yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja dan tindak pelanggaran KKN adalah masalah moral.

Bagian yang paling prinsip dari pelaksanaan pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa sebagai upaya merubah pola pikir dan pola tindak adalah:

- a. bahwa pola pikir dan pola tindak birokrat yang telah menetap dan melekat pada diri seseorang cenderung sukar untuk berubah.
- b. bahwa perubahan pola pikir dan pola tindak birokrat memerlukan waktu, keinginan yang kuat, dan niat yang bulat dari dalam diri masing-masing orang.
- c. bahwa perubahan pola pikir dan pola tindak birokrat memerlukan dukungan dan sistem serta iklim yang memungkinkan terlaksananya perubahan itu.

Untuk itu agar dapat diukur tingkatan (level) pada peserta pendidikan diperlukan mekanisme untuk mengukur perubahan yang tampak, yaitu:

- a. Perlu dilakukan Pre-Test secara *individual assesment*, dilaksanakan sebelum pendidikan. Hal ini dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau penilaian diri secara pribadi.
- b. Post-Test, setelah dilakukan pendidikan dengan diberikan kuesioner yang sama untuk mengukur seberapa besar perubahan telah muncul.
- c. Action Plan, pada akhir pendidikan dengan cara membuat program aksi yang harus diterapkan di lingkungan pekerjaannya.
- d. Monitoring pasca pendidikan, dilakukan oleh Tim Pendidikan dengan melakukan kunjungan pada instansi yang

bersangkutanbersangkutan. Tim menanyakan dan mengamati kepada pengguna departemen (*stake holder*) yang bersangkutan dengan mengukur tingkat perubahan dari sisi pola pikir dan pola tindak secara keseluruhan maupun individual.

E. Maksud dan Tujuan

Bertolak dari pemikiran di atas, maka desain tentang pendidikan karakter bangsa dalam bentuk modul ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan para fasilitator dalam melaksanakan pendidikan bagi kalangan birokrat. Tujuan dari pendidikan ini adalah:

1. Menata pola pikir kehidupan berbangsa

Kehidupan berbangsa yang telah berjalan selama hampir 60 tahun dalam NKRI dalam bingkai semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika', kini cenderung mengalami keretakan. Hal ini berarti kesepakatan semua suku bangsa yang telah dirintis sejak lama oleh para pendiri bangsa belum dapat terwujud secara bulat (*tunggal*). Sebagai bangsa yang multietnik dan multibudaya, perlu terus dikembangkan pola pikir hidup berbangsa dalam kesetaraan, kesejajaran, saling mengenal, saling menghargai dan menghormati.

2. Memperkukuh kesadaran tentang nilai-nilai dasar budaya bangsa

Nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini telah melekat dalam diri bangsa Indonesia dan telah menjadi

penanda jati diri bangsa sebagai bangsa yang berbudi luhur, berbudaya dan beradab, pada 6 tahun terakhir ini cenderung menurun secara drastis kualitasnya. Nilai ini yang akan menjadi landasan para birokrat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, cepat, tepat dan akurat. Rincian mengenai nilai-nilai budaya yang perlu ditanamkan kembali melalui pendidikan karakter bangsa di kalangan birokrat akan diuraikan pada Bab berikutnya.

3. Meningkatkan pengamalan sistem nilai budaya dalam kerja

Pendidikan karakter bangsa merupakan upaya penyegaran (*refreshing*) nilai-nilai budaya bangsa diarahkan untuk dapat mendorong tumbuhnya sikap-sikap yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, cepat, tepat dan akurat dengan dilandari oleh semangat kerja keras, tertib dan disiplin, jujur, tulus dan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan. Perubahan pola-pikir para birokrat seperti yang diharapkan di atas akan merubah citra buruk birokrasi di Indonesia. Makin meningkatnya citra birokrasi akan berpengaruh besar terhadap citra bangsa dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

Dalam penyusunan modul prinsip yang dipegang adalah dari pelaksanaan pendidikan itu dapat dihasilkan manusia Indonesia yang dari sisi karakter benar-benar mengalami perubahan dan perubahan perilaku itu dapat diukur, dimulai dari tingkatan:



Dalam tingkatan **kognitif**, pola pikir yang perlu ditingkatkan di kalangan birokrat adalah:

1. wawasan dan kesadaran mengenai kehidupan dalam suasana multietnik dan multikultur (*pluralisme*), yakni keberagaman dan perbedaan dari aspek ekonomi, sosial, agama, adat istiadat, bahasa dan sistem nilai budaya;
2. wawasan dan kesadaran mengenai kehidupan demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi;
3. wawasan dan kesadaran masalah lalu dan cita-cita masa depan bangsa (*visi*);
4. wawasan dan kesadaran pentingnya pelayanan kepentingan publik.

Dalam tataran **sikap/spiritual/afektif** yang perlu ditingkatkan di kalangan birokrat adalah:

1. meningkatkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain.

3. meningkatkan kesediaan melayani dan membantu orang lain.
4. meningkatkan kesediaan menghargai dan menghormati perbedaan.
5. meningkatkan kesediaan untuk bersikap setara pada orang lain.
6. meningkatkan rasa percaya diri dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
7. meningkatkan rasa memiliki dalam segala hal, milik orang lain dan negara.
8. meningkatkan kesediaan bekerja sama.
9. meningkatkan keberanian bersaing secara jujur.

Dalam tataran **perilaku** yang perlu ditingkatkan di kalangan birokrat adalah:

1. Mampu mengatasi masalah secara proposional dan tepat.
2. Mampu menentukan skala prioritas yang berorientasi pada kepentingan publik.
3. Mampu menganalisis, merumuskan dan mencari alternatif solusi, menentukan prioritas dan mengambil keputusan.
4. Mampu membuat action plan.
5. Mampu membangun kerja sama.

F. Kelompok Sasaran

Dalam kehidupan berbangsa kelompok birokrat menempati posisi strategis, karena pelaksanaan pendidikan karakter bangsa

kepada masya-rakat menjadi sebagian dari tugas birokrasi pemerintahan. Kata birokrat mengandung makna “*pegawai yang bertindak secara birokrasi.*” Kata birokrasi yang berasal dari bahasa Inggris “*bureaucracy,*” ditulis menjadi ‘birokrasi’ yang mengandung arti antara lain “*sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirerarki dan jenjang jabatan.*”³ Dari pengertian itu maka di dalam birokrasi terdapat beberapa unsur yang menggerakkan jalannya roda organisasi. *Pertama*, ada organisasi itu sendiri yang ditata dalam suatu struktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas. *Kedua*, ada manusia yakni pegawai pemerintah (*man*) yang menjalankan gerak langkah birokrasi. *Ketiga*, ada cara atau sistem pemerintahan yang mengatur mekanisme (*method*) gerak organisasi yang antara lain dalam bentuk hirarki dan jenjang jabatan dan cara-cara melaksanakan misinya. Selain ketiga unsur itu ada unsur *keempat*, yaitu ada unsur pembiayaan (*money*), dan *kelima* ada unsur alat atau perlengkapan (*material*).

Jika di atas disebutkan bahwa derajat birokrat Indonesia kini sedang mengalami kemerosotan kualitas pelayanan yang tajam, antara lain disebabkan oleh menurunnya semangat bekerja keras, tidak tertib dan disiplin, serta kemudian terjebak pada prakatek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), maka dari kelima unsur di atas, unsur yang perlu segera diperbaiki adalah unsur manusia (*man*) atau

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hal. 120.

pegawai pemerintah atau *birokrat* yang menjalankan gerak langkah birokrasi. Kelompok birokrat adalah pelaku birokrasi pemerintahan yang sejak awal rekrutmen telah dikelompok sebagai kelompok yang seharusnya memiliki pola-pikir "*mengabdikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.*" Para birokrat seharusnya memiliki pola-pikir "*Indonesia adalah negara pengurus, dan bukan Indonesia negara penguasa.*"

Kelompok Sasaran Yang dimaksud kelompok birokrat dalam program ini mencakup:

- a. Birokrat di lembaga legislatif.
- b. Birokrat di lembaga yudikatif.
- c. Birokrat di lembaga eksekutif.

G. Metode

Dalam pelaksanaan metode yang digunakan perlu disesuaikan dengan tataran di atas. Pendekatan yang digunakan dengan konsep andragogik yang khusus diterapkan pada usia dewasa/orang tua. Dalam upaya menanamkan nilai-nilai karakter bangsa dapat ditempuh dengan cara: (a) Belajar Secara Individu (*Individual Learning*); (b) Belajar Dalam Kelompok (*Classical/Group Learning*) dengan diskusi, curah pendapat (*Brainstorming*); dan (c) Belajar Secara Umum, atau Massal (*Public Learning*).

Pada tingkatan **kognitif**, maka segala metode dapat digunakan untuk menanamkan pemahaman makna, seperti: membaca, bertanya, curah pendapat, ceramah singkat (*Lecturette*),

diskusi Diskusi Kelompok (*Group Discussion*)

Pada tingkatan **afektif**, maka segala metode harus menggunakan pendekatan pada sentuhan perasaan sensitivitas peserta:

- a. Bermain peran, pemberian tugas individu (*Individual Assignment*).
- b. Penugasan Kelompok (*Group Assignment*).
- c. Permainan Simulasi (*Simulation Game*).
- d. Pembacaan Puisi, Menyanyi.
- e. Menonton film, slide, gambar.
- f. Aktivitas outdoor.

Pada tingkatan **perilaku** yang mencerminkan kemampuan maka metode yang digunakan dapat bertahap, baik dalam bentuk latihan mengatasi kasus dengan cara:

1. *Action plan*, masing membuat contoh kasus dan cara mengatasinya.
2. *Learning on the field*, peserta terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan dan selanjutnya mengadakan analisis pemecahannya.

H. Perlengkapan

Bagian lain yang sangat diperlukan dalam proses belajar adalah sarana atau peralatan, seperti: bahan tayangan (film, foto, slide, rekaman cerita, gambar) bahan bacaan, peralatan kelas (OHP, flip-chart, in-focus dll.)

I. Isi dan Cara Penggunaan Modul

Dalam Modul 4 yang khusus digunakan pada Kelompok Birokrat dibagi menjadi **5 Submodul**, yaitu:

SUBMODUL 1: PENGANTAR PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.
Dalam Submodul ini diuraikan berbagai hal tentang latar belakang dan tujuan Pendidikan Karakter Bangsa sebagai pengantar sebelum para peserta memasuki materi pokok.

SUBMODUL 2: KONDISI BANGSA DAN BIROKRASI PEMERINTAH
Dalam Submodul ini para peserta diajak untuk mengetahui permasalahan bangsa dan birokrat pada dewasa ini.

SUBMODUL 3: TANTANGAN BANGSA DAN BIROKRAT MASA DEPAN
Dalam Submodul ini para peserta diajak untuk mengetahui tantangan dihadapi oleh bangsa Indonesia serta kehidupan birokrat di masa depan.

SUBMODUL 4: PENDIDIKAN NILAI BUDAYA BANGSA DI KALANGAN BIROKRAT.
Dalam Submodul ini peserta diajak mendalami, menghayati dan mengimplementasikan sistem nilai budaya bangsa dalam kehidupan sehari di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

SUBMODUL 5 : PENDIDIKAN BUDAYA KERJA DI KALANGAN BIROKRAT

Dalam Submodul ini peserta diajak mendalami, menghayati dan mengimplementasikan sistem nilai budaya kerja dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Setiap Submodul telah dirancang untuk menjadi alat yang mandiri dan dapat diadaptasi atau dimodifikasi dalam kegiatan pelatihan. Setiap Submodul terdiri atas tujuh bagian, yaitu:

- a. Pendahuluan, mengemukakan topik-topik yang disajikan dan lingkup permasalahan dan signifikansinya.
- b. Pokok Bahasan, mengemukakan topik-topik yang dibahas dalam modul serta kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Tujuan, mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam memahami, menghayati dan mengimplementasikan dalam kehidupan.
- d. Metode, mengemukakan metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan pendidikan (bersifat tidak kaku, dapat dikembangkan oleh masing-masing fasilitator)
- e. Langkah, mengemukakan tentang urutan langkah yang perlu dilakukan oleh fasilitator.
- f. Waktu, mengemukakan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan.
- g. Peralatan, mengemukakan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan.

- h. Uraian Topik, merupakan bahan yang akan disajikan oleh para fasilitator dalam melaksanakan tugas pendidikan kepada para peserta.
- i. Evaluasi, merupakan langkah untuk mengetahui perkembangan hasil pendidikan baik dari sisi kognitif, afektif maupun perilaku.

J. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring terutama dilaksanakan padapasca pendidikan, dilakukan oleh Tim Pendidikan dengan melakukan kunjungan pada instansi yang bersangkutan. Tim menanyakan dan mengamati kepada pengguna departemen (stake holder) yang bersangkutan dengan mengukur tingkat perubahan dari sisi pola pikir dan pola tindak secara keseluruhan maupun individual.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada:

- a. Awal pelaksanaan, yaitu menghimpun data hasil **Pre-Test** terhadap calon peserta (secara individual assesment), dilaksanakan sebelum pendidikan. Hal ini dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau penilaian diri secara pribadi.
- b. Dalam pelaksanaan, yaitu dalam bentuk pembuatan

Action Plan, pada akhir pendidikan dengan cara membuat program aksi yang harus diterapkan di lingkungan pekerjaannya.

- c. Tahap akhir pelaksanaan dalam bentuk **Post-Test**, dengan diberikan kuesioner yang sama untuk mengukur seberapa besar perubahan telah terjadi.

Pendekatan evaluasi dilakukan melalui penilaian atas penguasaan materi dari sisi: **(1) kognitif disingkat (K); (2) spiritual disingkat (S) atau afektif disingkat (A); (3) perilaku (P)**, seperti yang telah diuraikan di atas. Setelah fasilitator menyampaikan uraian topik, kepada peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Jawaban atas tanggapan dan pertanyaan itu itu hanya datang dari fasilitator tetapi juga dapat diberikan oleh peserta.

Mari kita menjaga agar jabatan apapun juga yang kita jabat adalah untuk memberi contoh kepada bawahan dan agar selalu ingat kepada tugas yang kita jalankan.

(Mohammad Hatta, Ceramah di muka para pejabat dan tokoh masyarakat di Gedung Negara, Jayapura, 26 Mei 1970)

BAB II

**PENGANTAR
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA**

SUBMODUL 1

NUNUS SUPARDI
SUNARDI DWIDJOSOESTRO
HASAN ALWI

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2004**

A. Pendahuluan

Kondisi bangsa Indonesia setelah 6 tahun mengalami krisis multidimensi belum dapat keluar dari masalah tersebut. Krisis itu tidak hanya berdampak pada masalah tingkat kesejahteraan rakyat yang menurun (ekonomi) tetapi juga masalah persatuan dan kesatuan bangsa, serta etika dan moral kalangan birokrat. Salah satu cara yang harus dilakukan segera adalah memasukkan paradigma pola pikir dan pola tindak manusia Indonesia dalam menghadapi krisis tersebut.

Sebagaimana hasil Jajak Pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan Kompas menunjukkan bahwa faktor rasa kebangsaan, etika dan moral mengalami proses penumpukan karena pembangunan manusia seutuhnya hanya menghasilkan manusia yang tidak memiliki keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Lembaga pendidikan, agama dan kebudayaan yang seharusnya dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter bangsa Indonesia, justru sebaliknya. Mereka bukan menjadi manusia Indonesia yang Pancasila, tetapi sebaliknya menjadi manusia yang menjadikan agama sebagai 'topeng', tidak memiliki rasa toleran terhadap perbedaan, mau menang sendiri dan benar sendiri, persatuan bangsa menjadi retak, keadilan hanya dimiliki oleh orang yang berkuasa dan bermodal, dan musyawarah untuk mencapai mufakat dinodai oleh pertikaian yang tidak sehat.

Dalam lingkungan birokrasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrat merosot, pelayanan publik sangat rendah, tindakan korupsi, klusi dan nepotisme marak di segala lapisan birokrasi, bahkan sampai ke tingkat RW dan RT. Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai perumus peraturan perundang-undangan, pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat mengawal dan mengawasi jalannya birokrasi justru menjadi 'sarang' berlangsungnya tindakan yang tidak sesuai dengan janji dan sumpah sebagai Pegawai Negeri Republik Indonesia. Lembaga-lembaga DPR/DPRD, Kepolisian, Kehakimam, Kejaksaan, Inspektorat Jenderal, ternyata ikut terlibat di dalam membuat citra birokrasi menjadi tercoreng.

Faktor kunci yang menjadi penyebab terjadinya tindak pelanggaran sumpah dan janji birokrat adalah pada masalah etika, moral, dan disiplin yang rendah. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi seperti itu? Salah satu langkah kebijakan yang diambil di samping perbaikan itu melalui lembaga pendidikan formal, agama dan kebudayaan, juga melalui pendidikan karakter dan pekerti bangsa.

B. Pokok Bahasan

Sebagai pengantar dalam pelaksanaan pendidikan karakter bangsa, topik yang dibahas adalah sebagai berikut:

Topik 1 : Latar Belakang Sejarah, untuk mengetahui dan memahami makna latar belakang menjadi satu bangsa

dan penempatan kebudayaan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Topik 2 : Pengertian Karakter Bangsa, untuk mengetahui pengertian karakter bangsa.

Topik 3 : Tujuan Pendidikan Karakter Bangsa, untuk mengetahui ke mana arah pendidikan karakter bangsa di kelompok Birokrat.

C. Tujuan

1. Peserta dapat mengidentifikasi bagian sulit dari proses menjadi satu bangsa.
2. Peserta dapat merumuskan pola pikir dan perilaku yang tepat dalam menjaga kesepakatan menjadi satu bangsa.
3. Setelah peserta memahami kesulitan dalam proses menjadi bangsa dan memahami apa yang dimaksud dengan karakter bangsa, maka peserta memahami tentang tujuan pendidikan karakter bangsa bagi bangsa Indonesia yang multietnik dan multikultur.

D. Metode

1. Ceramah
2. Curah Pendapat
3. Dskusi (kelompok dan pleno)
4. Permainan

E. Langkah

1. Fasilitator menjelaskan tentang metode pendidikan.
2. Fasilitator membuat pengantar sebagai pemanasan misalnya: pembacaan sajak, nyanyian, penyangan film, CD, VCD, gambar atau dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk curah pendapat mengenai proses menjadi satu bangsa dan pengertian tentang karakter bangsa dengan pertanyaan: *“apakah Anda mengetahui secara mendalam tentang proses menjadi satu bangsa?”* dan *“mengapa masalah karakter bangsa menjadi bagian penting dalam menjadi bangsa?”*
3. Fasilitator mengajak peserta membahas masalah yang berkenaan dengan proses menjadi bangsa, karakter bangsa dan karakter birokrat.
4. Peserta membuat kesimpulan dan hasil diskusi

F. Waktu: diperlukan waktu 90 menit

G. Peralatan

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. LCD/OHP | 7. Double-tape (selotip bolak-balik) |
| 2. Kertas (Flip Chart) | 8. VCD/DVD |
| 3. Kertas masterplan | 9. Tape |
| 4. Spidol | |

H. Uraian Topik:

Topik 1: Latar Belakang Sejarah

a. Kesadaran Berbangsa

Sebelum lahir satu bangsa, bangsa Indonesia, berbagai bangsa seperti bangsa Sunda, Madura, Batak, Bali dll. (sebutan sebelum bangsa Indonesia lahir) yang mendiami wilayah Nusantara memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan 'sistem pemerintahan' masing-masing. Membangun kesepakatan (*consesnsus*) menjadi satu Ikatan (*commitment*), satu bangsa yang terdiri atas hampir 500 suku bangsa yang beraneka ragam budaya, bukanlah hal yang gampang. Upaya yang dirintis sejak 1908 (Boedi Oetomo) hasilnya baru tampak 20 tahun kemudian (Sumpah Pemuda, 1928), dan tujuh belas tahun kemudian baru mendapatkan pengakuan (1945). Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka secara *de facto* dan *de jure* bangsa dan negara Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa lain di planet ini. Bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, lahir pula kebudayaan bangsa Indonesia.

Pergolakan bersenjata untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah di berbagai tempat belum membuahkan hasil. Di samping rakyat menjadi korban meninggal, hidup semakin sengsara, kekuatan menjadi semakin melemah. Sebaliknya, penjajah semakin kuat yang dapat bertindak leluasa menindas rakyat. Keberhasilan penerapan politik adu domba dan memecah belah kekuatan yang tumbuh, menyadarkan para pemuda bumiputra untuk menggunakan

cara lain. Cara lain itu adalah dengan membangun kebersamaan dalam satu ikatan kebangsaan.

Awal dari bangkitnya kesadaran itu adalah berdirinya organisasi kemasyarakatan Boedi Oetomo (BO) dengan doktrin perjuangannya menumbuhkan semangat kebangsaan. Kesadaran itu tumbuh setelah mereka belajar di Belanda, banyak membaca buku dan mempelajari berbagai cabang ilmu, serta bergaul dengan pemuda-pemuda dari berbagai bangsa. Mereka itu biasa disebut sebagai kaum terpelajar.

Kesadaran itu makin tampak ke permukaan ketika para pemuda bumiputra yang belajar di Belanda yang menjadi anggota perkumpulan *Indische Vereeniging* tidak mau lagi mengenal sifat kedaerahan.¹ Mereka kemudian mendirikan *Indonesisch Verbond*. Kata *Inlander* sebagai sebutan bagi orang-orang bumiputra berubah menjadi *Indonesier*. Kata ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Van Vollenhoven melalui bukunya yang berjudul *De Indonesier en Zijn Grond*. Sesudah itu, kata Indonesia banyak digunakan oleh pemuda bumiputra yang belajar di Belanda. Dalam Kongres Internasional yang mereka hadiri secara terbuka “dipropagandakan” kata Indonesia itu. Pers Indonesia kemudian mengambil alih kata itu dan secara terus menerus kata itu digunakan.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda mengadakan Kongres Pemuda II di gedung Jl. Kramat Raya Jakarta, dan

¹ Perkembangan Bahasa Indonesia Dalam Politik, Moh. Hatta, Bahasa dan Sastra No.1/V, 1979

menelorkan keputusan yang amat bersejarah yang Sumpah Pemuda. Para pemuda bumiputra yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan menyatakan ikrar atau sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai “Sumpah Indonesia Raya”.² Di dalam sumpah itu sesungguhnya dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Sumpah Yang Tiga; dan (2) Putusan Yang Tiga pula.

Dibandingkan dengan Sumpah yang Tiga, popularitas Putusan Yang Tiga sangat berbeda. Tidak banyak orang memperhatikan bagian Putusan Yang Tiga, padahal memiliki makna sejarah yang sama. Isi Sumpah Yang Tiga adalah:

Pertama: Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Berbangsa Indonesia.

Kedua: Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertanah air yang satu, Tanah Air Indonesia.

Ketiga: Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa perstauan, Bahasa Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Putusan Yang Tiga adalah:

Pertama: Menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali sebagai sumbangan perjuangan menuju Indonesia merdeka.

Kedua: Mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya, setelah beratus-ratus tahun sebagai bendera perstauan.

Ketiga: Meletakkan dasar bersatu dalam kesatuan yang bulat dan kokoh yang dinamai dasar unitarisme.

² E. Ulrich Kratz, Sejarah Sastra Indonesia Abad XX, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000 hal 3-4

Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari bangsa yang telah bersumpah terus dilanjutkan, baik melalui perjuangan fisik dengan bertempur melawan penjajah Jepang maupun dengan perjuangan diplomasi. Hasil dari perjuangan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Pada pukul 03.00 dinihari, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo mulai mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan. Teks tulisan tangan Bung Karno kemudian diketik oleh Sayuti Melik ditemani BM Diah. Naskah Proklamasi disusun dan diketik di kediaman Laksamana Muda Laut Tadashi Maeda, tentara Jepang yang ketika itu menjajah Indonesia dan sedang menghadapi kalah perang dengan Sekutu, terletak di Jl. Diponegoro No. 1 Jakarta.³ Maeda mengizinkan rumah kediamannya digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi setelah Jepang menyerah pada Sekutu.

Bunyi lengkap teks proklamasi adalah sebagai berikut:

***“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia.***

***Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l.,
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam
tempo yang sesingkat-singkatnya.***

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945

Atas nama Bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta”.

³ Pada masa penjajahan Belanda bernama Nassau Boulevard, dan pada masa penjajahan Jepang diganti menjadi Jl. Meijidori.

b. Kesadaran Berbudaya Bangsa

Kesadaran berbudaya dan kesadaran berbudaya bangsa memiliki persamaan makna di samping perbedaan. Kesadaran berbudaya itu ditandai kesadaran dari semua suku bangsa untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang memiliki ide, konsep, sistem nilai, perilaku dan berbagai macam benda sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kehidupan mereka mencerminkan sebagai suku-suku bangsa yang telah memiliki budaya dan peradaban yang tinggi. Masing-masing memiliki kesadaran untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaannya, sebagai acuan dalam kehidupannya. Dalam kondisi dijajah mereka telah membuktikan mampu mempertahankan eksistensi budayanya itu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kesadaran berbudaya bangsa, adalah kesadaran dari masing-masing suku-suku bangsa untuk tidak hanya mengenal kebudayaan sukunya, tetapi juga kebudayaan bangsa, bangsa Indonesia. Selama ini pembicaraan tentang kesadaran berbudaya bangsa cenderung kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan kesadaran berbangsa. Mungkin karena masalah bangsa lebih memiliki nilai politis dan strategis dibandingkan dengan kebudayaan. Bahkan bahasa sebagai bagian dari kebudayaan lebih penting, sehingga menjadi salah satu butir dalam ikrar Sumpah Pemuda.

Kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa memiliki hubungan yang dekat, bahkan hubungan itu dalam bentuk

timbang balik. Tumbuhnya kesadaran berbudaya bangsa, tidak terlepas dari bangkitnya kesadaran berbangsa. Tetapi tidak salah jika dikatakan bahwa tumbuhnya kesadaran berbangsa karena didorong oleh kesadaran bahwa antara kebudayaan masing-masing suku memiliki unsur kemiripan atau kesamaan dalam hal ide, konsep dan sistem nilai, serta perilaku dan juga benda. Kemiripan atau kesamaan itu menumbuhkan solidaritas di antara suku bangsa, dan dari sana tumbuh kesadaran berbangsa. Dalam sejarah kehidupan kita, kebudayaan mempunyai peran yang berbeda-beda. Peran itu dapat dilihat dari penilaian dalam zaman pra-revolusi, zaman revolusi dan peran pada zaman pembangunan. Dalam zaman pra-revolusi, kebudayaan Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam membentuk kesadaran berbangsa.

Dalam kaitan dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa di kalangan masyarakat suku-suku bangsa itu, ada 3 makna yang menarik untuk dicermati. *Pertama*, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai bagian dari tumbuhnya kesadaran berbangsa. Lahirnya kesadaran untuk menjadi satu ikatan, "satu bangsa," mencerminkan betapa dalamnya keikhlasan masing-masing suku bangsa untuk merubah statusnya dari suku bangsa menjadi bangsa. Kenaikan status itu membawa perubahan yang sangat men-dasar dalam hal kerangka berfikir (paradigma) masyarakat.⁴ Kerangka berfikir kesuku-bangsaan yang

⁴ Prof. Dr. Slametmulyana, Politik Bahasa Nasional, Jambatan Jakarta 1966: hal. 2

telah berkembang berabad-abad kini harus berubah atau lebih tepat bertambah menjadi kerangka berfikir kebangsaan. Sebaliknya, kerangka pikir kebangsaan akan banyak diperkaya oleh kerangka pikir suku bangsa.

Di samping banyak elemen kesukubangsaan yang harus disesuaikan dengan kehadiran elemen kebangsaan, tidak sedikit elemen kesukubangsaan yang meningkat statusnya menjadi elemen kebangsaan. Singkatnya, sebagai konsekuensi dari perubahan itu masyarakat tidak hanya menggunakan kebudayaan suku bangsa sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga menggunakan kebudayaan kebangsaan sebagai garis acuan. Di samping masyarakat menggunakan sistem budaya suku bangsa, juga akan menggunakan sistem budaya kebangsaan.

Ikatan kesukubangsaan tidak menjadi renggang akibat perluasan persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Mereka tetap dapat hidup dalam kelompok suku bangsanya, dan masing-masing mempertahankan kebudayaannya. Kebudayaan suku bangsa ada, sebelum adanya kebudayaan bangsa. *Kebudayaan suku bangsa ada, selama bangsa Indonesia ada. Kebudayaan suku bangsa akan tetap ada, meskipun bangsa Indonesia karena sesuatu hal tidak ada.*

Kedua, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai bentuk “perlawanan budaya.” Yang dilawan adalah kebudayaan penjajah dalam arti luas. Meskipun kebudayaan penjajah lebih berkembang di daerah perkotaan, tetapi karena didukung oleh kekuasaan

dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan sebagai bangsa terjajah, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan kesukubangsaannya, apalagi kebangsaannya secara bebas. Kebudayaan yang pada hakikatnya bersifat dinamis, selalu berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan dimandulkan oleh berbagai tindakan pengekangan.

Salah satu contoh adalah soal pemakaian bahasa. Pemerintah Belanda berupaya keras untuk menjauhkan para pelajar dari pemakaian bahasa Melayu dengan alasan kepentingan pendidikan, di samping dengan sengaja memberikan peluang besar bagi orang bumiputra yang pandai berbahasa Belanda untuk maju dan mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan. Penyebarluasan pemakaian bahasa Belanda merupakan bentuk penjajahan budaya yang perlu diimbangi dengan perlawanan budaya, dalam bentuk upaya membangkitkan kesadaran berbudaya bangsa.

Ketiga, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai kesadaran akan nasib kebudayaan baik kebudayaan bangsa maupun suku bangsa arah ke depan. Pengakuan terhadap kehadiran kebudayaan bangsa membawa konsekuensi terhadap eksistensi kebudayaan suku bangsa dan sebaliknya. Semangat kehidupan suku bangsa tidak boleh padam karena pertumbuhannya menjadi anggota bangsa. Perlombaan untuk melaksanakan aspirasi dan mempertahankan nilai-nilai budaya suku bangsa harus dapat tersalur secara positif dalam kerangka kebangsaan.

c. Upaya memperkuat kesadaran berbangsa dan berbudaya bangsa

Meskipun masih dalam kondisi dijajah, kaum terpelajar telah menempuh berbagai cara untuk memperkuat kesadaran berbudaya bangsa. Langkah yang ditempuh antara lain:

- (1) Mendorong perkembangan organisasi/perkumpulan kemasyarakatan yang berazaskan perjuangan kebangsaan, untuk menjadi wadah penyaluran gagasan dan semangat untuk menjadi satu bangsa merdeka (Boedi Oetomo, Sarikat Dagang Islam, berbagai perkumpulan pemuda, dll).
- (2) Memanfaatkan lembaga politik yang didirikan oleh Belanda seperti Dewan Rakyat (*Volksraad*) sebagai ajang kompetisi kaum bumiputra dengan orang-orang Belanda. Pada waktu menjadi anggota Dewan Rakyat, Dr. Radjiman Wediodiningrat pernah hampir terpilih menjadi Ketua Dewan. Pada pemilihan pertama Radjiman memperoleh jumlah suara sama besar dengan Mr. Schuurman. Setelah pemilihan diulang, Radjiman kalah tiga suara dan dengan kekalahan yang tipis itu membuktikan bahwa orang-orang bumiputra mampu untuk berdiri sejajar bahkan memimpin bangsa Belanda.
- (3) Memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda dengan memasukkan pelajar kaum bumiputra untuk mendapatkan pendidikan sejajar dengan kaum penjajah dan dapat bersaing dengan bangsa Belanda. Muris-murid seperti

Soekarno, Hatta, Syahrir, Tjokroaminoto, Sutomo, Ki Hadjar Dewantara, Haji Agus Salim, Radjiman, Raden Saleh, dan lain-lain adalah murid-murid bumiputra yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan bangsa Barat.

- (4) Memanfaatkan lembaga-lembaga kebudayaan yang didirikan oleh penjajah seperti Lembaga Kebudayaan Indonesia (*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*); Balai Pustaka (*Volklectuur*); Lembaga Purbakala (*Oudheidkundige Dienst*) Lembaga Bahasa (*Indische voor Taal en Cultuur Onderzoek*); Lingkaran Seni Batavia (*Bataviaasch Kunstkring*); Pusat Kebudayaan Jepang (*Keimin Bunka Shidoso*) oleh kaum bumiputra untuk belajar ilmu tentang kebudayaan, kesenian, sejarah, bahasa dan sastra).
- (5) Pemakaian Bahasa Melayu oleh kaum bumiputra yang menjadi anggota di Dewan Rakyat (*Volksraad*). Masalah bahasa memegang peranan penting dalam politik penjajahan, baik Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang, untuk menanamkan kekuasaannya. Mereka memaksa rakyat untuk memahami dan memakai bahasa Belanda. Demikian pula halnya dengan ketika bangsa Jepang menjajah Indonesia. Salah seorang pendiri bangsa yang menentang pemakaian bahasa Belanda di lembaga pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Dalam sebuah tulisannya yang dimuat dalam majalah Hindia Putra tahun 1916-1917 beliau menyatakan: "...maka tibalah juga waktunya di mana satu bahasa bumiputra terpenting akan menggantikan kedudukan

bahasa Belanda dan di semua sekolah Hindia, bahasa Belanda akan dipelajari sebagai bahasa asing yang diperlukan."⁵ Pada akhirnya penjajah menyadari bahwa memaksakan penggunaan bahasanya justru merugikan bagi kepentingannya. Diperlukan bahasa suku bangsa yang dapat menjadi bahasa pergaulan (*lingua franca*) baik dalam hubungan antarsuku maupun dengan pemerintah Belanda. Belanda lebih sering menggunakan bahasa Melayu Riau sebagai pilihan. Sebagai contoh, dalam buku panduan pariwisata yang terbit 1786 ditulis oleh Johannes Hofhout untuk para pegawai VOC yang baru tiba di Batavia, di samping berisi informasi tentang keindahan daerah Cipanas, dan peringatan (*travel warning*) tentang berbahayanya penyakit tropis dan perdagangan barang-barang terlarang juga memuat daftar kata-kata bahasa Melayu yang berguna dalam percakapan sederhana.⁶

- (6) Penetapan (pengakuan) bahasa Melayu Riau sebagai bahasa nasional. Pengakuan itu merupakan peristiwa sejarah yang amat penting. Lagi-lagi telah lahir keikhlasan dari suku-suku bangsa yang lain menerima bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dalam pergaulan bangsa. Patut dicatat berdasarkan data pemakaian bahasa suku bangsa (tahun 1930) menunjukkan bahwa pemakai bahasa Melayu jauh lebih sedikit dibanding dengan bahasa suku

⁵ IKi Hajar Dewantara, *Kebudayaan II*, Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, 1994: hal. 111

⁶ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silng Budaya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000: hal.50

yang lain. Bahasa Jawa dipakai oleh 27.808.623 jiwa atau 47,02%, bahasa Sunda dipakai oleh 8.594.834 jiwa atau 14,53%, dibanding dengan pemakai bahasa Melayu Riau sebanyak 1.988.648 atau hanya 4,97% dibandingkan dengan jumlah penduduk Nusantara.⁷ Peristiwa kedua yang cukup menggemakan adalah ketika Muh. Husni Thamrin di lembaga Volksraad menyampaikan laporannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pidato itu diucapkan setelah Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938, sepejuh tahun setelah Sumpah Pemuda. Peristiwa kedua yang cukup menggemakan adalah ketika Muh. Husni Thamrin di lembaga Volksraad menyampaikan laporannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pidato itu diucapkan setelah Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938, sepejuh tahun setelah Sumpah Pemuda.

Topik 2: Pengertian dan Pendidikan Karakter Bangsa

Setelah melalui perjuangan yang panjang, kelahiran bangsa Indonesia diakui secara *de facto* dan *de jure* setelah diproklamasikannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (*hari Jum'at*). Sejak saat itu bangsa Indonesia telah lahir dan diakui keberadaannya oleh bangsa-bangsa yang lain. Pertanyaannya, seperti apa bangsa Indonesia itu? Untuk

⁷ Prof. Dr. Slametmulyana, Politik mBahasa Nasional, Jambatan Jakarta1966: hal. 12

menjawab pertanyaan itu Bung Karno mengkampanyekan program membangun atau membentuk bangsa (*nation*) dan karakter (*character*) bangsa yang dikenal dengan program *Nation and Character Building*. Lalu, apa yang dimaksud dengan karakter dan karakter bangsa itu?

Jika kata '*karakter*' diartikan sebagai "*sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain*" (KBBI:1988), maka '*karakter bangsa*' berarti "*sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain*". Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain adalah sistem nilai budaya (*cultural value system*)⁸ yang telah berkembang lama di dalam masyarakat suku bangsa. Setelah lahir satu bangsa, bangsa Indonesia, sistem nilai budaya itu tetap melekat dalam diri setiap warga bangsa Indonesia dan menjadi ciri penanda (*identitas*) bangsa.

Posisi kebudayaan sebagai sumber sistem nilai itu telah dijadikan landasan berpikir dari para pendiri bangsa. Sejak sebelum Indonesia secara resmi menjadi bangsa merdeka, para pendiri bangsa telah sibuk mempersiapkan berbagai perangkat untuk menjawab pertanyaan tentang karakter bangsa di atas. Beberapa sistem nilai yang disiapkan sebagai penanda jati diri bangsa itu digali dari perjalanan sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam

⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia 1990, hal. 26

kebudayaan bangsa. Untuk menentukan landasan falsafah hidup bagi bangsa baru itu disepakati lima sila yang kemudian disebut Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kebangsaan, Permusyawaratan perwakilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu disepakati lahirnya Undang-Undang Dasar Negara yang akan dijadikan aturan dasar dalam menata kehidupan berbangsa.

Selain dasar Negara dan Undang-undang Dasar, juga ditetapkan bendera kebangsaan merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya (dikibarkan dan dinyanyikan pada tanggal 28-10-1928), sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia. Mengingat bangsa yang baru lahir itu terdiri dari gabungan dari berbagai macam suku bangsa (hampir 500 suku bangsa), dan memiliki budaya, bahasa dan agama yang beranekaragam maka disepakatilah lambang Negara burung garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perjalanan selanjutnya sejumlah kesepakatan sebagai perwujudan identitas bangsa terus bertambah.

Membangun kesepakatan dari sekian banyak sistem nilai budaya bukanlah hal yang mudah. Bangsa Indonesia akan sulit untuk menjadi sebuah bangsa yang maju tetapi tetap memiliki karakter bangsa yang kukuh, sebagaimana halnya dengan negara-negara lain seperti: China, Jepang, Korea, dan Jerman, jika bangsa Indonesia tidak memiliki karakter bangsa yang kukuh. Kita semua tentu menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki

jati diri sebagai bangsa yang tangguh, bersatu, berbudaya, beradab, bermartabat, tidak rendah diri sehingga mampu berdampingan setara dengan bangsa-bangsa lain di dalam pergaulan internasional. Kita masih sepakat agar persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI masih tetap dipertahankan.

Sehubungan dengan hal itu, sasaran utama yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah bagaimana menata pola-pikir warga bangsa agar tidak bergeser ke arah pola pikir yang membuat bangsa ini kehilangan jati diri dan tidak mengalami perpecahan sebagaimana telah diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang diciptakan oleh para pendiri bangsa harus sama-sama dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk hidup dalam kesetaraan, kebersamaan, serta saling menghargai dan menghormati antarsesama dan antarsuku bangsa.

Dalam kaitan dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa di kalangan masyarakat suku-suku bangsa itu, ada 3 makna yang menarik untuk dicermati. *Pertama*, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai bagian dari tumbuhnya kesadaran berbangsa. Lahirnya kesadaran untuk menjadi satu ikatan, "satu bangsa," mencerminkan betapa dalamnya keikhlasan masing-masing suku bangsa untuk merubah statusnya dari suku bangsa menjadi bangsa. Kenaikan status itu membawa perubahan yang sangat mendasar dalam hal kerangka berfikir

(paradigma) masyarakat.⁹ Kerangka berfikir kesukubangsaan yang telah berkembang berabad-abad berubah atau lebih tepat bertambah menjadi kerangka berfikir kebangsaan. Sebaliknya, kerangka pikir kebangsaan akan banyak diperkaya oleh kerangka pikir suku bangsa.

Di samping banyak elemen kesukubangsaan yang harus disesuaikan dengan kehadiran elemen kebangsaan, tidak sedikit elemen kesukubangsaan yang meningkat statusnya menjadi elemen kebangsaan. Singkatnya, sebagai konsekuensi dari perubahan itu masyarakat tidak hanya menggunakan kebudayaan suku bangsa sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga menggunakan kebudayaan kebangsaan sebagai garis acuan. Di samping masyarakat menggunakan sistem budaya suku bangsa (lokal), juga akan menggunakan sistem budaya kebangsaan (nasional). Bahkan sebagai akibat bangsa Indonesia tidak mungkin menutup diri dari pengaruh budaya asing, mau tidak mau, suka atau tidak suka kita juga menggunakan sistem budaya global (internasional) sebagai acuan.

Ikatan kesukubangsaan tidak menjadi renggang akibat perluasan persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Mereka tetap dapat hidup dalam kelompok suku bangsanya, dan masing-masing mempertahankan kebudayaannya. Kebudayaan suku bangsa ada, sebelum adanya kebudayaan bangsa. *Kebudayaan suku bangsa*

⁹ Prof. Dr. Slametmulyana, Politik Bahasa Nasional, Jambatan Jakarta 1966: hal. 2

ada, selama bangsa Indonesia ada. Kebudayaan suku bangsa akan tetap ada, meskipun bangsa Indonesia karena sesuatu hal tidak ada.

*Kedua, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai bentuk “perlawanan budaya.” Yang dilawan adalah kebudayaan penjajah dalam arti luas. Meskipun kebudayaan penjajah lebih berkembang di daerah perkotaan, tetapi karena didukung oleh kekuasaan dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan sebagai bangsa terjajah, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan kesukubangsaannya, apalagi kebangsaannya secara bebas. Kebudayaan yang pada hakikatnya bersifat dinamis, selalu berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan, dimandulkan oleh berbagai tindakan pengekangan (*represif*).*

Salah satu contoh adalah soal pemakaian bahasa. Pemerintah Belanda berupaya keras untuk menjauhkan para pelajar dari pemakaian bahasa Melayu dengan alasan kepentingan pendidikan, di samping dengan sengaja memberikan peluang besar bagi orang bumiputra yang pandai berbahasa Belanda untuk maju dan mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan. Penyebarluasan pemakaian bahasa Belanda merupakan bentuk penjajahan budaya yang perlu diimbangi dengan perlawanan budaya, dalam bentuk upaya membangkitkan kesadaran berbudaya bangsa.

Ketiga, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai kesadaran akan nasib kebudayaan baik kebudayaan bangsa maupun suku bangsa arah ke depan. Pengakuan terhadap kehadiran

kebudayaan bangsa membawa konsekuensi terhadap eksistensi kebudayaan suku bangsa dan sebaliknya. Semangat kehidupan suku bangsa tidak boleh padam karena pertumbuhannya menjadi anggota bangsa. Perlombaan untuk melaksanakan aspirasi dan mempertahankan nilai-nilai budaya suku bangsa harus dapat tersalur secara positif dalam kerangka kebangsaan.

Untuk menjawab pertanyaan itu Bung Karno mengkampanyekan program membangun atau membentuk bangsa (*nation*) dan karakter (*character*) bangsa yang dikenal dengan program *Nation and Character Building*. Lalu, apa yang dimaksud dengan karakter dan karakter bangsa itu? Jika kata '*karakter*' diartikan sebagai "*sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain*" (KBBI:1988), maka '*karakter bangsa*' berarti "*sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain*". Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain adalah sistem nilai budaya (*cultural value system*)¹⁰ yang telah berkembang lama di dalam masyarakat suku bangsa.

Di samping sering digunakan istilah '*karakter bangsa*' juga disebut sebagai '*watak bangsa*' atau '*kepribadian bangsa*' atau '*pekerti bangsa*' yang pada hakikatnya memiliki makna yang sama. Yang dimaksud dengan '*kepribadian bangsa*' adalah nilai-nilai yang

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia 1990, hal. 26

melekat pada konfigurasi (kebudayaan) yang terwujud oleh kualitas-kualitas mental suatu bangsa, yang menampilkan cirri-ciri kepribadiannya dalam perilaku dan sangat dihargai dalam kehidupan suatu bangsa. Suatu konfigurasi kebudayaan dapat diamati dari kualitas-kualitas mental dalam kehidupan suatu bangsa, yang tertuju pada nilai-nilai yang menonjol di atas. Suatu bangsa yang ingin maju stidaknya harus memiliki empat bentuk nilai budaya yang membentuk kepribadian bangsa yang positif: (1) orientasi ke masa depan (hemat, teliti, maju); (2) berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam (inovasi, produktif, kreativitas, kearifan); (3) menilai tinggi hasil karya (kepuasan, kegunaan); (4) menilai tinggi berusaha atas kemampuan sendiri (mandiri, percaya diri, tajin, kreatif, inovatif, disiplin, bertanggung jawab).

Sementara itu yang dimaksud dengan 'pekerti bangsa' adalah tabiat, perangai, watak, atau sifat-sifat yang baik (positif) dari suatu bangsa, yang banyak dipengaruhi oleh unsure nilai budaya suku bangsa. Menurut Edi Sedyawati¹¹, budi pekerti diterjemahkan sebagai moralitas (*morality*), yang mengandung pengertian: adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Sebagai perilaku, budi pekerti juga meliputi sikap yang tercerminkan oleh perilaku.

Setelah lahir satu bangsa, bangsa Indonesia, sistem nilai budaya itu tetap melekat dalam diri setiap warga bangsa Indonesia dan menjadi ciri penanda (*identitas*) dasar bagi bangsa bangsa

¹¹ Edi Sedyawati (Editor) Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur, Jakarta, Balai Pustaka 1999.

Indonesia. Dari sekian banyak sistem nilai yang berkembang di masing-masing suku bangsa terdapat sistem nilai budaya yang memiliki kemiripan dan bahkan kesamaan sehingga sangat mungkin dapat berlaku juga pada suku bangsa yang lain. Kemiripan dan kesamaan itu makin memperkuat tali ikatan menjadi satu bangsa.

Tetapi di samping adanya sistem nilai budaya suku bangsa yang telah menjadi identitas dasar itu diperlukan sistem nilai budaya yang lain yang menjadi acuan bagi seluruh suku bangsa dalam menata kehidupan berbangsa. Untuk itu para pendiri bangsa “menyiapkan” sejumlah sistem nilai budaya bangsa yang sifatnya nasional. Dari Kongres Pemuda II, di samping telah melahirkan Sumpah yang tiga, juga melahirkan tiga dasar sebagai bentuk sistem nilai yang sifatnya nasional, yaitu dengan dinyanyikannya untuk pertama kali lagu Indonesia Raya karya WR Soepratman dan dikibarkannya bendera Merah Putih yang kemudian lagu tersebut disepakati untuk ditetapkan sebagai lagu kebangsaan dan bendera Merah Putih ditetapkan menjadi bendera nasional. Yang ketiga adalah nilai persatuan bangsa sebagai dasar bersatu dalam kesatuan yang bulat dan kukuh yang disebut sebagai dasar unitarisme. Menurut Muhammad Yamin nilai dasar itu “*melenyapkan dasar berpulau-pulau, bemusa-nusa atau dasar insularisme, dan bersihkan ruangan rohani dan organisasi perjuangan dengan dasar kelahiran bangsa, yaitu dasar unitarisme*”.¹²

¹² E. Ulrich Kratz, *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX: Sumber Terpilih*, Gramedia, Yayasan IKAPI dan The Ford Foundation, 2000, hal. 3-4

Sejumlah sistem nilai di atas hanyalah merupakan sebagian dari sistem-sistem nilai nasional yang terus dikembangkan penataannya. Lahirnya falsafah dasar bangsa Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi landasan ideal dan konstitusional untuk mengatur mekanisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu lahir pula lembaga-lembaga nasional seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Wilayah Negara dan lain-lain.

“Ernest Renan berkata: ‘Bangsa adalah satu solidaritas besar, solidaritas tiap-tiap hari’. Dia tidak berkata, bangsa itu adalah golongan manusia dengan bahasa satu, atau golongan manusia dengan agama satu, tidak. Dia berkata, bangsa adalah satu solidaritas besar tiap-tiap hari. Nah, maka saya minta agar `supaya bangsa Indonesia benar-benar menjadi satu solidaritas tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap menit. Jangan kok solider hanya untuk beberapa waktu saja. Solider hanya buat menghadapi bahaya, misalnya”.

(Bung Karno: 1960) .

BAB III
KONDISI BANGSA DAN BIROKRAT

SUBMODUL 2

NUNUS SUPARDI
SUNARDI DWIDJOSOESTRO
HASANALWI

DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2004

A. Pendahuluan

Sebagaimana diuraikan di bagian Pengantar, dalam era reformasi sekarang ini bangsa Indonesia harus menghadapi dua masalah yang mendasar, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan fenomena kebangsaan yang menurun kualitasnya; dan (2) masalah birokrat sebagai penyelenggara tata pemerintahan yang kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Kedua permasalahan besar itu mewarnai kondisi psikososial masyarakat Indonesia yang ditandai oleh terjadinya berbagai macam krisis. Krisis yang paling meresahkan adalah terdapatnya krisis pola-pikir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Krisis itu telah mengakibatkan kaburnya pola pikir tentang apa hak kewajiban sebagai warganegara yang hidup sebagai orang Indonesia dan berkarakter sebagai bangsa Indonesia.

Akibat dari kaburnya pola pikir masyarakat tentang kehidupan berbangsa dalam kebersamaan, kesetaraan dalam wadah NKRI yang multietnik dan multibudaya itu sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan bangsa. Sekedar menambah kejelasan gambaran tentang akibat yang ditimbulkan oleh perubahan pola pikir itu dapat dilihat dari sejumlah data yang dihimpun dari berbagai sumber, antara lain dari Lembaga Informasi Nasional (LIN), Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, dan hasil Jajak Pendapat (JP) harian Kompas.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, konsep dasar yang digunakan sebagai landasan adalah pernyataan dalam

Pembukaan UUD 1945: “... untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam memelihara ketertiban dunia dan perdamaian abadi.....”. Semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 1997, Indonesia mengalami perubahan yang fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, sistem pemerintahan oleh struktur kekuasaan yang dominan atau sering disebut totaliter bergeser ke arah tata pemerintahan yang demokratis. Di samping itu pelaksanaan tata pemerintahan yang dilandasi oleh sistem yang sentralistik berubah menuju ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik atau otonomi. Inti dari tatanan pemerintahan yang demokratis menempatkan kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga berbagai tuntutan dan aspirasi serta partisipasi masyarakat menjadi inti dalam penyelenggaraan negara. Implikasinya, suara rakyat itu perlu mendapatkan penyaluran, sehingga dapat ditampung dan dipenuhi oleh perangkat organisasi pemerintahan. Sementara itu penerapan sistem pemerintahan otonom dari sisi kebangsaan dan kebudayaan masih perlu diadakan evaluasi.

Dengan pengertian seperti itu, dapat diartikan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan pemerintahan terletak pada apakah suara rakyat itu dapat disalurkan, ditampung dan direalisasikan melalui sistem dan praktek pemerintahan secara baik dan tepat. Di masa lalu, sistem dan praktek itu mengandung banyak kelemahan sehingga suara rakyat tidak mendapatkan penyaluran secara baik,

tidak terwadahi secara akurat dan dengan demikian banyak suara rakyat yang tidak mendapatkan realisasi yang memuaskan sesuai kehendak rakyat. Demikian pula halnya pelaksanaan sistem otonomi apakah sudah sesuai dengan jiwa dan semangat berotonomi atau belum?

Keberhasilan kinerja pemerintah antara lain diukur dari kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat (publik). Kinerja layanan pemerintah diartikan sebagai gambaran mengenai seberapa jauh kebijakan, program dan kegiatan pemerintah berdampak positif terhadap masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut, antara lain dapat dilihat dari indikator kepercayaan responden terhadap pemerintah, rasa aman dan rasa terlindungi oleh aparat, pengurusan perizinan di lembaga pemerintah dan pengaruh pertentangan elit terhadap layanan pemerintah.¹

Sementara itu, ketika sistem dan praktek pemerintahan yang tidak dapat memuaskan kehendak rakyat itu mengalami perubahan, gelombang kebebasan untuk melakukan perubahan itu telah melahirkan sistem dan praktek yang cenderung tidak menghasilkan perbaikan. Iklim reformasi telah melahirkan euforia kebebasan yang menganggap setiap warga boleh melakukan tindakan apa saja, walau melampaui batas-batas norma dan etika. Pemerintah sebagai pengemban tugas yang digariskan GBHN dan TAP MPR memiliki tanggung jawab utama dalam mengatasi berbagai

¹ Kinerja Pemerintah Di Bidang Politik, Lembaga Informasi Nasional, 2001, hal. 11

permasalahan yang dihadapi. Pemerintahan yang terbentuk pasca reformasi telah berusaha memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, namun sejauh mana keberhasilannya terus diperjuangkan. Hambatan dan tantangan dalam memecahkan masalah tersebut sangat kompleks, di samping bersumber dari kemampuan sumber daya manusia juga faktor mental, pola pikir, budaya dan sosial.

B. Pokok Bahasan

1. Tentang kondisi bangsa dengan menunjukkan data yang menggambarkan hal-hal yang berkenaan dengan kebangsaan: rasa kebangsaan, rasa bangga sebagai bangsa, menurunnya persatuan antarsukubangsa, antarwilayah, antarpemeluk agama, antarpending partai serta berbagai konflik yang terjadi di seluruh wilayah.
2. Tentang kondisi birokrat (birokrasi) dewasa ini dengan menunjukkan data yang menggambarkan hal-hal yang berkenaan dengan birokrat pada dewasa ini: mengenai kualitas pelayanan, perlindungan, pemberian izin, tindak pelanggaran korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Tentang perilaku pemimpin yang menggambarkan birokrat cenderung mau menang atau benar sendiri, saling menyalahkan dan merasa paling hebat atau mampu dalam menyelesaikan masalah.

C. Tujuan

1. Peserta memahami kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis multidimensi, dan kondisi birokrat yang kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
2. Peserta dapat mengidentifikasi langkah-langkah praktis dalam mengakhiri krisis bangsa.
3. Peserta dapat merumuskan pola pikir dan perilaku yang tepat dalam menjaga keutuhan bangsa, jati diri bangsa dan perbaikan kondisi birokrat.

D. Metode

1. Ceramah 3. Diskusi (kelompok dan pleno)
2. Curah Pendapat 4. Permainan/Simulasi

E. Langkah

1. Fasilitator menjelaskan tentang metode pendidikan.
2. Fasilitator membuat pengantar sebagai pemanasan misalnya: pembacaan sajak, nyanyian, penyangkan film, CD, VCD, gambar atau dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk curah pendapat mengenai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dengan pertanyaan: *"apa yang Anda ketahui tentang kondisi bangsa pada dewasa ini?"* dan *"apakah kondisi sekarang ini masih merasa bangga menjadi bangsa Indonesia?"*
3. Fasilitator mengajak membahas masalah 'menjadi bangsa' maupun masalah yang dihadapi oleh kalangan birokrat.

4. Peserta membuat kesimpulan dan hasil diskusi.

F. Waktu: Waktu yang diperlukan: 4 x 45 menit

G. Peralatan

1. LCD/OHP
5. Double-tape (selotip bolak-balik)
2. Kertas (Flip Chart)
6. VCD/DVD
3. Kertas masterplan
7. Tape
4. Spidol
8. White Board

H. Uraian Topik

Topik 1: Kondisi Bangsa

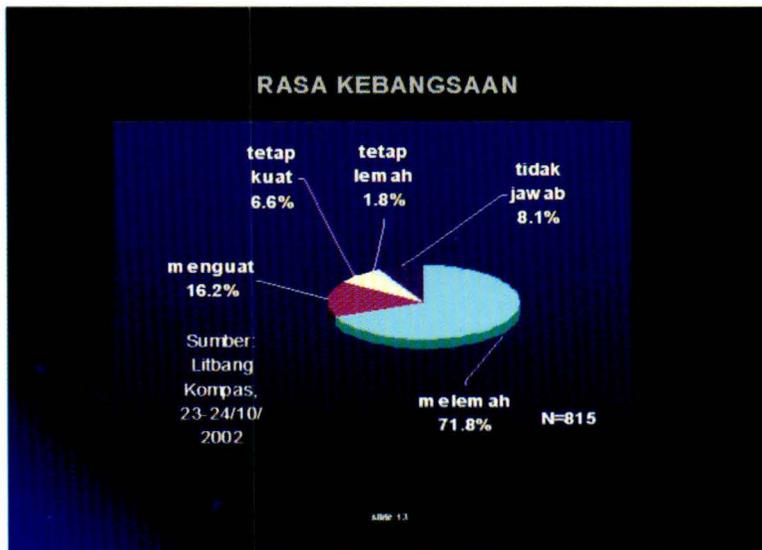
1. Masalah Rasa Kebangsaan

Rasa kebangsaan mulai bangkit sejak berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908. Rasa kebangsaan terus dipupuk dan berkat makin tebalnya rasa kebangsaan itu meskipun diibaratkan hanya bersenjata bambu runcing kita dapat merebut kemerdekaan tahun 1945 dari penjajah. Setelah merdeka meskipun harus menghadapi beberapa percobaan perpecahan, persatuan bangsa itu dapat dipertahankan. Tetapi akhir-akhir ini rasa kebangsaan yang sudah mulai mengkristal itu terusik. Bila kondisi seperti itu dibiarkan berkembang terus dikhawatirkan persatuan bangsa yang retak dan

kemudian pecah berkeping-keping.

Berdasarkan hasil JP yang dilakukan oleh Kompas tahun 2002, Rasa Kebangsaan itu kini cenderung melemah. Dari 851 responden, 71,8% menjawab bahwa 'Rasa Kebangsaan' itu semakin melemah, dan yang menjawab makin menguat hanya 16,2% saja. Bagi sebuah bangsa yang relatif masih muda dan memiliki wilayah yang terdiri atas ribuan pulau, serta berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa dan budaya, maka dengan angka 71,8% menyatakan rasa kebangsaan makin melemah, kenyataan itu merupakan hal amat serius. (Lihat Data 1)

Data 1



2. Masalah Konflik.

Data ini memperkuat kebenarannya kondisi rasa kebangsaan yang cenderung menurun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Laboratorium Sosiologi FISIP UI, jumlah konflik sosial yang terjadi mulai tahun 1991 hingga 2000 menunjukkan peningkatan. Frekuensi konflik sosial yang pada tahun 1991 hanya terjadi 7 kali dan hingga tahun 2000 jumlahnya menjadi 1.050 kali. Frekuensi paling banyak terjadi tahun 1999 sebanyak 379 kali (Lihat Tabel 2). Sementara itu mengenai tempat terjadinya konflik ternyata merata di seluruh provinsi. Konflik yang paling banyak terjadi di DKI Jakarta (Tabel 3)

Tabel 2

KEJADIAN KONFLIK SOSIAL

Tahun Kejadian	Frekuensi Kejadian	Persentase
1991	7	0,7
1992	8	0,8
1993	14	1,3
1994	19	1,8
1995	37	3,5
1996	43	4,1
1997	60	5,7
1998	245	23,3
1999	339	32,3
2000	279	26,5
TOTAL	1050	100

Sumber: Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia

Tabel 3

**KEJADIAN KONFLIK MENURUT LOKASI PROVINSI DAN
DAERAH PERBATASAN**

No.	PROVINSI	FREKUENSI	%
01	DKI Jakarta	262	24,7
02	Jawa Barat	252	23,7
03	Jawa Tengah	82	7,7
04	DI Yogyakarta	16	1,5
05	Jawa Timur	62	5,8
06	Nangroe Aceh Darussalam	59	5,6
07	Sumatera Utara	53	5,0
08	Sumatera Barat	14	1,3
09	Riau	11	1,0
10	Jambi	28	2,6
11	Sumatera Selatan	8	0,8
12	Bengkulu	1	0,1
13	Lampung	17	1,6
14	Kalimantan Barat	31	2,9
15	Kalimantan Tengah	5	0,5
16	Kalimantan Selatan	6	0,6
17	Kalimantan Timur	10	0,9
18	Sulawesi Utara	5	0,5
19	Sulawesi Tengah	2	0,2
20	Sulawesi Selatan	23	2,2
21	Sulawesi Tenggara	8	0,8
22	Maluku	38	3,4
23	Maluku Utara	1	0,1
24	Papua	10	0,9
25	Bali	12	1,1
26	Nusa Tenggara Barat	6	0,6
27	Nusa Tenggara Timur	18	1,7
28	Timor Timur	18	1,7
29	Perbatasan Jabar-Jateng	2	0,2
30	Perbatasan Kalbar-Kaltim	1	0,1
31	Tidak diketahui	3	0,3
	TOTAL	1062	100,0

Sumber: Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia

Bila diklasifikasi maka ada 2 macam konflik, yaitu yang bersifat horizontal, yakni antarkelompok masyarakat dan yang bersifat vertikal, yakni melawan Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya konflik bermacam-macam: Etnik, Separatisme, Agama, dan Ekonomi. Konflik itu ada yang hanya berlangsung satu kali saja terus selesai dan satu kali bertahan lama, tetapi ada konflik yang terjadi berulang kali (Lihat Tabel 4). Kondisi setelah tahun 2000 cenderung masih sering terjadi konflik antarwilayah atau antarkampung, tetapi dilihat dari segi volume maupun kualitasnya cenderung mengalami penurunan.

Tabel 4

KLASIFIKASI KONFLIK

LOKASI KEJADIAN	KELANGSUNGAN	KLASIFIKASI UMUM	KARAKTER KHUSUS LAIN
Nanggroe Aceh Darussalam	Satu kali, bertahan lama	Vertikal (melawan Pemerintah Pusat)	Etnik Separatisme Agama Ekonomi
Papua	Satu kali, bertahan lama		Etnik Separatisme Ekonomi
Sulawesi Tengah	Berkali-kali	Horizontal (Antar kelompok masyarakat)	Etnik Agama
Maluku	Berkali-kali		Etnik Agama
Kalimantan	Berkali-kali		Etnik
Batam	Berkali-kali		Etnik Ekonomi

Sumber: Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia

3. Masalah kerukunan

Data di bawah ini menggambarkan masalah kerukunan dilihat dari sudut hubungan antarkelompok di masyarakat. Dari data ini tingginya frekuensi terjadinya konflik menunjukkan bahwa masalah kerukunan cenderung melemah. Berdasarkan hasil JP harian Kompas, masalah kerukunan di lingkungan bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Jawaban dari pertanyaan tentang masalah 'Kerukunan Antarsuku Bangsa' sebagai pengukuh ikatan kebangsaan ternyata sangat memprihatinkan. Jawaban dari 919 responden menyatakan 69,3% menjawab kerukunan antaretnik semakin memburuk, dan yang menjawab semakin membaik hanya 21%. Masalah 'Kerutuhan Wilayah/Daerah' 64,7% menjawab semakin memburuk, dan 23,7% menjawab semakin membaik. Mengenai masalah 'Kerukunan Antarpemeluk Agama' menunjukkan tanda-tanda membaik, karena hanya 43,3% yang menjawab semakin memburuk dan 36,8% menjawab semakin membaik. Sementara itu masalah 'Kerukunan Antarpendukung Partai' juga menunjukkan tanda-tanda agak membaik, karena hanya 37,2% menyatakan semakin memburuk dan 27,5% menyatakan semakin membaik dan 17,2% sama saja (Lihat Tabel 5)

Tabel 5**PENILAIAN TENTANG KONDISI INDONESIA**

Membaik/ Memburuk?	Semakin Membaik	Semakin Memburuk	Sama Saja	Tidak Tahu/ Tidak Jawab
1	2	3	4	5
Kerukunan Antarsuku Bangsa	21%	69,3%	8,4%	2,4%
Keutuhan Wilayah/Daerah	23,7%	64,7%	8,0%	3,8%
Kerukunan Antarpemeluk Agama	36,8%	43,3%	17,5%	2,4%
Kerukunan Antar pendukung Partai	27,5%	37,2%	17,2%	18,1%

Keterangan: N=919, Error 3,2% Sumber: Litbang Kompas, 25 Oktober 2000

Selanjutnya, berdasarkan JP yang dilakukan oleh Kompas tahun 2004, kondisi kerukunan cenderung menjadi membaik. Pada tahun 2003, yang menjawab tidak bangga tentang persatuan bangsa sebanyak 48,9% tetapi tahun 2004 naik sedikit menjadi 49,5%. Sementara itu untuk Kerukunan Beragama yang menjawab tidak bangga tahun 2003 sebanyak 38,5% dan tahun 2004 turun menjadi 30,5%. (Lihat Tabel 6)

Tabel 6

**RASA BANGGA DAN TIDAK BANGGA TERHADAP BBRP.
KONDISI SAAT INI**

No.	Kondisi Bangsa Saat ini	Kebanggaan %					
		Bangga		Tidak Bangga		Tidak Menjawab	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persatuan Bangsa	49,1	49,6	48,9	49,5	2,0	0,9
2	Kerukunan Beragama	59,5	68,6	38,5	30,5	2,0	0,9
3	Kebebasan Berpendapat	44,2	76,6	51,9	22,0	3,9	1,4
4	Keadilan Hukum	13,9	22,6	82,1	75,9	4,0	1,5
5	Kemakmuran Ekonomi	14,2	20,7	83,1	78,4	2,7	0,9
6	Keamanan Masyarakat	19,1	39,2	76,6	60,0	4,3	0,8
7	Kiprah Pemimpin Nasional	16,6	37,0	78,9	59,0	4,5	4,0
8	Kiprah Wakil Rakyat	14,2	28,6	80,4	66,3	5,4	5,1

Sumber: Litbang Kompas (2004) Responden 1061 berusia 17 tahun dipilih dengan menggunakan metode sampling, berdomisili di diseluruh (32) ibu kota provinsi. Error: 3% (Kompas, 23/9/2004)

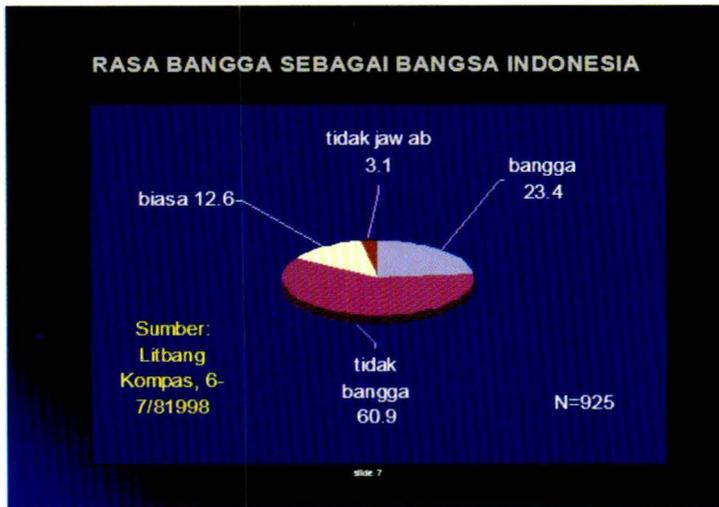
4. Masalah Rasa Kebanggaan Nasional

Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia seharusnya melekat dalam dada bangsa Indonesia, karena akan dapat menjadi mesin penggerak semangat dalam segala bidang. Sebagai bangsa kita berbesar hati, merasa gagah, merasa kuat dan hebat karena sebagai bangsa kita memiliki keunggulan. Rasa kebanggaan

nasional bangga adalah sikap kejiwaan yang terwujud pada sikap menghargai warisan sejarah, budaya, semangat, kekayaan alam dan semua hal lain yang menjadi milik bangsa sendiri (KBBI:1988). Seperti bangsa Inggris memiliki rasa kebanggaan yang tinggi dengan semboyan "*wright or wrong my country*". Kita sebagai bangsa juga memiliki semboyan-semboyan yang mencerminkan kita juga memiliki rasa kebanggaan itu. Sebagai contoh semboyan yang berkembang di lingkungan masyarakat Jawa "*sadumuk bathuk, sanyari bumi*", artinya meskipun hanya selebar jidat dan sepanjang jengkal, bila tanah air kita akan direbut oleh bangsa lain akan kita pertahankan sampai titik darah penghabisan.

Tetapi jika dicermati kondisi rasa bangga itu akhir-akhir ini cenderung justru sebaliknya. Di kalangan masyarakat sering muncul pernyataan "*Aku malu jadi bangsa Indonesia*", bahkan pernyataan seperti itu telah menjadi salah satu judul puisi penyair terkenal Taufiq Ismail. Berdasarkan JP yang dilakukan Kompas tahun 1998, menunjukkan bahwa pernyataan seperti itu tidak salah. Jawaban dari 925 responden menunjukkan sebanyak 60,0% menjawab bahwa mereka tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, dan yang merasa bangga hanya sebesar 24,3% saja (Lihat Data 6).

Data 6



Dari gambaran sekilas di atas menunjukkan, dapat ditafsirkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia sedang mengalami degradasi, dan untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit agar bangsa Indonesia memiliki rasa persatuan yang kukuh dan rasa kebanggaan nasional, serta cinta tanah air yang tinggi. Data di atas tidak secara khusus menggambarkan tentang peran birokrat dan bagaimana kondisi birokrasi pemerintahan, tetapi sesungguhnya birokrat mempunyai peran besar dalam mengatasi berbagai masalah bangsa seperti tersebut di atas.

Topik 2: Kondisi Pelayanan Birokrat

1. Kemampuan Birokrat dalam Penanganan Disintegrasi Bangsa, SARA, Demokratisasi, dan Reformasi di Bidang Hukum

Sebagian besar (64%) responden berpendapat pemerintah belum menangani dengan baik pernyataan beberapa tokoh di daerah yang akan melepaskan diri dari NKRI (disintegrasi bangsa). Walaupun demikian ditemukan pula (24%) responden berpendapat bahwa masalah itu sudah ditangani dengan baik, dan 2,6% saja yang menyatakan sudah ditangani dengan sangat baik (Lihat Tabel 1, butir 1). Sementara itu, dalam hal penanganan masalah SARA di beberapa daerah, responden menilai sebagian besar (79,7%) menyatakan belum berhasil, sementara yang menjawab telah berhasil hanya 1,6% saja (Lihat Tabel 1, butir 2). Dalam JP tentang keberhasilan pelaksanaan demokratisasi responden menyatakan 49,5% menyatakan belum berjalan dengan baik (Lihat Tabel 1, butir 3), sedangkan reformasi hukum, sebanyak 63,4% menyatakan kurang baik, dan penegakan HAM 55,3% (Lihat Tabel 1, butir 4 dan 5),.

Tabel 1

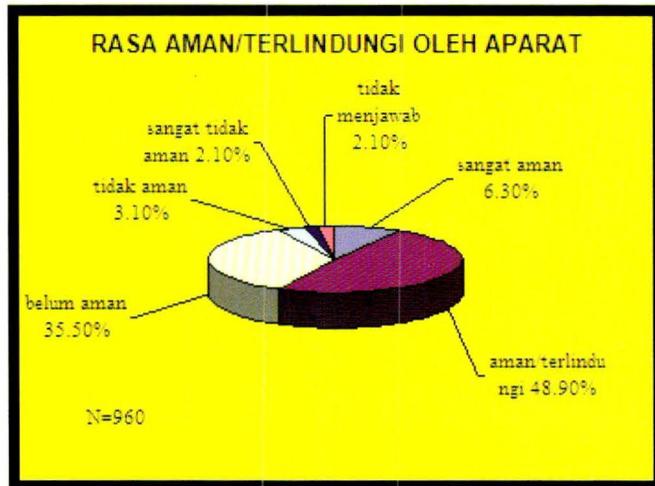
Masalah \ Penilaian	Amat Baik	Baik	Belum/ Kurang	Amat Tdk. Baik	Tdk.Baik/ Tdk. Sa- ma Sekali	Tidak Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1. Disintegrasi	2.6	24	64		3.9	5.5
2. Sara	1.6	8.3	79.7	7.5		2.9
3. Demokratisasi	4.5	37.5	49.5	2.8	1.6	4.1
4. Reformasi Hukum	1.5	21.3	63.4	3.6	8.7	1.5
5. Penegakan HAM	0.9	32.7	55.3	1.6	5	4.5

Sumber: Lembaga Informasi Nasional, 2001

2. Penciptaan Rasa Aman

Rasa aman bagi kalangan rakyat adalah bagian hidup yang paling penting bagi kalangan rakyat. Aman dari segala ancaman di dalam lingkungan rumah tangga, rukun tetangga, rukun warga, dan lingkungan yang lebih luas. Tindak kriminal terjadi di berbagai tempat dan setiap saat. Dari hasil JP terhadap 960 responden mengenai rasa aman yang dihasilkan dari kerja keras aparat, sebanyak 48,9% telah menyatakan merasa aman, dan 8,3% merasa sangat aman. Sementara itu, 35,5% menyatakan belum memiliki rasa aman (Lihat Data 2).

Data 2, Tingkat Rasa Aman Hasil Kerja Aparat

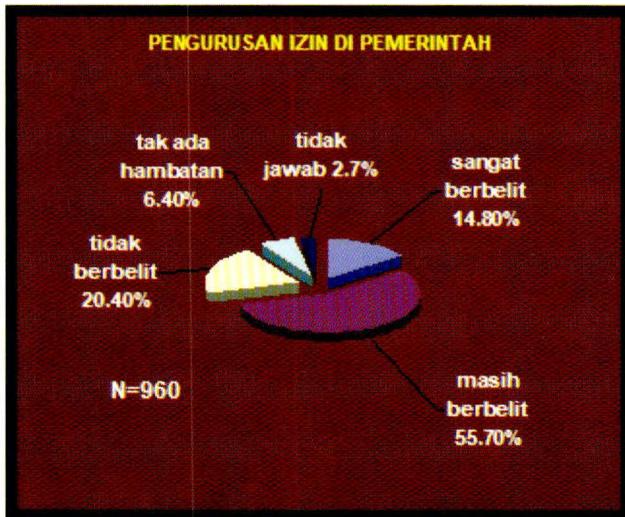


Sumber: Lembaga Informasi Nasional 2001

4. Pengurusan Perizinan

Seperti tergambar dalam data 8 di atas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perizinan masih sangat kurang. Dari 960 responden, 55,7% responden menyatakan masih berbelit-belit dan 14,8% menyatakan sangat berbelit-belit (Lihat Data 3).

Data 3, Pengurusan Izin dari Pemerintah



Sumber: Lembaga Informasi Nasional 2001

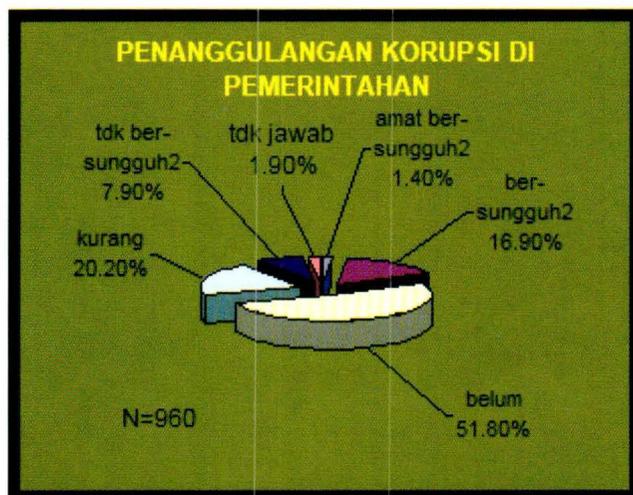
2. Penanganan Masalah KKN

KKN merupakan masalah paling besra dan rumit yang harus diselesaikan oleh birokrat. Citra birokrat yang merosot di mata masyarakat harus dapat diangkat lebih baik, oleh para birokrat sendiri. Memperbaiki citra bangsa di mata dunia internasional yang tahun 2005 Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berpredikat negara terkorup nomor 5 dari 146 negara 6 (menurut Transprancies Watch) menjadi tanggung jawab birokrat.

Gambaran tentang perkembangan hasil pemberantasan **Korupsi** hingga tahun 2001 menunjukkan sebanyak 51,8%

menyatakan pemerintah belum bersungguh-sungguh menangani masalah itu, 20,2% menyatakan kurang sungguh-sungguh, dan 7,9% menyatakan sangat-sangat tidak bersungguh-sungguh (Lihat Data 4). Sementara itu dalam hal penerapan hukum kasus korupsi oleh penegak hukum 66,4% menyatakan kurang berhasil (Lihat Data 4).

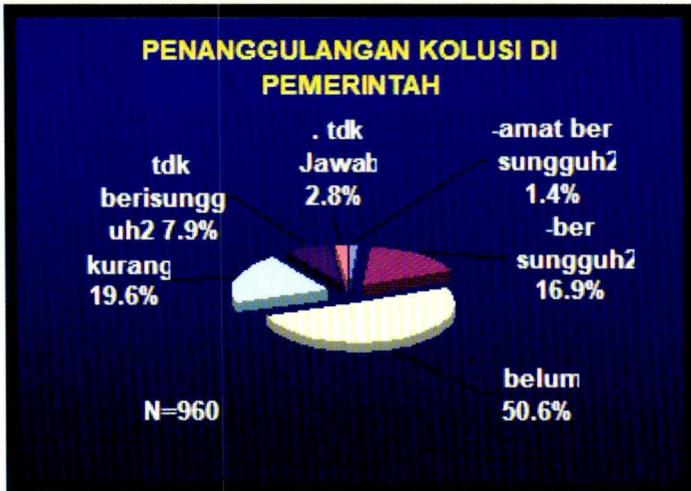
Data 4



Sumber: Lembaga Informasi Nasional 2001

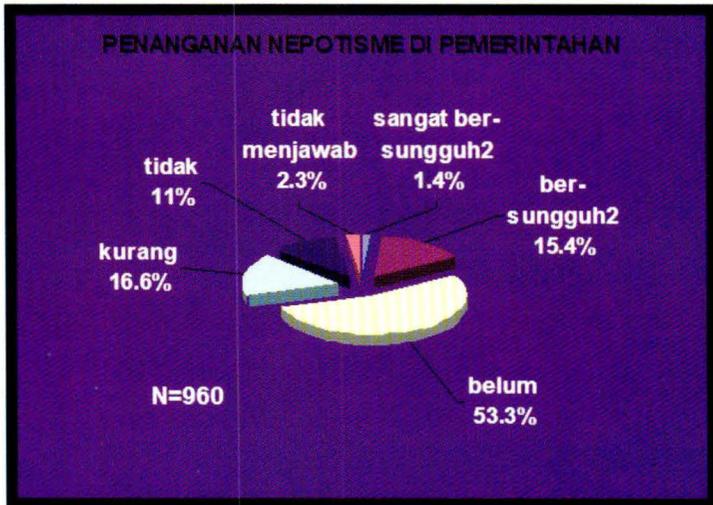
Sementara itu, mengenai masalah penanggulangan **kolusi** sebanyak 50,6% menyatakan pemerintah belum bersungguh-sungguh menangani masalah itu, 19,6% menyatakan kurang sungguh-sungguh, dan hanya 16,3% menyatakan sangat bersungguh-sungguh (Lihat Data 5)

Data 5, Penggulungan Kolusi di Pemerintahan



Sumber: Lembaga Informasi Nasional 2001

Data 6, Penanganan Nepotisme di Pemerintahan



Sumber: Lembaga Informasi Nasional 2001

Dalam data No. 6 diatas menggambarkan tentang masalah hasil penanggulangan **nepotisme**, dan dari data itu menunjukkan bahwa sebanyak 53,3% menyatakan pemerintah belum bersungguh-sungguh menangani masalah itu, 16,6% menyatakan kurang sungguh-sungguh, dan hanya 15,4% menyatakan sangat bersungguh-sungguh.

3. Hasil Pemberantasan KKN di Lingkungan Lembaga Penegak Hukum

Jika dibandingkan dengan data tahun 2001 (JP LIN) dengan hasil JP Kompas bulan Desember 2004, maka hasil pemberantasan KKN belum menunjukkan hasil yang memadai. Pada beberapa lembaga pemerintah maupun masyarakat, masih menunjukkan angka di atas 50% seperti terlihat dalam tabel 9 di bawah ini. Lembaga yang belum bebas dari KKN paling tinggi adalah Kepolisian (81,4%) disusul DPR/DPRD (78,9%) dan Kejaksaan (73,4%). Meskipun angkanya agak lebih rendah dari ketiga lembaga tersebut, untuk lembaga pendidikan dan keagamaan yang angkanya 70,6% dan 60,0% tentu amat memprihatinkan kita semua (Lihat Tabel 7).

Tabel 7, Data Kondisi Lembaga Dalam Hal Tindak KKN

Lembaga Negara dan Masyarakat	Penilaian Responden (%)					
	Sudah Bebas		Belum Bebas		Tidak Menjawab	
	2002	2004	2002	2004	2002	2004
1	2	3	4	5	6	7
DPR/DPRD	1,4	5,5	87,4	78,9	11,2	15,6
Anggota Kabinet	5,5	12,0	77,9	63,4	16,6	24,6
Kepolisian	4,4	6,0	81,5	81,4	14,1	12,6
Kejaksaan	2,4	6,2	83,3	73,4	14,4	20,4
Kahakiman	2,4	7,2	83,3	71,6	14,4	21,2
Lembaga Pendidikan	13,4	17,9	75,5	70,6	11,1	11,5
Lembaga Keagamaan	23,7	20,9	55,7	60,0	20,6	19,1
Instansi Pemda	4,2	8,2	81,1	75,2	14,7	16,6
Kecamatan/Kelurahan	12,5	14,1	78,8	73,6	8,7	12,3
Aparat RT/RW	48,7	39,7	46,0	50,8	5,3	9,5

Sumber: Litbang Kompas, 8/12/2004, responden 899, eror:±3,3%

Gambaran tentang pemberantasan KKN di lingkungan lembaga penegak hukum sendiri hingga bulan Desember 2004, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari hasil JP Kompas bulan Desember 2004, lingkungan Kepolisian menunjukkan angka yang paling tinggi. Dari 899 responden, yang menyatakan belum besar sebesar 48,1% disusul Kejaksaan dan Kehakiman. (lihat Tabel 8)

Tabel 8, Tindak Pelanggaran KKN di Lembaga-lembaga Penegak Hukum

Penegak Hukum	Penilaian Responden (%)					
	Sudah Bebas		Belum Bebas		Tidak Jawab	
	2002	2004	2002	2004	2002	2004
1	2	3	4	5	6	7
Kepolisian	27,9	40,5	61,2	48,1	10,8	11,4
Kejaksaan	22,6	40,4	64,2	43,2	13,2	16,4
Kehakiman	23,6	40,4	63,2	42,5	13,2	17,1

Sumber: Litbang Kompas, 8/12/2004, responden 899, eror:±3,3%

4. Faktor Penyebab Terjadi KKN

Mengetahui faktor yang menjadi penyebab KKN di Indonesia makin marak dan sangat sulit diberantas sangat penting untuk membantu mengobati ‘penyakit’ itu. Dari hasil JP Kompas, faktor moral yang lemah membuat benteng kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab jadi runtuh. Sebesar 35,1% dari 899 responden menjawab bahwa lemahnya moral menjadi penyebab terjadinya tindak KKN, kemudian disusul oleh faktor budaya (23,6%) serta kondisi sistem sanksi dan peraturan yang dapat membuat jera terhadap para pelanggar (20,8%). Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan pendidikan karakter bangsa ketiga penyebab ini harus menjadi titik utama sasaran. (lihat Tabel 9)

Tabel 9, Sumber Penyebab Tindak KKN

Penyebab	Dalam Persen (%)	Keterangan
1	2	3
1. Moral	35,1	N= 899 orang
2. Kebiasaan/budaya	23,6	Sampling error +/-3,3%
3. Sistem Sanksi dan Peraturan	20,8	
4. Dorongan Ekonomi	10,4	
5. Iming-iming Kekuasaan	0,7	
6. Tidak Tahu/Jawab	9,4	

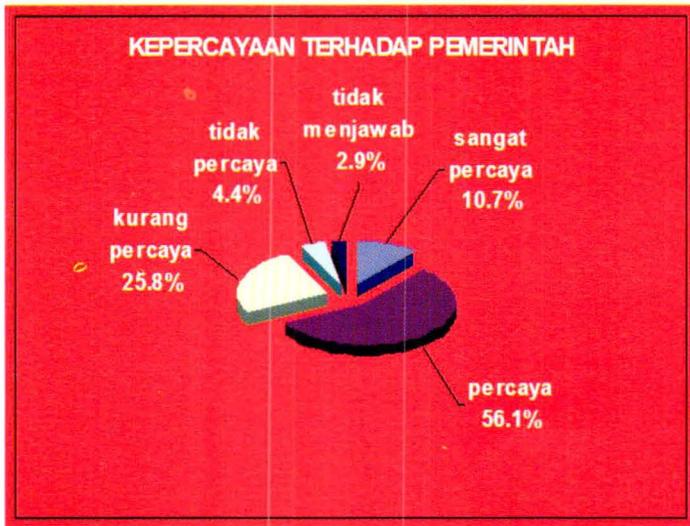
Sumber: Litbang Kompas, 8/12/2004, responden 899, eror:±3,3%

5. Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Sebagaimana telah digambarkan di atas, berdasarkan data yang ada hasil yang dicapai oleh birokrat pemerintah dalam menangani berbagai macam persoalan bangsa belum memuaskan. Akibatnya sering disebut bahwa rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah (birokrat). Tetapi berdasarkan hasil JP Kompas, tingkat kepercayaan atau harapan kepada pemerintah untuk dapat mengatasi krisis multidimensi itu masih cukup besar. Sebagian besar responden (56,1% menyatakan percaya kepada pemerintah dan bahkan 10,7% menyatakan sangat percaya. Sedangkan yang kurang percaya sebesar 25,8% dan 4,4% menyatakan tidak percaya. Kenyataan ini dapat dijadikan salah satu alasan tentang perlunya

perbaikan pola pikir briokrat agar masyarakat tambah yakin bahwa pemerintah mampu mengatasi berbagai masalah bangsa. (Lihat Data 10)

Data 10, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah



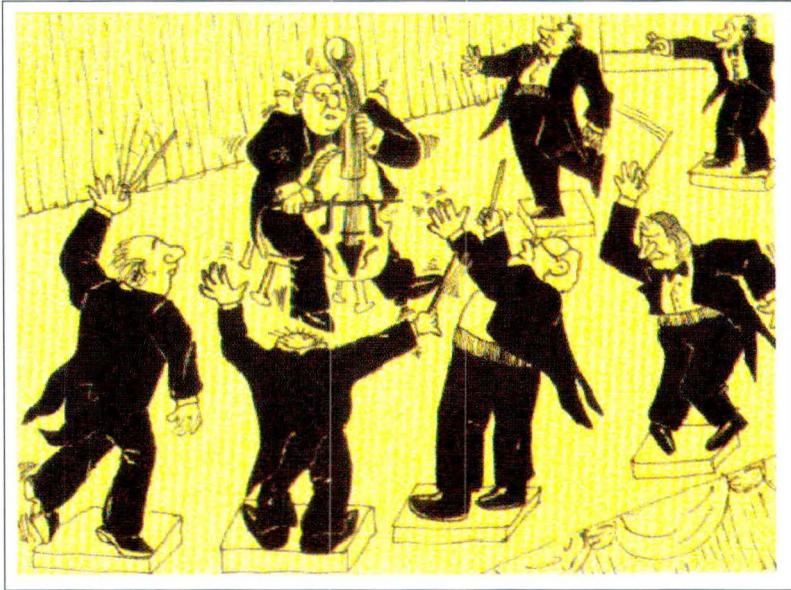
Dari uraian topik 1 dan 2 di atas yang didukung oleh beberapa data seperti di atas dapat diinterpretasikan bahwa kondisi karakter bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Masalah kerukunan antaretnik, antaragama, antarwilayah dan antarpendukung partai yang merupakan unsur paling utama dalam membangun keutuhan bangsa ternyata telah mengalami keretakan. Akibatnya, rasa

kebangsaan dan kebanggaan sebagai bangsa juga menjadi menurun. Demikian pula hanya dengan keadaan birokrasi di Indonesia yang menunjukkan tingkat pelayanan yang masih jauh dari memuaskan.

Dari keseluruhan hasil jajak pendapat yang dilaksanakan LIN dapat diinterpretasikan bahwa birokrasi pemerintah belum berhasil menangani masalah ancaman disintergrasi bangsa dengan baik. Demikian pula halnya dengan penyelesaian konflik yang berlatar belakang SARA, pemerintah belum berhasil mengatasinya. Sementara itu, pelaksanaan reformasi sebagai agenda penting juga belum mencapai sasaran, di samping upaya menegakkan demokrasi, penerapan hukum, pengusutan kasus korupsi belum dilaksanakan dengan baik.

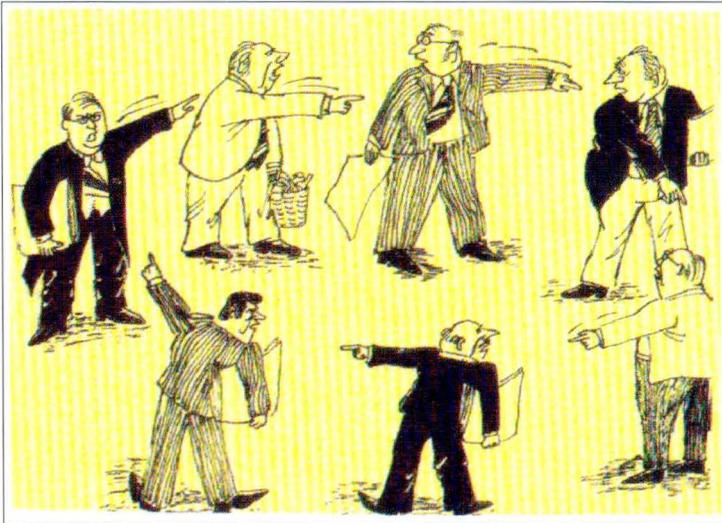
Potret buram kondisi bangsa Indonesia saat ini, barangkali tidak jauh berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh dua karikatur di bawah ini. Karikatur 1 menggambarkan banyak orang yang merasa mampu menjadi pemimpin. Mereka saling menunjukkan kelebihanannya, berebut memimpin (sebagai dirigen) permainan musik dan akibatnya pemain musik (rakyat) bingung pemimpin yang mana yang akan diikuti perintahnya. Padahal 6 orang dirigen dalam karikatur itu belum tentu memiliki kualifikasi sebagai dirigen yang sesungguhnya (*karikatur 1*).

Karikatur 1, Gambaran tentang semua ingin jadi dirigen (pemimpin)



Sementara itu dari karikatur 2 dikandung pesan yang menggambarkan kondisi bangsa yang pemimpinnya tidak mau bertanggung jawab bila terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan. Atau, untuk menunjukkan kehebatannya masing-masing saling menjelekan satu sama lain. Dalam karikatur praktek pemimpin bangsa seperti itu digambarkan dalam karikatur ada 7 orang pemimpin yang berganti-ganti saling menuding satu pada yang lain dan tidak ada stu pun yang mau mengakui kesalahan (*karikatur 2*)

Karikatur 2, Pemimpin saling menyalahkan dan tidak ada mau yang mengaku salah



I. Evaluasi

Jawablah pertanyaan dan perintah di bawah ini secara jelas dan ringkas dengan mengacu pada uraian di atas.

1. Mengapa terjadi perubahan pola-pikir (mindset) pada masyarakat bangsa Indonesia sehingga mendorong terjadinya reformasi?
2. Apakah 'konsep menjadi satu bangsa' dalam pola-pikir masyarakat Indonesia setelah setelah terjadi perubahan atau reformasi?

3. Mengapa kerukunan bangsa cenderung menjadi makin memburuk, kebanggaan sebagai bangsa menurun?
4. Apakah yang menjadi ukuran birokrasi pemerintah itu berhasil atau tidak berhasil?
5. Coba uraikan secara ringkas kondisi birokrasi pemerintah setelah 6 tahun reformasi!

Lampiran:

Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia

(Taufiq Ismail)

I

Ketika di Pekalongan, SMA kelas tiga
Ke Winconsin aku dapat beasiswa
Sembilan belas lima enam itulah tahunnya
Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia

Negeriku baru enam tahun terhormat diakui dunia
Terasa hebat merebut merdeka dari Belanda
Sahabatku sekelas, Thomas Stone namanya,
Whitefish Bay kampung asalnya
Kagum dia pada revolusi Indonesia

Dia mengarang tentang pertempuran Surabaya
Jelas Bung Tomo sebagai tokoh utama
Dan kecil-kecilan aku nara-sumbernya
Dadaku busung jadi anak Indonesia

Tom Stone akhirnya masuk West Point Academy
Dan mendapat Ph.D dari Rice University
Dia sudah pensiun perwira tinggi dari U.S. Army
Dulu dadaku tegap bila aku berdiri
Mengapa sering benat aku merunduk kini

II

Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Labuh Tun Razak,
Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan Ginza
Berjalan aku di Dam, Champs Élyses dan Mesopotamia
Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kaca mata

Dan kubenamkan topi baret di kepala
Malu aku jadi orang Indonesia

III

Di negeriku selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor
satu,

Di negeriku sekongkol bisnis dan birokrasi berterang-terang
curang susah dicari tandingan,

Di negeriku anak lelaki anak perempuan, kemenakan, sepupu
dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek secara
hancur-hancuran seujung kuku tak perlu malu,

Di negeriku komisi pembelian alat-lat berat, alat-alat ringan,
senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedele, terigu dan
peuyeum dipotong birokrasi lebih separuh masuk kantong
jas safari,

Di kedutaan besar anak presiden, anak menteri, anak jenderal,
anak sekjen dan anak dirjen dilayani seperti presiden,
menteri, jenderal, sekjen, dirjen sejati agar orangtua
mereka bersenang hati,

Di negeriku penghitungan suara pemilihan umum sangat-sangat-
sangat-sangat-sangat jelas penipuan besar-besaran
tanpa seujung rambut pun bersalah perasaan,

Di negeriku khotbah, surat kabar, majalah, buku dan sandiwara
yang opininya bersilang tak habis dan tak putus dilarang-
larang,

Di negeriku, dibakar pasar pedagang jelata supaya berdiri pusat
belanja modal raksasa,

Di negeriku Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah, ciumlah
harum aroma mereka punya jenazah, sekarang saja
sementara mereka kalah, kelak perencana dan
pembunuh itu di dasar neraka oleh satpam akhirat akan
diinjak dan dihunyah lumat-lumat,

Di negeriku keputusan pengadilan secara agak rahasia dan tidak
rahasia dapat ditawar dalam bentuk jual-beli, kabarnya
dengan sepotong SK suatu hari akan masuk Bursa Efek
Jakarta secara resmi,

Di negeriku rasa aman tak ada karena dua puluh pungutan, lima
belas ini-itu tekanan dan sepuluh macam ancaman,

Di negeriku telepon banyak disadap, mata-mata kelebihan kerja,
fotokopi gosip dan fitnah bertebat disebar-sebar,

Di negeriku sepakbola sudaj naik tingkat jadi pertunjukan teror
penonton antarkota Cuma karena sebagian sangat kecil
bangsa kita tak pernah bersedia menerima skor
pertandingan yang disetujui bersama,

Di negeriku rupanya sudah diputuskan kita tak terlibat Piala
Dunia demi keamanan antarbangsa, lagi pula Piala Dunia
itu Cuma urusan negara-negara kecil karena Cina, India,
Rusia dan kita tak turut serta, sehingga cukuplah
Indonesia jadi penintin lewat satelit saja,

Di negeriku ada pembunuhan, penculikan dan penyiksaan rakyat
terang-terangan di Aceh, Tanjung Priuk, Lampung, Haur
Koneng, Nipah, Santa Cruz, Irian dan Banyuwangi ada
pula pembantahan terang-terangan yang merupakan
dusta terang-terangan di bawah cahaya surya terang-
terangan, dan matahari tidak pernah dipanggil ke
pengadilan sebagai saksi terang-terangan,

Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada, tapi
dalam kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang
menyelam di tumpukan jerami selepas menuai padi.

IV

Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Labuh Tun Razak,
Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan Ginza
Berjalan aku di Dam, Champs Élyses dan Mesopotamia
Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kaca mata
Dan kubenamkan topi baret di kepala
Malu aku jadi orang Indonesia

1998

*If there is righteousness in the heart
There will be beauty in the character
If there is beauty in the character
There will be harmony in the home
If there harmony in the home
There will be order in the nation
If there order in the nation
There will be peace in the world*

Kalau ada kebenaran dalam hati
Akan terjadi keindahan dalam karakter
Kalau ada keindahan dalam karakter
Akan terjadi harmoni dalam keluarga
Kalau ada harmoni dalam keluarga
Akan terjadi keteraturan dalam bangsa
Kalau ada keteraturan dalam bangsa
Akan terjadi kedamaian dalam dunia

(dipetik dari Nasihat **Phillips** in **The Great Learning**: 2002)

BAB IV
TANTANGAN BANGSA DAN BIROKRAT KE
DEPAN

SUBMODUL 3

NUNUS SUPARDI
SUNARDI DWIDJOSOESTRO
HASANALWI

DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2004

A. Pendahuluan

Masyarakat masa depan Indonesia adalah masyarakat yang memiliki peradaban sebagaimana digambarkan sebagai sebuah masyarakat madani. Di Indonesia pengertian masyarakat madani sudah dikenal melalui forum-forum diskusi semenjak akhir 1980-an. Pada waktu itu para pendukung demokrasi mengeluhkan tentang menguatnya kekuatan militer dalam pemerintahan, sistem pemerintahan yang sentralistik, birokrasi yang tidak efisien, dan sistem perpolitikan yang tidak demokratis. Keinginan untuk menegakkan supremasi hukum dan pengadilan HAM juga merupakan indikator yang menguatkan keinginan untuk dilakukannya perubahan.

Istilah masyarakat madani untuk pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim yang waktu itu Deputy Perdana Menteri Malaysia, pada Festival Istiqlal II tahun 1995, terjemahan dari *civil society*. Sejalan dengan kuatnya keinginan untuk dilakukan perubahan di Indonesia, bentuk masyarakat madani pun semakin populer, dan kini menjadi konsensus sebagai tujuan dari perjuangan menuju Indonesia baru.

Pengertian istilah masyarakat madani ternyata berbeda-beda. Pada abad ke-16 yang lalu, istilah masyarakat madani dipakai untuk menyebut masyarakat yang menerapkan hukum dan hak-hak sipil. Pada saat itu di Eropa terjadi suatu perubahan peran dari masyarakat feodal ke masyarakat komersial. Dalam hal ini ada

perubahan peran kesatria yang memiliki keahlian berperang digantikan oleh pedagang yang tidak suka berperang serta peran masyarakat militer digantikan oleh masyarakat sipil.

Di Eropa semenjak abad ke-19 telah muncul dua varian dari konsep masyarakat madani yang saling berseberangan satu sama lain, yaitu konsep Hegel di satu sisi dan konsep Marx di sisi yang lain. Persoalan utama pertikaiannya adalah ihwal peran institusi negara. Dalam konsep Hegel, negara adalah penyelenggara nilai-nilai keadilan dan etik, sedangkan dalam konsep Marx, negara adalah alat eksploitasi dan resepsi yang harus dilenyapkan. Ketika Marxisme gagal melenyapkan negara-negara Eropa Timur serta Rusia, dan sebaliknya negara malah menjadi mesin penindas warganya, maka semenjak 1989 orang pun mempunyai pengertian tersendiri tentang apa sebenarnya masyarakat madani.

Semenjak tahun 1989 itu masyarakat madani banyak dipahami sebagai suatu masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi nonpe-merintah yang kuat untuk mengimbangi peran pemerintah atau negara. Dalam pemahaman ini masyarakat madani menjadi idaman bagi orang yang kecewa dengan negara sosialis. Masyarakat madani disamakan dengan demokrasi, pluralisme, dan masyarakat terbuka. Hegelian yang memuja negara dan Marxian yang menista negara pun ditolak, dan selanjutnya digantikan dengan masyarakat madani.

Masyarakat jenis itu kemudian memperoleh momentumnya ketika masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dengan

dibentuknya tim kenegaraan untuk merumuskan gagasan masyarakat madani. Masyarakat madani Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri karena dipengaruhi oleh perjalanan sejarah bangsa, kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, ideologi Negara Pancasila, serta nilai-nilai budaya bangsa yang telah telah dijadikan acuan dalam menata kehidupannya dari generasi ke generasi. Masyarakat Indonesia yang dicita-citakan itu sesuai dengan TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, memiliki ciri-ciri: (1) Religius; (2) Manusiawi; (3) Bersatu; (4) Demokratis; (5) Adil; (6) Sejahtera; (7) Maju; (8) Mandiri; (9) Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

B. Pokok Bahasan

Pokok bahasan dalam SUBMODUL 3 dititikberatkan pada:

- Topik 1: Bentuk masyarakat Indonesia masa depan, membahas tentang ciri-ciri masyarakat madani dan birokrat masa depan.
- Topik 2: Identifikasi Perubahan Pola Pikir, membahas masalah perubahan yang terjadi dalam sistem ilmu pengetahuan dan sistem budaya politik. Perubahan ini yang perlu disadari oleh para peserta karena akan menjadi landasan dalam membangun karakter bangsa.

C. Tujuan

1. Peserta mengetahui gambaran masyarakat bangsa dan birokrat masa depan serta memahami makna ciri-ciri masyarakat dan birokrat masa depan.
2. Peserta dapat mengaplikasikan berbagai ciri yang akan menjadi penanda karakter bangsa.

D. Metode

1. Ceramah
3. Diskusi (kelompok dan pleno)
2. Curah Pendapat
4. Permainan/Simulasi

E. Langkah

1. Fasilitator menjelaskan tentang metode pendidikan.
2. Fasilitator membuat pengantar sebagai pemanasan misalnya: pembacaan sajak, nyanyian, penayangan film, CD, VCD, gambar atau dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk curah pendapat mengenai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dengan pertanyaan: *“mau ke mana arah pembangunan karakter bangsa?”* dan *“apa peran birokrat dalam pembangunan karakter bangsa?”*
3. Fasilitator mengajak membahas masing-masing tantangan baik mengenai masalah bangsa maupun masalah birokrat.
4. Peserta membuat kesimpulan dan hasil diskusi.

F. **Waktu:** Waktu yang diperlukan: 4 x 45 menit

G. **Peralatan**

1. LCD/OHP
5. Double-tape (selotip bolak-balik)
2. Kertas (Flip Chart)
6. VCD/DVD
3. Kertas masterplan
7. Tape
4. Spidol
8. White Board

H. **Uraian Topik**

Uraian masing-masing topik adalah sebagai berikut.

Topik 1: Bentuk Masyarakat Indonesia dan Birokrat Masa Depan

1. Bentuk Masyarakat Indonesia

Gambaran tentang masyarakat Indonesia yang dicita-citakan telah dituangkan dalam suatu Ketetapan yaitu dalam TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, memiliki ciri-ciri: (1) Religius; (2) Manusiawi; (3) Bersatu; (4) Demokratis; (5) Adil; (6) Sejahtera; (7) Maju; (8) Mandiri; (9) Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Uraian dari masing-masing ciri adalah sebagai berikut.

a. Religius

Religiusitas dalam arti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan ciri Masyarakat Madani Indonesia. Masyarakat yang religius adalah masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai budaya yang luhur, terutama kejujuran dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian, sehingga melahirkan pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, jujur, sopan-santun taat pada agama, dan berperilaku saleh atau berbudi pekerti luhur.

Sikap religius berkaitan dengan hubungan vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan sikap berbudi luhur itu berkaitan dengan hubungan horisontal, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga melahirkan suatu sikap saling menghargai dan menghormati, rukun, hormat, dan suka menolong, dan tenggang rasa kepada sesama manusia. Sikap religius dan berbudi luhur merupakan ciri kebudayaan bangsa Indonesia dan menjadi acuan dalam kehidupannya.

b. Manusiawi

Sebagai makhluk hidup manusia memiliki nilai yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain, yakni nilai kemanusiaan. Nilai itu lahir berkat akal budi sehingga mampu

mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya, bahkan manusia mampu menguasai makhluk hidup yang lain. Tetapi dengan adanya akal budi, manusia dapat hidup bersama dalam tatanan yang teratur dan antara manusia yang satu saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu.

Demikian pula halnya dengan kehidupan manusia Indonesia, dapat hidup bersama karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu. Dalam kehidupan budaya Indonesia tidak dikenal adanya bentuk-bentuk penindasan, penistaan dan kesewenang-wenangan terhadap sesama manusia. Manusia memiliki kepribadian yang khas seperti berbudi pekerti luhur, tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai, toleran, santun, dan ramah.

c. Bersatu

Hidup dalam kesetaraan berarti hidup dalam kesamaan tingkatan, kedudukan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Kesetaraan mendorong seluruh anggota masyarakat mendapatkan pemenuhan kebutuhan (minimal) seperti kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan karir yang sama. Bangsa Indonesia memiliki pengalaman pahit di masa lalu prinsip kesetaraan diabaikan. Dalam masyarakat jajahan kedudukan dan tingkatan orang Eropa dibedakan dengan pribumi. Dalam masyarakat feodal ada perbedaan antara

bangsawan dengan orang kebanyakan dan antara priyayi dengan orang kecil.

Hidup dalam kebersamaan berarti hidup secara bersama-sama dalam kesatuan wilayah dan pemerintahan. Sikap hidup dalam kebersamaan sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia yang pluralistik untuk dapat mempermudah dalam menghadapi berbagai tantangan dari lingkungannya. Semangat hidup dalam kebersamaan yang kukuh, setelah mengalami pahitnya menjadi bangsa yang hidup dalam ketidaksetaraan ternyata berhasil membawa bangsa Indonesia keluar dari cengkeraman penjajah.

Pada dewasa ini nilai budaya kesetaraan cenderung makin jauh dari kenyataan sehingga secara tidak disengaja di masyarakat ber-kembang adanya tingkat dan kelas. Sementara itu hidup kebersamaan yang pernah tumbuh subur cenderung bergeser menjadi hidup individualistik. Keberadaan suku bangsa pada konstelasi politik pada dasarnya belum mendapatkan legitimasi dalam kebersamaan, sehingga warga suku bangsa yang ber-sangkutan sering harus mencari jalan ekstralegal untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Hal ini amat berpengaruh pada peneguhan rasa kebersamaan. Oleh karena itu dalam memasuki kehidupan Indonesia baru sikap hidup dalam kesetaraan dan kebersamaan perlu ditanamkan dan disosialisasikan secara sungguh-sungguh sehingga masyarakat dapat meng-hadapi berbagai tantangan dan hambatan secara kolektif.

d. Demokratis

Faham demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Rakyat, memiliki kedaulatan dan oleh karena itu konsep negara serba kuasa tidak tepat untuk masyarakat madani yang mengutamakan faham demokrasi. Di samping itu faham demokrasi mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kondisi masyarakat Indo-nesia bersifat majemuk, terdiri atas banyak suku, agama, lapisan, dan jenis pekerjaan yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda. Segala perbedaan itu perlu diupayakan agar dapat dicapai titik temu, sehingga perbedaan itu menjadi persamaan. Upaya dapat dicapai bila dihadapi dengan sikap demokratis.

Sikap demokratis perlu didampingkan dengan sikap toleran atau tenggang rasa. Dalam hal ini (pemimpin) negara wajib memahami kepentingan rakyatnya, dan sebaliknya (sebagian) rakyat tidak boleh memaksakan kehendak pada Negara, karena negara milik dari orang banyak. Demikian juga halnya dengan perbedaan yang terjadi di antargolongan dalam masyarakat, penyelesaiannya diperlukan adanya saling pengertian. Sulit dicapai kesepakatan bila seseorang atau golongan tertentu lebih mendahulukan kepentingan sendiri dan/ atau kelompoknya dengan menafikan kepentingan orang dan/ atau kelompok lain. Sikap demokratis dan toleran sebagai

bagian dari nilai budaya bangsa merupakan kunci untuk membangun saling menghormati dan memahami kepentingan masing-masing.

e. Adil

Dalam masyarakat Madani Indonesia keadilan dijunjung tinggi, yaitu dengan memperlakukan sama dalam berbagai hal kepada setiap orang. Prinsip hidup dalam keadilan itu tercermin dalam konsep berbangsa. Dalam masyarakat bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam dalam berbagai hal, tetapi tidak dikenal adanya golongan mayoritas dan minoritas, maju atau terbelakang, dan tinggi atau rendah. Meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya satu, dan masing-masing komponen bangsa berada dalam posisi yang setara. Keadilan juga tercermin pada bidang-bidang yang lain seperti dalam hal mendapatkan, pendidikan, perlindungan hukum, keamanan dan ketenteraman.

f. Sejahtera

Penerapan prinsip keadilan pada dasarnya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan lahiriah dapat dicapai bila masyarakat hidup dalam kemakmuran atau berkecukupan. Artinya, kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat keperluannya. Kesejahteraan

batiniah dapat dicapai bila masyarakat hidup dalam kepuasan atau kebahagiaan, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Prinsip hidup dalam keadilan dan kesejahteraan merupakan ciri dari masyarakat Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa dan menjadi acuan dalam kehidupannya.

g. Maju

Dalam kehidupan yang semakin mengglobal masing-masing bangsa berupaya meningkatkan kemampuan bangsa, sehingga dapat bekerja sama dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu diperlukan kehidupan lembaga pendidikan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional. Di samping itu perlu ditingkatkan kehidupan masyarakat yang memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi. Di samping itu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki anekaragam budaya.

h. Mandiri

Mandiri mengandung banyak arti, baik secara politis, ekonomis, sosial, maupun psikologis. Intinya, mandiri berarti dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung bantuan pada orang

lain. Mandiri secara politis adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan untuk kepentingan negara dan rakyat sendiri tanpa dikendalikan oleh negara dan kekuatan asing. Dalam konteks pemerintahan, mandiri diartikan sebagai pemberian kebebasan secara bertanggung jawab kepada masyarakat berinisiatif sendiri dalam segala hal. Pemerintah tidak banyak melakukan rekayasa terhadap masyarakat, tetapi hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator dan menyiapkan perangkat peraturan dan pedoman.

Kebebasan diberikan untuk dapat mandiri perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Artinya, dalam menerapkan konsep kemandirian itu anggota masyarakat tidak merugikan sesamanya, baik perorangan, kelompok, masyarakat luas, dan negara. Termasuk bertanggung jawab dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Prinsip hidup mandiri dan bertanggung jawab sebagai ciri budaya bangsa menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

2. Birokrat (Birokrasi) Masa Depan

Pemerintahan negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh penyelenggara negara yang baik dan bersih. Di kalangan dunia internasional dewasa ini Indonesia mendapatkan predikat buruk dalam penyelenggaraan Negara, karena KKN yang

terjadi di kalangan pemerintahan menempatkan Indonesia sebagai negara lain yang pemerintahannya termasuk kategori terkorup di dunia. Sebagaimana pernah dikatakan Bung Hatta, korupsi *“korupsi di Indonesia telah membudaya”*. Selain itu dari luar kalangan birokrasi muncul ungkapan *“korupsi di pemerintahan telah terstruktur”*.

Untuk menuju ke arah pemerintahan yang baik dan bersih (***good governance***) perlu ditanamkan sikap hidup teratur dan tertib. Teratur, artinya segala sesuatu sudah diatur baik-baik agar menjadi rapi. Dalam pengaturan agar segala sesuatu itu menjadi baik, rapi, beres dan lancar diperlukan berbagai perangkat peraturan, tanda-tanda, pedoman, dan petunjuk. Di samping itu juga harus tertib dalam arti disiplin mengikuti aturan sehingga segala sesuatu itu menjadi baik, rapi, beres dan lancar. Penyelenggaraan Negara disebut tertib bila dalam diri setiap penyelenggara Negara memiliki kesadaran untuk disiplin mematuhi segala aturan. Disiplin harus dimulai dari dalam diri masing-masing orang. Dalam tertib berlalu lintas misalnya, orang akan mematuhi segala tanda lalu lintas meskipun tanpa ada polisi atau mungkin tanpa rambu-rambu. Penyelenggaraan suatu negara dapat dikatakan tertib apabila para penyelenggaranya mematuhi segala aturan, serta dapat mengatur dan mengawasi dirinya sendiri.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih telah ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 28 tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di dalam UU ini digariskan nilai-

nilai atau asas-asas yang akan melandasi pelaksanaan pemerintah yang bersih. Asas-asas itu adalah:

1. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu mengutamakan landasan yuridis diikuti dengan kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yakni mengutamakan keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan negara.
3. **Asas Kepentingan Umum**, yaitu asa yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.
5. **Asas Proporsionalitas**, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Asas Akuntabilitas**, adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Demikianlah gambaran tentang wujud masyarakat bangsa Indonesia dan birokrat (birokrasi) Indonesia masa depan. Antara keduanya saling memiliki kepentingan, dan keduanya saling

mendukung. Kesempurnaan kondisi birokrasi akan membantu peningkatan kualitas karakter dan pekerti bangsa, dan sebaliknya makin membaiknya kualitas karakter dan pekerti bangsa akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good goverment* dan *clean goverment*).

Topik 2: Identifikasi Perubahan Pola-pikir

Dalam perkembangan terakhir menunjukkan adanya kecenderungan terjadi pergeseran pola pikir sikap masyarakat terhadap munculnya berbagai fenomena baru baik yang terjadi karena dorongan dari dalam (internal) maupun pengaruh dari luar (eksternal) Untuk dapat menghadapi tantangan itu diperlukan perubahan kebudayaan yang sistemik dan terencana, tanpa mengabaikan unsur-unsur sensitivitas dan subyektivitas bidang kebudayaan sebagai perwujudan usaha individu dan kolektif. Perubahan dari sistem nilai budaya yang telah berlaku ke sistem baru itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu (1) perubahan sistem pengetahuan; dan (2) perubahan budaya politik.¹

1. Perubahan Sistem Pengetahuan

Perubahan sistem pengetahuan merupakan salah satu perwujudan dari perubahan kebudayaan. Subjek perubahan sistem

¹ Visi, Misi dan Strategi Kebudayaan Nasional Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2003.

pengetahuan itu adalah pribadi, kelompok, dan masyarakat. Akan tetapi, pada hitungan terakhir, pribadilah yang merasakan manis-pahitnya perubahan serta menanggung semua akibatnya. Oleh karena itu, apapun juga sistem sosial politiknya, kebahagiaan pribadi itulah yang harus diutamakan.

Bangsa Indonesia tidak perlu mengulang kesalahan masa lalu, yakni ketika lebih mementingkan unit sosial daripada unit pribadi. Adapun perubahan sistem pengetahuan yang diperlukan untuk pribadi, kelompok, dan masyarakat ialah sbb: (1) dari egosentrisme ke sivilitas (*civility*), (2) dari pengabaian hukum ke kesadaran hukum, (3) dari fanatisme ke toleransi, (4) dari cukup-diri (*self-sufficiency*) ke saling bergantung (*interdependence*), dan (5) dari sejarah yang alamiah ke sejarah yang manusiawi.

a. Dari Egosentrisme ke Sivilitas

Sikap egosentrisme merupakan bentuk perilaku yang menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat pemikiran, perbuatan dan juga menilai segala-nya berdasarkan sudut pandang dirinya sendiri. Sementara itu, sikap sivilitas merupakan bentuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai peradaban dan menempatkan orang lain yang diutamakan. Pengaruh egosentrisme dalam perilaku sehari-hari tampak dalam banyak hal. Keengganan orang untuk antri di depan loket pertunjukan, perjalanan, serta urusan bisnis di perkantoran seperti kantor pos, kantor polisi, kantor agraria, dsb, merupakan gejala ego-sentrisme. Demikian

pula perilaku berkendara di jalan raya, “jalan pintas” ke arah sukses di sekolah, birokrasi dan bisnis, serta upeti-upeti untuk melancarkan urusan.

Sikap egosentris di kalangan hukum dalam berbagai bentuk seperti pengakuan palsu, pemutarbalikan fakta dan pemalsuan dokumen, serta keputusan yang tidak adil menjadi hal biasa. Demikian pula halnya dengan kasus-kasus suap kepada jaksa, dan hakim. Kasus-kasus perkosaan sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita difonis dengan hukuman yang ringan mencerminkan masih kuatnya egosentrisme laki-laki.

Egosentrisme menjadi masalah sosial apabila sudah meningkat menjadi egosentrisme kelompok. Perlakuan tidak manusiawi penduduk terhadap orang yang dicurigai sebagai dukun santet misalnya, juga bermula dari egosentrisme pribadi yang berakumulasi menjadi egosentrisme kelompok. Pedagang asongan yang mengamuk di terminal, petambak yang merusak tambak gara-gara berselisih dengan pemilik, pekebun plasma yang merusak kebun coklat, dsb, adalah contoh lain. Tawuran antarpelajar, tawuran antarsuporter, holidanisme suporter sepak bola, perang antargeng, pengadilan massa, kriminalitas, dan perilaku tidak menyenangkan lainnya merupakan contoh yang lain lagi. Demo-demo juga banyak yang muncul disebabkan oleh kuatnya egosentrisme kelompok.

Perilaku demikian itu sangat merugikan bagi pembentukan manusia Indonesia yang berbudaya dan beradab. Perilaku kehidupan masyarakat perlu diarahkan ke perilaku yang sivilitas, yang dalam perilaku kehidupannya yang mengandung perilaku beradab (*the state of being civilized*). Proses membangun masyarakat yang berperadaban sangat kompleks dan perlu waktu yang lama. Harus diakui bahwa tidak semua gejala egosentrisme dapat hilang dengan adanya sivilitas, tetapi upaya untuk meminimalkan perilaku negatif itu perlu terus dibiasakan.

b. Dari Pengabaian Hukum ke Kesadaran Hukum

Reformasi yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Tetapi ketika reformasi mulai dikumandangkan berbagai kasus yang terjadi di banyak tempat justru menunjukkan fakta sebaliknya. Kasus yang terjadi seperti di Jakarta dan Solo dan beberapa tempat lainnya mencerminkan bahwa “kekuasaan” rakyat telah diimplementasi dalam berbagai tindak kekerasan, tidak lagi mengindahkan hukum yang berlaku.

Selain kerugian yang bersifat fisik, tidak sedikit sendi-sendi kehidupan yang bersifat non-fisik menjadi rusak dan lebih sulit memperbaikinya dibandingkan dengan kerusakan yang bersifat fisik. Kasus yang terjadi di kota Solo dapat dijadikan sebuah contoh. Kota Solo yang dikenal sebagai kota yang

berbudaya tinggi (*adiluhung*) harus mengalami kerugian yang tak ternilai dari sisi budaya. Predikat sebagai kota berbudaya tinggi terbukti bukan jaminan untuk tidak mengenal kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum. Mungkin ada faktor lain yang memicu terjadinya peristiwa itu. Faktor-faktor seperti tiadanya lagi otoritas yang disegani, tersedianya lapisan “proletariat” kota yang merasa “tidak akan kehilangan apa-apa” dalam kerusuhan, serta sifat radikal yang selama ini dapat “disimpan” dengan rapat, muncul menjadi potensi yang sulit untuk dipadamkan. Fakta menunjukkan keadiluhungan budaya itu tidak mampu untuk meredam terjadinya peristiwa yang secara nyata mengabaikan keberadaan perangkat hukum.

Peristiwa seperti di atas juga terjadi di beberapa tempat lain. Kasus-kasus seperti pencurian kayu, penyerobotan tanah, dan pendaulatan para pejabat oleh warga dan masih banyak contoh yang lain menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan lagi keberadaan hukum. Kenyataan seperti ini cenderung tidak berkurang tetapi malahan makin meningkat. Dalam kehidupan masyarakat madani, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian karena hukum ditaati dan sanksi terhadap pelanggaran diberikan secara adil. Oleh karena itu pandangan masyarakat yang cenderung mengabaikan penegakan hukum harus segera dialihkan ke arah tumbuhnya kesadaran hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat madani dapat terwujud. Kepada para penegak hukum yang melanggar

harus dikenakan sanksi hukum seperti halnya pelanggar hukum yang lain.

c. Dari Fanatisme ke Toleransi

Fanatisme adalah keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. Bila keyakinan itu tumbuh secara wajar, maka akan menghasilkan sikap fanatik yang positif. Tetapi bila sikap fanatisme itu tumbuh menjadi teramat kuat, akan menumbuhkan sikap fanatisme yang sempit, dan cenderung menjadi negatif karena akan menumpulkan sikap toleransi. Penyakit fanatisme biasanya disandang oleh mereka yang merasa mempunyai satu macam ideologi. Dalam pemerintahan yang menganut satu macam ideologi yang diyakini benar, masyarakat akan menafikan ideologi yang tidak sefaham sehingga pemerintahan itu akan menghasilkan masyarakat yang memiliki fanatisme sempit. Kasus-kasus yang terjadi pada setiap kampanye Pemilu di Indonesia menunjukkan fanatisme yang berlebihan terhadap suatu partai politik tertentu. Sikap fanatisme yang berlebihan akan mendorong timbulnya sikap antipati pada partai politik yang lain, sehingga terjadi bentrok antara para pendukungnya. Di samping berkembang di kalangan partai politik, sikap fanatisme dapat saja berkembang di kalangan suku bangsa, agama, bahasa atau lembaga/organisasi masa yang lain. Dalam penerapan otonomi daerah, sikap fanatisme kedae-rahan

dengan lebih mengutamakan pemanfaatan SDM yang berasal dari daerah tertentu saja.

Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat madani Indonesia, sikap fanatisme perlu digeser ke arah terbentuknya masyarakat yang penuh dengan sikap toleransi. Dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya hidup masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sikap fanatisme yang sempit akan mengganggu ketenteraman hidup dalam kebersamaan.

d. Dari Cukup Diri ke Saling Kebergantungan

Sikap cukup diri dalam arti merasa dapat menyelesaikan tugas atau masalah tanpa bergantung pada kerja sama dengan pihak lain, sangat merugikan dalam hidup kebersamaan. Di Indonesia, berlakunya sikap cukup diri cenderung makin berkembang. Dalam setiap kampanye pada beberapa kali Pemilu yang lalu, mengesankan bahwa setiap partai politik seolah-olah dapat hidup sendiri untuk memerintah negara tanpa memerlukan kerja sama dengan partai yang lain. Bila benar ada satu partai saja yang dominan dan cukup diri untuk memerintah negara, dapat dipastikan pemerintahan itu akan berlangsung dalam suasana kediktatoran, tanpa ada kritik dan pengawasan yang akan meluruskan bila terjadi kekeliruan.

Merasa paling cukup diri juga dapat ditemukan di kalangan dunia usaha. Para pekerja atau buruh seolah-olah dapat hidup sendiri tanpa kerja sama saling membutuhkan dengan pengusaha. Pelanggan merasa dapat hidup sendiri tanpa pedagang, buruh tani tanpa pemilik tanah, petambak dapat hidup sendiri tanpa tambak dan pengusaha tambak, dst. Sebaliknya dapat juga terjadi, pengusaha merasa dapat hidup sendiri tanpa buruh, pedagang tanpa pelanggan, pemilik tanah dapat hidup sendiri tanpa petani, pemilik tambak dapat hidup sendiri tanpa petambak, dan sebagainya.

Gejala seolah-olah dapat cukup sendiri seperti itu juga tampak pada kelompok-kelompok etnis tanpa melihat realitas bahwa proses menjadi satu bangsa adalah suatu proses sejarah yang panjang. Keberadaan suku bangsa sangat bergantung pada keberadaan bangsa, dan sebaliknya. Munculnya gejala separatisme di berbagai daerah karena menemukan momentum ketika rakyat mendapatkan eforia sosial dan eforia politis, juga tidak terlepas dari gejala seolah-olah dapat hidup sendiri, juga karena didorong oleh arogansi cukup diri.

Sikap masyarakat yang demikian itu harus diganti karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang hidup saling membantu, saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Dalam kehidupan Indonesia baru dalam sebuah masyarakat madani yang majemuk tuntutan untuk hidup saling bergantung tidak dapat dihindari.

e. Dari Kehidupan yang Alamiah ke Kehidupan yang Manusiawi

Di dalam kehidupan yang bersifat alamiah yang berlaku adalah hukum rimba; *survival of the fittest*, yang besar menang atas yang kecil, yang kuat menang atas yang lemah, dan yang banyak menang atas yang sedikit. Konsep kehidupan yang alamiah semacam itu telah meracuni benak manusia di dunia ini, seolah-olah tidak ada ketentuan dan/atau institusi yang manusiawi yang bisa mengubahnya.

Dalam filosofi bangsa Indonesia sudah sangat jelas, seperti yang tercantum dalam Pancasila yang menyebutkan tentang perubahan dari kehidupan yang alamiah ke kehidupan yang manusiawi, yaitu Sila ke-2 yang berbunyi: "*kemanusiaan yang adil dan beradab*." Di samping itu dalam UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa sistem ekonomi dilaksanakan secara kekeluargaan dan ketentuan tentang fakir miskin yang dipelihara oleh negara.

Praktek kenegaraan selama ini dengan berdirinya Puskesmas, Posyandu, Bulog-Dolog, Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Presiden (Banpres), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dan berbagai skema kredit bagi rakyat kecil sudah mengarah ke pola kehidupan yang manusiawi. Pola kehidupan seperti itu harus lebih dikongkritkan lagi dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia, dalam masyarakat madani diperlukan terwujudnya keadilan untuk semua pihak, yang meliputi keadilan

distributif (*distributive justice*), keadilan produktif (*productive justice*), dan keadilan komutatif (*commutative justice*).

Keadilan distributif merupakan keadilan bagi seluruh warga negara termasuk di dalamnya kaum fakir miskin, anak yatim piatu, dan kaum jompo untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Keadilan produktif merupakan keadilan bagi para pemilik modal, pemilik tanah, dan pemilik tenaga kerja yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara itu keadilan komutatif merupakan keadilan bagi mereka yang terlibat dalam pertukaran barang dan jasa. Khusus mengenai jenis keadilan yang terakhir, dalam prakteknya selalu ada kesenjangan antara produk pertanian dengan produk manufaktur, produk barang dengan produk jasa, dan antara produk impor dengan produk dalam negeri.

2. Perubahan Budaya Politik

Budaya dan politik memiliki kaitan yang erat. Politik merupakan salah satu perwujudan dari kebudayaan. Perilaku politik manusia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian perilaku politik tidak selalu hanya menonjolkan rasionalitas, perhitungan ekonomis dan nilai-nilai pragmatisme, tetapi juga nilai-nilai budaya bangsa seperti nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah, adat, lingkungan, dan kekuasaan yang ada atau yang pernah ada.

Perubahan budaya politik terjadi karena adanya pergeseran pola pikir dari suatu bentuk penerapan sistem nilai budaya lama ke bentuk yang lain (baru). Perubahan mendasar itu menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) dari kawula ke warga negara, (2) dari parokial ke kenegaraan, (3) dari negara penguasa ke negara pengelola, (4) dari Pancasila sebagai ideologi ke Pancasila sebagai ideologi dan ilmu, dan (5) dari ideologi Pancasila yang inkoheren ke ideologi Pancasila yang koheren.

a. Dari Kawula ke Warga Negara

Status kawula adalah hamba sahaya, abdi, rakyat atau orang-orang yang di bawah perintah dari suatu negara. Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, budaya politik kawula (*subject political culture*), sudah terbiasa, kecuali untuk beberapa tahun ketika berlangsung budaya politik “demokrasi liberal.” Status kawula dikenal sejak masa pemerintahan berbentuk kerajaan. Ketika bangsa asing menjajah Indonesia status itu makin melembaga. Pada masa penjajahan Belanda istilah “*inlander*” memiliki makna yang sama dengan kawula. Kawula bukan hannya berlaku bagi hamba sahaya yang membantu jalannya pemerintahan, tetapi dikenakan bagi mereka yang berada di daerah pinggiran.

Sementara itu status raja berada jauh di atas kawula. Raja dianggap memiliki *wahyu* (hak memerintah) dan *pulung* (legitimasi). Bahkan posisi raja yang dianggap sebagai wakil

Tuhan. Kata-kata raja adalah perintah yang tidak terbantah dan tidak boleh didiskusikan. Dalam keadaan seperti itu posisi rakyat adalah sebagai *kawula* yang harus senantiasa patuh kepada pemimpinnya tanpa memiliki hak politik untuk ikut menentukan nasib negara dan bangsanya, bahkan nasib dirinya sendiri.

Setelah bentuk pemerintahan negara mengalami perubahan dari sistem kerajaan ke sistem pemerintahan negara modern yang demokratis, kedu-dukan negara dan presiden cenderung dianggap sama dengan kedudukan kerajaan dan raja. Pandangan seperti ini harus diubah menjadi rakyat yang memiliki hak politik untuk menentukan nasib dirinya sendiri serta negara dan bangsanya. Bahwa rakyat harus patuh kepada pemimpin hal itu memang perlu dilakukan akan tetapi kepatuhannya lebih didasarkan kepada keputusan bersama dan bukan didasarkan kepada rasa takut kepada pemimpinnya.

Budaya politik kawula seperti di atas tidak mungkin disuburkan dalam struktur dan sistem masyarakat baru yang demokratis. Budaya politik kawula harus digantikan dengan budaya politik warga negara (*participant political culture*) dimana rakyat dapat berperan sebagai warga negara yang sadar akan hak-haknya, dan bukan hanya sadar akan kewajiban-kewajibannya. Rakyat mendapatkan peluang untuk aktif berpartisipasi dalam politik riil.

b. Dari Parokial ke Kenegaraan

Parokialisme yakni pandangan politik yang sempit yang dapat timbul karena adanya pandangan sempit kedaerahan. Parokialisme merupakan aki-bat dari banyak hal; antara lain adanya kesamaan ras, etnis, suku, agama, dan bahasa yang semuanya itu terkombinasi dengan berkembangnya pandangan yang sempit. Kecenderungan ke arah disintegrasi bangsa yang pernah dan masih terjadi di Indonesia banyak disebabkan oleh parokialisme itu. Terjadinya pergolakan di berbagai daerah di Indonesia disebabkan oleh salah satu ketidaksamaan ciri dalam budaya politik parokial di samping karena diabaikannya faktor ekonomi dan politis. Bentuk dari parokialisme seperti ini bila tidak mendapatkan perhatian akan dapat mengancam keutuhan negara.

Bentuk-bentuk lain yang dekat parokialisme adalah sektarianisme, primordialisme, komunalisme, dan rasialisme. Sektarianisme adalah paham yang mengutamakan sekte keagamaan di dalam agama tertentu. Primordialisme adalah paham yang mengutamakan kelompok sosial tertentu berdasarkan daerah asal. Komunalisme adalah paham yang mengutamakan kepentingan kelompok sosial tertentu, sedangkan rasialisme ialah paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul.

Sebab-sebab berkembangnya faham kebangsaan yang menyempit tersebut karena kurangnya apresiasi pada sejarah

lahirnya bangsa Indonesia. Orang Melayu dan Cina sama-sama pendatang, hanya waktunya yang berbeda. Demikian juga halnya dengan masalah agama; Hindu, Budha, Islam, Katolik, Protestan, dsb, masuk ke wilayah Indonesia dalam waktu, sebab, dan penyebaran berbeda-beda. Kenyataan sejarah itu tidak banyak disadari oleh manusia Indonesia dewasa ini, sehingga memungkinkan berkembangnya faham parokialisme. Oleh karena itu faham ini harus diarahkan agar bergeser menjadi faham negara-bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara-bangsa yang lahir karena adanya kesepakatan semua suku bangsa yang berbeda-beda wilayah tinggal, budaya, agama dan bahasanya, maka kesepakatan itu harus dapat dipertahankan.

c. Dari Negara Penguasa ke Negara Pengelola

Selama ini bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan system pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa yang ditiru dari system pemerintahan kerajaan. Di kerajaan patrimonial maka pemimpin negara dapat membagi-bagi kemakmuran, kekuasaan dan kehormatan dan rakyat menjadi penerima saja. Keadaan seperti ini masih berlangsung sampai sekarang; misalnya pembagian kemakmuran dapat dilihat dari adanya “pembagian” lisensi, monopoli, Hak Pengelolaan Hutan (HPH), kontrak karya, dsb. Pembagian kekuasaan dapat dilihat dari adanya “pembagian” kursi gubernur, bupati, wali kota, camat, dsb, sedangkan pembagian kehormatan dapat dilihat dari

“pembagian” bintang, anugerah, tanda jasa, dan sebagainya. Dari ketiga hal itu yang secara langsung mempunyai implikasi ekonomis, sosial, dan politik adalah pembagian kemakmuran.

Konsep negara penguasa tidak berlaku dalam masyarakat madani dan oleh karena itu harus diganti dengan konsep negara pengelola. Dalam sistem negara pengelola, peran dari negara atau pemerintah lebih dititikberatkan untuk bertindak sebagai fasilitator, dinamisator, koordinator di samping melakukan penjagaan atas keutuhan negara-bangsa. Dalam konsep ini lembaga swasta dan organisasi masyarakat diberikan peluang yang luas untuk menjadi mitra dalam berbagai peran yang sebelumnya dikerjakan sepenuhnya oleh negara.

d. Dari Pancasila sebagai Ideologi ke Pancasila sebagai Idiologi, Ilmu dan Falsafah Hidup

Perdebatan teoritis tentang hubungan antara ideologi dengan ilmu sangat sering terjadi, khususnya mengenai epistemologinya. Di akhir tahun 1960-an banyak pemikir menyatakan bahwa ideologi tidak lagi relevan untuk masyarakat industrial. Di kalangan masyarakat Barat semenjak akhir tahun 1970-an masalah ideologi ini sudah diperdebatkan, dan baru pada tahun 1989 perdebatan itu berakhir dalam arti ideologi dianggap tidak lagi sesuai dengan masyarakat Barat. Dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kita dapat mengetahui bagaimana ideologi dan ilmu dalam praktek kenegaraan.

Semenjak negara ini berdiri banyak ilmuwan, khususnya dari ilmu ekonomi yang direkrut oleh penguasa untuk masuk dalam lingkaran politik. Pimpinan negara pernah melakukan deideologisasi, yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dalam pengambilan keputusan tentang posisi itu secara langsung maupun tidak langsung melibatkan para ilmuwan yang ada dalam struktur birokrasi. Seorang presiden pernah merekrut pembantu-pembantunya dari kalangan ilmuwan dan/atau teknokrat, sedangkan presiden yang lain mengangkat pembantu-pembantunya dari kalangan partai.

Dari gambaran tersebut menunjukkan tentang adanya keterlibatan para ilmuwan di dalam pengambilan keputusan politik pemerintahan, dan hal menunjukkan adanya kesadaran tentang penempatan ilmu di atas ideologi. Penerapan ideologisasi secara “mati” ternyata tidak memberikan jalan keluar, dan oleh karena itu kemudian berpaling pada ilmu, karena ilmu yang bersifat objektif, toleran, dan terbuka. Dengan sifat-sifat itu, ilmu mampu memberikan jalan keluar yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

Berdasarkan pada pengalaman di atas, maka penempatan Pancasila sebagai suatu ideologi semata-mata (“*mati*”) dapat merugikan posisi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Di dalam praktek penerapannya ideologi Pancasila akan menjadi subjektif, fanatis dan tertutup. Dalam memasuki kehidupan Indonesia baru sudah selayaknya

Pancasila diposisikan sebagai ilmu, di samping juga tetap sebagai ideologi. Dalam posisinya sebagai ilmu dimungkinkan terjadinya pengembangan interpretasi dan implementasi dan dengan demikian Pancasila memiliki sifat terbuka.

e. Dari Ideologi Pancasila yang Inkoheren ke Ideologi Pancasila yang Koheren

Pada masa yang lalu ada kesan telah terjadi inkoherensi dalam menginterpretasi dan mengimplementasi Pancasila dalam kehidupan nyata. Sekarang masalahnya ialah bagaimana membuat Pancasila agar supaya lebih koheren? Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas ada dua transformasi kultural untuk mencapai kekohesifan (*cohesibility*), masing-masing menyangkut interpretasi dan implementasi. Dalam hal interpretasi, Pancasila yang semula diinterpretasi secara parsial harus diinterpretasi sebagai suatu gagasan yang utuh. Pancasila itu merupakan satu kesatuan (*unity*). Dalam hal implementasi, perlu ada upaya nyata untuk menjadikan sila-sila Pancasila dari yang semula hanya mengurus persoalan personal seperti menjadikan manusia yang memiliki kesalehan personal menjadi Pancasila yang juga mengurus masalah publik (*publicness*) seperti menjadikan masyarakat yang memiliki kesalehan sosial.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan mengacu pada uraian di atas:

1. Uraikan, apakah yang dimaksud dengan masyarakat madani?
2. Apakah isi TAP MPR VII/MPR/2000, dan uraikan masing-masing ciri!
3. Apakah yang dimaksud dengan 'good government'?
4. Seperti apa ciri-ciri birokrasi masa depan?
5. Uraikan masing-masing asas yang harus dipatuhi dalam menuju birokrasi yang baik dan bersih!
6. Mengapa diperlukan perubahan sistem ilmu pengetahuan dan apa isinya?
7. Mengapa diperlukan perubahan sistem budaya politik, dan apa isinya?

“Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam”.

(Prof. Dr. Daoed Joesoef: 1978)

BAB V
NILAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER
BANGSA

SUBMODUL 4

NUNUS SUPARDI
SUNARDI DWIDJOSOESTRO
HASANALWI

DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2004

A. Pendahuluan

Dalam buku karya Soemarno Soedarsono **“Character Building Membentuk Watak”** (2002) disebutkan adanya enam hal yang perlu mendapat perhatian dalam membentuk karakter bangsa, yaitu: (1) Kejujuran; (2) Keterbukaan; (3) Keberanian mengambil risiko; (4) Bertanggung jawab; (5) Memenuhi komitmen; (6) Kemampuan berbagi (**sharing**). Sementara itu, menurut James Kouzes and Barry Posner dalam bukunya **“Credibility”** (1993) disebutkan adanya empat aspek yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu (1) Kejujuran (**honesty**); (2) Orientasi ke depan (**future orientation**); (3) Penginspirasi (**inspiring**); dan (4) Kompetensi (**competence**).

Selain itu, dalam banyak sumber menyebutkan tentang nilai-nilai budaya yang menjadi dasar pembentukan karakter. Sumber utama adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila yang digali dari sistem nilai budaya yang terkandung dalam kebudayaan bangsa sudah dengan sendirinya menggambarkan cita-cita karakter sebuah bangsa. Lima sila dalam Pancasila pada hakikatnya adalah lima karakter yang menyatu dalam diri bangsa Indonesia, yaitu manusia yang: ber-**‘Ketuhanan Yang Maha Esa’**; ber-**‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’**; bersatu dalam **‘Persatuan Indonesia’**; berdemokrasi dalam **‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’**; dan ker-**‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’**. Dari lima itu menurut bahan Penataran Penghayatan

dan Pengamalan Pancasila (P4) telah dirinci menjadi 34 unsur nilai. Selanjutnya juga dapat mencari dari sumber dalam TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, dan dalam Buku Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur. Dalam buku terakhir ini disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang membagi sifat budi luhur ke dalam 56 buah sifat yang membentuk karakter seseorang.

Dari sekian banyak pendapat itu dapat kita lihat adanya kesamaan unsur-unsur yang terdapat dalam ciri karakter bangsa. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan bangsa Indonesia yang telah tumbuh sejak berabad-abad yang lalu, memiliki nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan latar belakang sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai dasar itu dipelihara dan dipertahankan sebagai perwujudan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dapat diidentifikasi sejumlah nilai yang disebut sebagai nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Kemerdekaan
2. Kemanusiaan
3. Keadilan
4. Kemajemukan
5. Kebangsaan
6. Integritas
7. Demokrasi

8. Kemandirian
9. Religiusitas
10. Keseimbangan
11. Kebersamaan
12. Kesetaraan

Keduabelas sistem nilai dasar inilah yang perlu dikembangkan di lingkungan masyarakat bangsa, khususnya di lingkungan birokrat dalam rangka pendidikan karakter dan memperkukuh jati diri bangsa.

B. Pokok Bahasan

Pokok bahasan dalam SUBMODUL 4 dititikberatkan pada bentuk masyarakat Indonesia masa depan, membahas tentang ciri-ciri masyarakat madani dan birokrat masa depan.

C. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dilihat dari sudut aspek psikologis adalah sebagai berikut:

1. Secara kognitif:

- a. Meningkatkan wawasan dan kesadaran mengenai kehidupan multietnik dan multikultur: (1) keberagaman karena perbedaan aspek ekonomi, sosial, agama, suku, bahasa, kesenian, adat istiadat, dll.; (2) potensi untuk

terjadinya konflik; dan (3) tentang kiat-kiat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, tenggang rasa, saling menghargai dan hidup bersama dalam perbedaan.

- b. Meningkatkan wawasan dan kesadaran mengenai kehidupan demokrasi, kesetaraan dan partisipasi.
- c. Meningkatkan wawasan dan kesadaran hidup secara gotong royong dan pemberian pelayanan terhadap sesama.

2. Secara sikap/spiritual/afektif:

- a. Meningkatkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain
- c. Meningkatkan kesediaan melayani/membantu orang lain
- d. Meningkatkan kesediaan menghargai/menghormati perbedaan
- e. Meningkatkan kesediaan untuk bersikap setara dengan orang lain
- f. Meningkatkan rasa percaya diri dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
- g. Meningkatkan rasa memiliki
- h. Meningkatkan kesediaan kesediaan bekerja sama
- i. Meningkatkan keberanian berkompetisi

3. Secara perilaku:

- a. Kemampuan problem solving (mampu mengatasi masalah secara cepat, tepat dan akurat.
- b. Kemampuan menentukan skala prioritas yang berorientasi pada kepentingan publik.
- c. Kemampuan melakukan koordinasi, menganalisis masalah, merumuskan, mencari alternatif solusi, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan.
- d. Kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.
- e. Berperilaku jujur, teratur, disiplin, taat, dan hemat.

D. Metode

1. Ceramah
2. Curah Pendapat
3. Simulasi/Permainan.
4. Diskusi (kelompok dan pleno
5. Pemutaran film, VCD, CD, baca puisi, menyanyi, tayangan gambar

E. Langkah

1. Fasilitator menjelaskan tentang metode pendidikan.
2. Fasilitator membuat pengantar sebagai pemanasan misalnya: pembacaan sajak, nyanyian, penyangan film, CD,

VCD, gambar atau dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk curah pendapat mengenai proses menjadi satu bangsa dan pengertian tentang karakter bangsa dengan pertanyaan: *“Apakah Anda pernah mendengar sebuah masyarakat madani, dan apa saja ciri-cirinya? atau “apakah pola pikir kita ke depan akan tetap saja atau harus berubah?”*

3. Fasilitator mengajak peserta membahas masalah ciri masyarakat madani dan perubahan pola pikir masyarakat dan birokrat yang terjadi karena tuntutan perkembangan zaman.
4. Peserta mampu mengungkapkan beberapa alternatif untuk mengatasi masalah.
5. Peserta membuat kesimpulan dan hasil diskusi.

F. Waktu: Waktu yang diperlukan: 4 x 45 menit

G. Peralatan

1. LCD/OHP 5. Double-tape (selotip bolak-balik)
2. Kertas (Flip Chart) 6. VCD/DVD
3. Kertas 7. Tape
4. Spidol 8. White Board

H. Uraian Topik

Uraian masing-masing topik adalah sebagai berikut.

Dari 12 sistem nilai dasar tersebut agar dapat menjadi bentuk sikap yang berintensi untuk membentuk perilaku perlu dituangkan dalam 'definisi operasional' secara kongkrit yang memudahkan dalam pemahaman secara aplikatif sehingga dapat diterima peserta. Dari beberapa keluaran 'definisi operasional' yang lebih kongkrit itu selanjutnya didasarkan pada pertimbangan aspek psikologis manusia, dikelompokkan menjadi 3 kelompok penguasaan: (1) kognitif disingkat (**K**); (2) spiritual disingkat (**S**) atau afektif disingkat (**A**); (3) perilaku (**P**).

Bila dari 12 sistem nilai dasar tersebut diurai dalam definisi dan dinilai dari aspek psikologis, maka gambarannya kurang lebih adalah sebagai berikut:

No.	Nilai Dasar	Definisi Operasional Kongkrit	Klasifikasi
1	2	3	4
1	Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Peka (sensitif) terhadap permasalahan orang lain▪ Mau menghargai orang lain▪ Mau membantu orang lain▪ Berbudhi pekerti luhur, tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai, toleran, santun, dan ramah.▪ Memiliki pemahaman ttg. kemanusiaan	A A A P K
2	Keadilan	<ul style="list-style-type: none">▪ Peka terhadap masalah keadilan dan ketidakadilan▪ Peka terhadap hak azasi manusia▪ Menghargai peraturan perundang-undangan▪ Memiliki pemahaman tentang makna keadilan▪ Mampu mengaktualisasikan diri bertindak adil	A A A K P
3	Kemajemukan	<ul style="list-style-type: none">▪ Memahami tentang kehidupan multietnik dan multikultur▪ Mampu mengaktualisasi diri untuk hidup dalam kemajemukan	K P

4	Kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kesadaran sebagai bangsa merdeka (bukan terjajah) ▪ Mampu mengaktualisasikan pendapat, ide, gagasan ▪ Memiliki pemahaman ttg. kemerdekaan 	A P K
5	Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki pemahaman ttg. kesadaran sebagai bangsa yang lahir berdasarkan kesepakatan ▪ Memiliki rasa memiliki (sense of belonging) ▪ Memiliki rasa bangga terhadap bangsa ▪ Memiliki rasa percaya diri sebagai bangsa ▪ Mampu mengaktualisasikan diri sebagai bangsa Indonesia 	K A A A P
6	Integritas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kesadaran ttg pentingnya kejujuran ▪ Mampu mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang jujur dan dapat dipercaya ▪ Mampu mengatasi masalah secara proporsional ▪ Memiliki pemahaman ttg. kepentingan publik 	A P P K
7	Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami makna partisipasi ▪ Memahami makna kerja sama ▪ Menerima keterlibatan orang lain ▪ Mampu memosisikan diri dalam perbedaan 	K K A P
8	Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami kelebihan dan kelemahan diri sendiri ▪ Memiliki rasa percaya diri sebagai bangsa ▪ Mampu memanfaatkan sumber dan peluang secara optimal ▪ Berani berkompetisi 	K A P A
9	Religiusitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu melakukan introspeksi diri ▪ Memiliki rasa bersyukur yang tinggi ▪ Mampu mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang memiliki etika, moral dan nilai keagamaan 	S S P
10	Keseimbangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki Pemahaman ttg. Keseimbangan ▪ Memiliki kemampuan mengendalikan diri ▪ Memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan secara adil ▪ Peka terhadap perbedaan status ekonomi, sosial, tingkat pendidikan dll. 	K P P P
11	Kebersamaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki pemahaman ttg. kebersamaan ▪ Memiliki kepekaan ttg. arti hidup dalam kebersamaan ▪ Memiliki kesadaran sosial ▪ Bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama 	K P A P
12	Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki pemahaman ttg. kesetaraan ▪ Memiliki kesadaran ttg. kehidupan setara dalam bangsa yang multietnik ▪ Mampu bersikap sama dgn. sesama manusia dan suku bangsa lain 	K A P

Bila dari beberapa aspek dari hasil pengukuran tersebut bila dikelompokkan menjadi satu, maka gambarannya kira-kira sebagai berikut:

1. Kognitif (K):

- Memiliki pemahaman tentang kemanusiaan.
- Memiliki pemahaman tentang kesadaran sebagai bangsa yang lahir berdasarkan kesepakatan.
- Memahami tentang kehidupan multietnik dan multikultur.
- Memiliki pemahaman tentang makna keadilan.
- Memiliki pemahaman tentang kemerdekaan.
- Memiliki pemahaman tentang kesadaran sebagai bangsa yang lahir berdasarkan kesepakatan.

2. Afektif (A)/Spiritual (S):

- Memiliki kepekaan tentang arti hidup dalam kebersamaan.
- Peka (sensitif) terhadap permasalahan orang lain.
- Mau menghargai orang lain.
- Mau membantu orang lain.
- Menghargai etika.
- Berbudi pekerti luhur, tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai, toleran, santun, dan ramah.
- Peka terhadap masalah keadilan dan ketidakadilan.
- Peka terhadap hak azasi manusia.
- Menghargai peraturan perundang-undangan.

- Memiliki kesadaran sebagai bangsa merdeka (bukan terjajah).
- Memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*).
- Memiliki rasa bangga terhadap bangsa.
- Memiliki rasa percaya diri sebagai bangsa.
- Memiliki kesadaran tentang pentingnya kejujuran.
- Memiliki kesadaran sosial.
- Memiliki kesadaran tentang kehidupan setara dalam bangsa yang multietnik.
- Mampu melakukan introspeksi diri (S)
- Memiliki rasa bersyukur yang tinggi (S)

3. Perilaku (P):

- Mampu mengaktualisasikan diri bertindak adil.
- Mampu mengaktualisasi diri untuk hidup dalam kemajemukan.
- Mampu mengaktualisasikan pendapat, ide, gagasan.
- Mampu memanfaatkan sumber dan peluang secara optimal.
- Memiliki kepekaan tentang arti hidup dalam kebersamaan.

Uraian mengenai pengertian, keadaan sekarang dan keadaan yang diharapkan dari masing-masing nilai kebangsaan adalah sebagai berikut.

1. Nilai Dasar Kemerdekaan

a. Pengertian

Kata merdeka antara lain diartikan sebagai “*bebas (dari perhambaan), penjajahan dsb.)’ atau “tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu”*. Dengan demikian kemerdekaan adalah “*keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dsb.) atau dapat juga diartikan sebagai kebebasan.”* Sebagai birokrat, nilai kemerdekaan yang perlu dihayati dan menjadi sikap mental dan pola pikir sebagai bangsa yang bebas dan merdeka. Dengan kemerdekaan itu para birokrat dapat mengaktualisasikan dirinya (berperilaku) sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat sebagai bangsa merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya.

Dalam kehidupan manusia, kemerdekaan dalam arti bebas dari segala keterikatan adalah hak asasi. Dalam kehidupan kebangsaan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pengembangan ide, pemikiran, dan kreativitas harus dapat dieskpresi secara bebas, tidak ada pengekangan dan tidak dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis. Pemajuan bangsa tidak dapat dibatasi oleh tirani kekuasaan, politik, atau kepentingan tertentu yang semua itu dapat memberangus nilai dasar kemerdekaan. Berkat adanya kemerdekaan mengembangkan diri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, maka dalam kehidupannya manusia

mampu meningkatkan tahapan *natuur* menuju *cultuur*.

Definisi operasional kongkrit dari nilai dasar

b. Kondisi sekarang

Setelah berlangsung gerakan reformasi, masalah birokrasi yang sebelumnya dinilai tidak memiliki nilai kemerdekaan karena berlangsung dalam sistem yang sentralistik dan totaliter, berubah menjadi bebas dan terbuka. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya upaya perubahan itu cenderung menuju ke arah bebas atau merdeka secara luas. Rambu-rambu peraturan perundang-undangan dilanggar tanpa ada sanksi. Disiplin menjadi longgar, sehingga muncul istilah "*reformasi kebablasi*", atau "*reformasi tanpa arah*" atau "*reformasi sama dengan Orde baru*" dan sebagainya.

c. Kondisi yang diharapkan

Reformasi yang mengandung makna perubahan, tetapi perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik. Nilai kemerdekaan dalam lingkungan birokrasi harus dapat diterapkan secara benar. Di dalam birokrasi hendaknya tidak ada bentuk-bentuk pelarangan atau pencegahan atau pemaksaan untuk mengikuti aliran ideologi politik tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengeluarkan ide, pemikiran, pilihan dan kreativitas yang dapat dieskpresikan secara bebas, tetapi tetap bertanggung jawab.

2. Nilai Dasar Kemanusiaan

a. Pengertian

Kata manusia mempunyai arti "*makhluk yang memiliki akal budi (mampu menguasai makhluk lain)*." Sebagai makhluk hidup manusia memiliki nilai yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain, yakni nilai kemanusiaan. Kata kemanusiaan diartikan sebagai "sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia atau secara manusia atau sebagai manusia atau disebut juga perikemanusiaan. Nilai itu lahir berkat akal budi sehingga mampu mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya, bahkan manusia mampu menguasai makhluk hidup yang lain. Tetapi dengan adanya akal budi, manusia dapat hidup bersama dalam tatanan yang teratur dan antara manusia yang satu saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu. Demikian pula halnya dengan kehidupan manusia Indonesia, dapat hidup bersama karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu. Dalam kehidupan budaya Indonesia tidak dikenal adanya bentuk-bentuk penindasan, penistaan dan kesewenang-wenangan terhadap sesama manusia. Manusia memiliki memiliki kepribadian yang khas seperti berbudi pekerti luhur, tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai, toleran, santun, dan ramah.

b. Kondisi sekarang

Nilai kemanusiaan dalam arti menempatkan posisi manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai yang

berbeda dengan makhluk hidup yang lain dan juga sesama manusia pada dewasa ini cenderung menurun. Ber-bagai perusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dirusak dan dihancurkan tanpa rasa peduli. Pembabatan hutan, penambangan berbagai kekayaan alam secara liar tanpa memper-dulikan dampaknya bagi orang lain. Berbagai konflik antaretnik atau perma-salahan agama, pembagian kesejahteraan telah memakan banyak korban manusia dan banyak di antara korban itu adalah orang-orang yang tidak bersalah.

Menurunnya nilai kemanusiaan itu juga melanda kalangan birokrasi. Berbagai tindakan para birokrat banyak yang mencerminkan makin menurun-nya nilai kemanusiaan itu. Penyelesaian konflik dilakukan dengan tindakan yang tidak menjunjung nilai kemanusiaan sehingga dinyatakan melanggar HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan diselesaikan tidak adil dan hal itu bebrati melanggar norma-norma kepatutat-an sebagai manusia.

c. Kondisi yang diharapkan

Kemanusiaan yang menjadi salah satu nilai dasar falsafah Negara Pancasila menjadi acuan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penyelenggaraan birokrasi, sehingga tumbuh sikap saling menolong, kerja sama dan saling menghargai dan menghormat.

3. Nilai Dasar keadilan

a. Pengertian

Kata adil mengandung arti *“tidak berat sebelah atau tidak memihak”*. Keadilan adalah sifat atau perbuatan atau kelakuan yang adil. Dalam kehidupan setiap manusia Indonesia telah ditanamkan budaya untuk tidak bersikap berat sebelah dan tidak memihak kepada pihak tertentu saja. Keadilan merupakan prinsip hidup yang harus ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang multietnik dan multikultur. Hidup tanpa keadilan akan menimbulkan kegoncangan karena akan membangun permusuhan pada pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Nilai keadilan harus terus-menerus ditanamkan kepada manusia Indonesia sejak dini, baik secara individual maupun kolektif.

b. Kondisi sekarang

Kehendak untuk melakukan perubahan antara lain didorong oleh berlangsungnya ketidakadilan dalam berbagai bidang, terutama dalam penegakan hukum dan hak azasi manusia. Berbagai kasus banyak yang mendapatkan penanganan secara tuntas, atau diputuskan tetapi dinilai tidak adil karena diduga telah terjadi suap terhadap para penegak hukum. Di samping itu juga muncul berbagai kasus yang

berkenaan dengan ketidakadilan dalam pembagian alokasi anggaran terhadap beberapa daerah menyebabkan ketidakpercayaan terhadap lembaga birokrasi.

c. Kondisi yang diharapkan

Keadilan dalam segala bidang berjalan dengan baik. Supremasi hukum dijunjung tinggi dan ditegakkan tanpa ada yang harus menjadi korban ketidakadilan. Siapa pun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tidak ada lagi istilah “hukum dapat dibeli.”

4. Nilai Dasar Kemajemukan

a. Pengertian

Kata majemuk mengandung arti *“terjadi dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan.”* Kemajemukan berarti *“perihal keanekaragaman beberapa bagian atau unsur yang menyatu dalam bentuk kesatuan.”* Dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa (+/- 483 suku bangsa)¹ dan masing-masing suku bangsa memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nilai dasar kemajemukan (*pluralisme*) menjadi penting dalam

¹ Dr. Junus Melalatoa, Ensiklopedi Suku Bangsa, Direktorat Jenderal Kebudayaan:1995

kehidupan berbangsa yang terdiri atas aneka-ragam etnis, berbeda-beda agama, bermacam-macam kebiasaan, bahasa, agama, bervariasi status sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Meskipun hidup dalam berbagai perbedaan tetapi pada dasarnya mereka hidup dalam satu kesatuan, antara lain: satu dasar negara, satu konstitusi, satu wilayah, satu bangsa, dan satu bahasa, yang diikat dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Di dalam tata kehidupan majemuk semua suku bangsa memiliki posisi yang sama, tidak mengenal kebudayaan mayoritas dan minoritas, maju atau terbelakang, tinggi atau rendah. Dengan posisi kesetaraan akan mampu melepaskan diri dari rasa curiga terhadap kebudayaan suku-suku bangsa. Kebudayaan suku-suku bangsa tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional; kebudayaan daerah atau suku bukanlah ancaman, melainkan pembentuk kebudayaan bangsa. Sistem nilai kemajemukan menjadi penting untuk menata hubungan yang harmonis keanekaragaman itu. Konsep kehidupan seperti itu dapat menjadi acuan bagi kehidupan dalam keluarga dan kelompok-kelompok kecil, organisasi masyarakat termasuk organisasi partai politik.

b. Kondisi sekarang

Kehidupan bangsa Indonesia dalam kemajemukan saat ini cenderung mengalami penurunan kualitas. Seperti diuraikan di atas, berbagai konflik yang terjadi banyak disebabkan oleh

menurunnya kesadaran tentang arti nilai kemajemukan bangsa. Konflik terjadi karena etnik, agama, kesenjangan ekonomi, separatisme mencerminkan menurunnya kesadaran berbangsa majemuk.

c. Kondisi yang diharapkan

Nilai kemajemukan dapat difahami dan dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa majemuk, sehingga bangsa Indonesia hidup dalam rukun, damai, sejahtera, dan bersatu dalam naungan NKRI.

5. Nilai Dasar Kebangsaan

a. Pengertian

Bangsa adalah *"kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri"*. Kebangsaan adalah *"ciri-ciri yang menandai golongan bangsa"*. Dapat juga diartikan sebagai *"kesadaran diri sebagai warga dari suatu Negara"*. Sebagai sebuah bangsa yang lahir berdasarkan kesepakatan berbagai suku bangsa, untuk bergabung menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia, maka semangat integrasi nasional senantiasa dijunjung tinggi. Perjuangan untuk mencapai kesepakatan itu memerlukan waktu yang panjang dan pengorbanan yang besar. Nilai kebangsaan menjadi garis haluan fundamental bagi

keutuhan bangsa. Realita tentang adanya perbedaan agama, etnis, suku, adat istiadat, kebiasaan, status sosial, status ekonomi, dsb, justru dijadikan sebagai kerangka dasar dalam membangun kesejahteraan masyarakat termasuk dalam upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan memajukan peradaban bangsa.

b. Kondisi sekarang

Sebagaimana telah digambarkan di bagian awal, dewasa ini nilai kebangsaan sedang mengalami penurunan. Rasa kebangsaan menurun, dan tidak bangga menjadi bangsa Indonesia.

c. Kondisi yang diharapkan

Seluruh bangsa Indonesia memiliki jati diri yang kukuh, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bangsa menjunjung tinggi rasa kebangsaan dan siap membela bila ada musuh yang mengganggu keberadaan bangsa Indonesia.

6. Nilai Dasar Integritas

a. Pengertian

Kata integritas diartikan sebagai *"keterpaduan atau kebulatan, keutuhan, dan juga sebagai jujur dan dapat*

dipercaya". Sebagai manusia Indonesia di dalam konteks kebangsaan memiliki nilai-nilai dasar keterpaduan, kebulatan, keutuhan, jujur dan dapat dipercaya. Nilai-nilai dasar tersebut menjadi acuan dalam menata kehidupan masyarakat yang multietnik dan multibudaya, sehingga kemungkinan terjadi keretakan dan perpecahan dapat dicegah.

b. Kondisi sekarang

Nilai integritas dewasa ini sedang mengalami penurunan. Dalam berbagai hal, antara pejabat yang satu dengan lain tidak ada kordinasi, sehingga seringkali muncul keputusan/kebijakan yang tidak mencerminkan adanya keterpaduan, dan kekompakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Kondisi yang diharapkan

Birokrasi dapat berjalan lancar karena didukung oleh pejabat yang memiliki intergritas tinggi.

7. Nilai Dasar Demokrasi

a. Pengertian

Demokrasi dikenal sebagai bentuk atau system pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah

dengan perantaraan wakil-wakilnya. Di samping itu kata demokrasi juga diartikan sebagai “gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.” Dalam tata kehidupan modern, nilai demokrasi merupakan sendi dasar mencapai kebahagiaan dan kemajuan bangsa. Nilai demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Dalam sistem pemerintahan segenap rakyat turut serta ikut memerintah melalui wakil-wakilnya. Keputusan kolektif manusia Indonesia dalam konteks bangsa harus didasarkan pada penghargaan atas pendapat orang lain, penghormatan atas keinginan orang lain, dan kepedulian atas perilaku orang lain sepanjang berada dalam kerangka kepentingan kolektif itu sendiri. Oleh karena itu, nilai dasar demokrasi menjadi acuan dalam memper-kukuh karakter bangsa.

b. Kondisi sekarang

Nilai demokratis sedang dikembangkan untuk menata kehidupan bangsa Indonesia setelah mengalami kehidupan yang cenderung totaliter. Di sana-sini penerapannya masih mengalami kelemahan, karena konsep tentang nilai demokrasi itu sendiri belum difahami secara benar. Sering demokratis diartikan kebebasan yang tanpa batas.

c. Kondisi yang diharapkan

Terwujudnya bangsa Indonesia yang dalam kehidupannya menerapkan nilai demokratis secara benar termasuk dalam lingkungan birokrat.

- (1) Masyarakat yang saling menghargai adanya perbedaan dalam segala hal.
- (2) Birokrat yang tidak merasa paling benar, paling pintar dan cenderung memaksakan kehendak kepada bawahan.

8. Nilai Dasar Kemandirian

a. Pengertian

Kata Mandiri berarti “keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain.” Nilai dasar kemandirian dalam arti mampu berdiri sendiri, tidak harus tergantung pada bantuan pihak lain telah menjadi dasar dalam pencapaian kemajuan hidup bangsa Indonesia. Kemandirian telah mendorong bangsa Indonesia untuk mampu melaksanakan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh bangsa lain dan bahkan berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Tanpa kemandirian, usaha pencapaian kemajuan hidup bangsa akan sangat tergantung pada bantuan pihak lain dan dengan demikian sulit untuk dapat menyejajarkan diri dengan bangsa lain. Meskipun kemandirian menjadi nilai dasar bagi bangsa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia tidak menolak masuknya bahan-bahan masukan yang datang dari bangsa lain sepanjang dapat memperkaya dan

memper-kembangkan kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat bangsa Indonesia.

b. Kondisi sekarang

Secara politis bangsa Indonesia telah menjadi bangsa merdeka, sehingga menjadi sebuah bangsa yang hidup mandiri, lepas dari kekuasaan penjajah. Tetapi dalam kehidupan ekonomi Indonesia masih bergantung pada bantuan luar negeri. Sebagian dana pembangunan diperoleh dari pinjaman luar negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang makmur, kaya dengan kekayaan alam, namun masih mengekspor dari luar negeri. Gula, beras, hingga garam masih harus impor dari luar negeri yang berarti belum dapat mandiri di bidang pangan.

c. Kondisi yang diharapkan

Indonesia dapat mencukupi segala kebutuhan hidup dan pembiayaan pembangunan. Indonesia dapat mandiri di segala bidang politik, ekonomi dan juga pertahanan dan keamanan.

9. Nilai Dasar Religiusitas

a. Pengertian

Kata religius yang berasal dari kata religi atau agama dapat diartikan sebagai “taat pada agama atau saleh”. Religiusitas artinya memiliki sifat-sifat taat pada agama atau

saleh. Bangsa Indonesia memiliki nilai dasar religiusitas yang amat kuat, sehingga dikenal sebagai bangsa yang taat beragama. Meskipun hidup dalam aneka ragam agama, tetapi perbedaan itu disatukan oleh kesamaan keyakinan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan, tetapi justru menjadi kekayaan corak agama di Indonesia. Mereka hidup dalam kesamaan hak dan kewajiban, saling menghargai dan menghormati. Hidup dalam landasan nilai dasar religiusitas menjadikan manusia Indonesia mempunyai kesalehan dalam berperilaku menuju kehidupan yang lebih beradab. Nilai dasar ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam upaya pemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

b. Kondisi sekarang

Kehidupan beragama telah berkembang dengan sangat pesat, sehingga seluruh penduduk Indonesia adalah umat yang beragama. Namun dalam realita kehidupan mereka masih banyak yang bertentangan dengan ajaran agama. Nilai etika dan moral, cenderung makin melemah. Berbagai tindak pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi mencerminkan bahwa nilai religi baru sebatas pemahaman secara samar-samar, dan belum menjadi haluan dalam kehidupannya.

c. Kondisi yang diharapkan

Terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga tidak terjadi tindak pelanggaran berbagai peraturan pemerintah maupun agama.

10. Nilai Dasar Keseimbangan

a. Pengertian

Berasal dari kata 'imbang' berarti timbang atau banding. Keseimbangan berarti dalam keadaan seimbang atau sebanding. Nilai dasar hidup dalam keseimbangan merupakan perwujudan pengalaman manusia dalam menjalani kehidupan menghadapi berbagai tantangan, sehingga akhirnya menjadi prinsip dasar dalam penataan kehidupan bangsa Indonesia. Antara lain seimbang dalam hal pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, dunia dan akhirat, materi dan non-materi. Hidup dalam suasana ketidakseimbangan akan menimbulkan kegoncangan jiwa dan sebaliknya hidup dalam seimbang akan menciptakan iklim kedamaian. Nilai dasar ini menjadi acuan pula dalam upaya memajukan kebudayaan bangsa. Hanya mengedepankan bertum-buhnya kecerdasan saja akan menghasilkan manusia yang tidak sehat raga-jiwanya. Jika hanya mengedepankan bertumbuhnya kepribadian akan menghasilkan manusia yang tertinggal, dan jika hanya mengedepankan peningkatan keterampilan hanya menghasilkan manusia robot.

b. Kondisi sekarang

Kehidupan masyarakat Indonesia cenderung ke arah kehidupan yang mementingkan materi, dan menjauhkan diri dari urusan yang bersifat batiniah. Banyak anggota masyarakat yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan materi dan menghindari nilai-nilai rohaniyah. Di samping itu juga terjadi ketidakseimbangan kehidupan antara si kaya dan si miskin, daerah pedesaan dan perkotaan, Indonesia bagian Timur dan Barat dan sebagainya.

c. Kondisi yang diharapkan

Terwujudnya kehidupan yang seimbang dalam segala bidang: lahir dan batin, kaya dan miskin, tua dan muda, desa dan kota dan sebagainya.

11. Nilai Dasar Kebersamaan.

a. Pengertian

Kata '*bersama*' berasal dari kata sama. Sama artinya serupa, tidak berbeda, atau tidak berlainan mengenai halnya atau keadaannya. Keber-samaan berarti hal bersama. Bangsa Indonesia hidup bersama dalam kesatuan wilayah dan pemerintahan. Hidup dalam kebersamaan itu telah menumbuhkan nilai dasar kebersamaan bagi bangsa Indonesia.

Nilai dasar ini terbukti dapat mempermudah manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dari lingkungannya. Tetapi dengan dahsyatnya perkembangan ilmu dan teknologi (*iptek*) yang melanda dunia dalam beberapa dasa warsa terakhir ini secara langsung ataupun tidak langsung telah menumbuhkan sikap individualistik dan mengikis nilai dasar kebersamaan itu. Manusia hidup hanya mengutamakan kepentingan diri pribadi dan kurang memperhatikan keadaan manusia disekitarnya, sehingga permasalahan yang memerlukan pemecahan secara bersama-sama menjadi semakin membesar. Padahal semakin besar tantangan yang harus dihadapi diperlukan kebersamaan untuk memecahkannya secara kolektif. Oleh sebab itu nilai dasar ini harus dikembangkan dalam pemajuan bangsa dan birokrasi Indonesia.

b. Kondisi sekarang

Bangsa Indonesia lahir setelah dicapai kesepakatan dari seluruh suku bangsa untuk bersama-sama menyatukan diri menjadi bangsa baru, bangsa Indo-nesia. Dalam perjalanannya, setelah secara *de facto* dan *de jure* bangsa Indonesia lahir, sering muncul kehendak untuk memisahkan diri dari keber-samaan itu. Meskipun telah bersatu hampir 60 tahun, namun nilai keber-samaan itu belum solid. Dalam kehidupan kelompok kehendak untuk tidak hidup dalam kebersamaan itu sering muncul, di lingkungan keluarga, organisasi masyarakat dan di lingkungan birokrasi.

c. Kondisi yang diharapkan

Nilai dasar kebersamaan dapat berkembang dengan baik di segala bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang beranekaragam (*pluralistik*) yang kini sedang menghadapi masalah kebangsaan.

12. Nilai Dasar Kesetaraan.

a. Pengertian

Kata setara berarti sejajar atau sepadan, atau sebanding mengenai tinggi, tingkat atau kedudukan dan lain-lainnya. Nilai dasar kesetaraan menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beranekaragam suku bangsa, budaya, dan agama. Dalam keanekaragaman itu masing-masing dalam tingkatan dan kedudukan yang sama (sejajar). Pemajuan kebudayaan nasional Indonesia hendaknya didasarkan pada nilai dasar kesetaraan bagi seluruh budaya suku bangsa. Pemajuan kebudayaan suku bangsa yang satu diperlakukan sama dengan suku bangsa yang lain. Pemajuan kebudayaan nasional Indonesia pada dasarnya adalah pemajuan seluruh kebudayaan suku bangsa, dan tidak harus menafikan masuknya unsur dari seluruh kebudayaan suku bangsa yang dapat memperkaya dan memperkembangkan khasanah kebudayaan nasional Indonesia.

b. Kondisi sekarang

Dalam kenyataan baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan birokrasi, nilai kesetaraan dalam kehidupan masyarakat yang beranekaragam masih belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Masih banyak terjadi bentuk-bentuk kebijakan dan keputusan yang mencerminkan ketidaksejajaran atau ketidaksepadan posisi. Konsep lebih mengutamakan 'putra daerah' misalnya menunjukkan bahwa di balik itu ada ketidaksejajaran kedudukan.

c. Kondisi yang diharapkan

Pola hidup dalam kesetaraan seperti yang diamanatkan oleh pendiri bangsa dapat terwujud di segala bidang kehidupan.

H. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan antara lain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa kemerdekaan diperlukan dalam bagi kehidupan sebuah bangsa dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan birokrasi?
2. Apakah nilai kemanusiaan telah diposisikan secara benar dalam kehidupan masyarakat? Bagaimana dengan pemosisian nilai kemanusiaan pada kantor Anda?

3. Apakah nilai keadilan telah ditegakkan di lingkungan kantor Anda? Bila belum apa kendalanya?
4. Apa konsep Anda tentang penerapan nilai kemajemukan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beranekaragaman, suku bangsa, budaya, agama, bahasa?
5. Kesepakatan untuk menjadi satu bangsa merupakan awal lahirnya bangsa Indonesia. Menurut pendapat Anda mengapa rasa kebangsaan sekarang ini cenderung menurun?
6. Dalam kehidupan organisasi yang kompleks diperlukan koordinasi, sehingga dicapai keterpaduan langkah. Apakah nilai integritas telah diterapkan secara benar dalam kehidupan birokrasi? Bilaman belum mengapa hal itu sulit dilaksanakan?
7. Apakah Anda setuju dengan penilaian bahwa penerapan nilai demokrasi di Indonesia masih jauh dari sasaran, sehingga sering orang mengatakan "kita baru belajar demokrasi"?
8. Nilai kemandirian masih yang telah lama dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ternyata belum juga tercapai sementara Indonesia dikatakan sebagai Negara yang kaya dengan sumber alam. Mengapa hal itu terjadi?
9. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Mengapa tindak pelanggaran etika dan moral justru banyak terjadi di Indonesia?
10. Apakah nilai keseimbangan dalam segala hal telah dipahami dan diaktualisasikan oleh bangsa Indonesia. Kalau belum mengapa?

11. Ada semboyan “bersama kita bisa”. Mengapa nilai kebersamaan, gotong-royong yang merupakan sumber kekuatan yang besar tidak dapat berkembang?
12. Apakah nilai hidup dalam kesetaraan dalam masyarakat bangsa yang bermacam-macam telah diaktualisasikan di dalam lingkungan kerja Anda?

“Kaum intelegensia tidak saja harus menunjukkan tanggung jawab intelektualnya terhadap perkembangan ilmu, tetapi juga tanggung jawab moril.....

Kembalilah manusia dengan ilmunya menjadi makhluk yang buas, menjadi manusia yang mengancam satu sama lain, mengancam kebudayaan dan peradaban?”

Mohammad Hatta, Tanggung jawab Moril Kaum Intelegensia, 1966)

BAB VI

PENDIDIKAN SISTEM NILAI BUDAYA KERJA

SUBMODUL 5

**NUNUS SUPARDI
SUNARDI DWIDJOSOESTRO
HASANALWI**

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2004**

A. Pendahuluan

Dalam hal pemilihan nilai-nilai budaya dasar untuk lingkungan kerja birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan 34 unsur nilai budaya kerja atau 17 pasang nilai yang diharapkan dapat dijadikan acuan oleh setiap aparatur negara dalam mewujudkan karakter birokrasi Indonesia. Bila 17 pasang nilai dasar budaya kerja itu dapat diaktualisasikan secara optimal, maka akan tercipta suatu birokrasi yang baik dan bersih, dan hal itu akan mencerminkan wujud karakter bangsa Indonesia. Adapun ke-17 pasang nilai-nilai dasar budaya kerja itu adalah:

1. Nilai Komitmen dan Konsisten
2. Nilai Wewenang dan Tanggung jawab
3. Nilai Keikhlasan dan Kejujuran
4. Nilai Integritas dan Profesionalisme
5. Nilai Kreativitas dan Kepekaan atau sensitivitas terhadap lingkungan tugas
6. Nilai Kepemimpinan dan Keteladan
7. Nilai Kebersamaan dan Dinamika dalam Kelompok
8. Nilai Ketepatan dan Kecepatan
9. Nilai Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi
10. Nilai Keteguhan dan Ketegasan
11. Nilai Disiplin dan Keteraturan
12. Nilai Keberanian dan Kearifan
13. Nilai Dedikasi dan Loyalitas
14. Nilai Semangat dan Motivasi

15. Nilai Ketekunan dan Kesabaran
16. Nilai Keadilan dan Keterbukaan
17. Nilai Penguasaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi¹

B. Pokok Bahasan

Yang menjadi pokok bahasan dalam SUBMODUL 5 adalah 17 buah sistem nilai budaya kerja seperti tercantum dalam pendahuluan. Masing-masing dijelaskan dan dibahas dari sisi pengertian, keadaan pada sekarang dan keadaan yang diharapkan. Dengan pendekatan ini pada akhir pendidikan peserta dapat memahami arti (kognitif), menghayati urgensinya tercermin dalam sikap (afektif) dan mengimplementasikan dalam bentuk perilaku.

C. Tujuan

1. Secara kognitif:

- a. Meningkatkan wawasan dan kesadaran tentang visi, misi, strategi dan kebijakan organisasi.
- b. Meningkatkan wawasan dan kesadaran mengenai 17 nilai budaya kerja dalam kehidupan sebagai birokrat.
- c. Meningkatkan wawasan dan kesadaran tentang pengelolaan organisasi secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 2002, hal. 8

2. Secara sikap/spiritual/afektif:

- a. Meningkatkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain
- c. Meningkatkan kepekaan terhadap 17 nilai budaya kerja dalam kehidupan sebagai birokrat: jujur, disiplin, kreatif, inovatif, konsisten, cepat, tepat, akurat dan lain-lain.
- d. Meningkatkan kesediaan menghargai/menghormati perbedaan
- e. Meningkatkan kesediaan untuk bersikap setara dengan orang lain
- f. Meningkatkan rasa percaya diri dan merasa bangga sebagai birokrat.
- g. Meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi tempat bekerja.
- h. Meningkatkan kesediaan kesediaan bekerja sama.
- i. Meningkatkan keberanian berkompetisi secara sehat.

3. Secara perilaku:

- a. Kemampuan dalam mengimplementasikan 17 nilai budaya kerja dalam kehidupan sebagai birokrat: jujur, disiplin, kreatif, inovatif, konsisten, cepat, tepat, akurat dan lain-lain.
- b. Kemampuan menentukan skala prioritas yang berorientasi pada kepentingan publik.
- c. Kemampuan melakukan koordinasi, menganalisis masalah, merumuskan, mencari alternatif solusi, menentukan

prioritas, dan mengambil keputusan.

- d. Kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.

D. Metode

1. Ceramah
2. Curah Pendapat
3. Simulasi/Permainan.
4. Diskusi (kelompok dan pleno)
5. Pemutaran film, VCD, CD, baca puisi, menyanyi, tayangan gambar

E. Langkah

1. Fasilitator menjelaskan tentang metode pendidikan.
2. Fasilitator membuat pengantar sebagai pemanasan misalnya: pembacaan sajak, nyanyian, penyangan film, CD, VCD, gambar atau dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk curah pendapat mengenai proses menjadi satu bangsa dan pengertian tentang karakter bangsa dengan pertanyaan: *"Apakah Anda sebagai birokrat memahami dan melaksanakan Sumpah atau Janji PNS? atau "menurut Anda bagaimana mengatasi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrat pemerintah?"*
3. Fasilitator mengajak peserta membahas masalah ciri birokrat yang seharusnya melekat dalam diri para birokrat.
4. Peserta membuat kesimpulan dan hasil diskusi

F. Waktu

Waktu yang diperlukan: 4 x 45 menit

G. Peralatan

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. LCD/OHP | 5. Double-tape (selotip bolak-balik) |
| 2. Kertas (Flip Chart) | 6. VCD/DVD |
| 3. Kertas | 7. Tape |
| 4. Spidol | 8. White Board |

H. Uraian Pokok Bahasan

1. Definisi Operasional

Dari 17 sistem nilai budaya kerja tersebut di atas agar dapat menjadi bentuk sikap yang berintensitas untuk membentuk perilaku perlu dituangkan dalam '*definisi operasional*' secara kongkrit yang memudahkan dalam pemahaman secara aplikatif sehingga dapat diterima peserta. Dari beberapa keluaran '*definisi operasional*' yang lebih kongkrit itu selanjutnya didasarkan pada pertimbangan aspek psikologis manusia, dikelompokkan menjadi 3 kelompok penguasaan: (1) kognitif disingkat (**K**); (2) spiritual disingkat (**S**) atau afektif disingkat (**A**); (3) perilaku (**P**).

Bila dari 17 sistem nilai budaya kerja tersebut diurai dalam definisi dan dinilai dari aspek psikologis, maka gambarannya kurang lebih adalah sebagai berikut:

No.	Nilai Budaya Kerja	Definisi Operasional Kongkrit	Klasifikasi
1	2	3	4
1	Nilai Komitmen dan Konsisten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visi, misi, strategi dan kebijakan ▪ Arah organisasi pemerintahan sebagai pelayan publik ▪ Peran memfasilitasi publik ▪ Orientasi pada kepentingan publik sebagai prioritas utama 	
2	Nilai Wewenang dan Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggung jawab melayani publik ▪ Mengikuti kode etik ▪ Konsisten menerapkan kode etik/ aturan ▪ Konsisten pemberian reward dan punishmen ▪ Adanya evaluasi performance yang standar 	
3	Nilai Keikhlasan dan Kejujuran Siap melayani publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsisten terhadap prosedur/SOP ▪ Tidak menerima suap dalam melayani publik ▪ Dapat dipercaya ▪ Bertindak jujur 	
4	Nilai Integritas dan Profesionalisme	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kemampuan di bidangnya ▪ Melakukan pengembangan sesuai kebutuhan ▪ Ada evaluasi performance kerja 	
5	Nilai Kreativitas dan Kepekaan atau sensitivitas terhadap lingkungan tugas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peka terhadap kebutuhan dan konsekuen yang muncul atas kebijakan/sistem pada publik ▪ Berani menyampaikan ide ▪ Dapat menganalisa akibat ▪ Berindak sesuai dengan visi 	
6	Nilai Kepemimpinan dan Keteladanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu memotivasi ▪ Mampu berkomunikasi ▪ Memiliki ketegasan ▪ Mampu memfasilitasi ▪ Mampu melibatkan orang lain berinisiatif mendekati bawahan ▪ Bersedia mendengarkan keluhan bawahan 	

7	Nilai Kebersamaan dan Dinamika dalam Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersedia bekerja secara Tim ▪ Mampu bersedia secara Tim 	
8	Nilai Ketepatan dan Kecepatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pada target waktu ▪ Kecepatan ▪ Ketelitian ▪ Kepastian waktu ▪ Pemanfaatan teknologi standar keberhasilan kerja 	
9	Nilai Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsisten dengan penerapan aturan ▪ Mampu menerapkan keseimbangan atau rasio dan emosi 	
10	Nilai Keteguhan dan Ketegasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki keteguhan dalam pendirian ▪ Konsisten dalam penerapan aturan 	
11	Nilai Disiplin dan Keteraturan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teratur, disiplin dan taat asas ▪ Berorientasi pada target ▪ Mengutamakan kualitas pelayanan 	
12	Nilai Keberanian dan Kearifan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mau menerima resiko pekerjaan ▪ Keberpihakan kepada publik ▪ Bersedia menerima kritik dan masukan 	
13	Nilai Dedikasi dan Loyalitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Loyal pada institusi ▪ Memeberikan pelayanan yang baik pada masyarakat 	
14	Nilai Semangat dan Motivasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu menampilkan diri yang mau bekerja keras ▪ Memiliki kemampuan pendorongan 	
15	Nilai Ketekunan dan Kesabaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu mengendalikan diri (emosi) ▪ Memiliki semangat kerja dan pengabdian yang tinggi 	
16	Nilai Keadilan dan Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu mengaktualisasikan diri sebagai orang yang mampu bertindak adil dan bijaksana ▪ Kesediaan menerima masukan maupun membuka diri. 	
17	Nilai Penguasaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki semangat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan ▪ Mampu memanfaatkan kemajuan teknologo 	

Dari penjabaran 17 nilai budaya kerja ke dalam definisi operasional yang kongkrit seperti diatas dapat disimpulkan bahwa bagian penting dalam pendidikan budauya kerja adalah:

- a. Memahami visi dan misi organisasi.
- b. Memahami tanggung jawabnya.
- c. Profesional di bidangnya (memiliki kemampuan di bidangnya)
- d. Peka dalam memberikan pelayanan publik.
- e. Memberikan pelayanan publik secara optimal.
- f. Terbuka dalam menerima kritik dan evaluasi.
- g. Memiliki jiwa kepemimpinan.
- h. Mampu bekerja sama dalam Tim.
- i. Terbuka dan transparan dalam melaksanakan tugas.
- j. Mampu mengendalikan diri.
- k. Tepat waktu, disiplin dan jujur.

2. Uraian mengenai pengertian, kondisi sekarang dan keadaan yang diharapkan masing-masing pasangan adalah sebagai berikut.

a. Nilai Komitmen dan Konsisten

(1) Pengertian

Komitmen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini. Sementara itu, konsistensi dapat diartikan sebagai: ketetapan, kesesuaian, ketaatan dan kemantapan dalam bertindak sesuai dengan visi, misi, janji, prinsip, amanah,

kebijakan atau aturan yang dimantapkan (taat asas). Visi itu sendiri mengandung makna: pandangan ke depan dan arah tujuan yang ingin diwujudkan, sedangkan misi adalah: tugas yang diemban untuk mencapai sasaran-sasaran pokok/strategis dan tujuan organisasi tertentu. Apakah yang dimaksud dengan organisasi? Kebanyakan orang mengartikan organisasi adalah kelompok orang dan sarana kerja sama untuk mencapai tujuan.

Seseorang dikatakan memiliki komitmen dan konsistensi berarti seseorang itu memegang teguh sepenuh hati dan berjanji melaksanakan tugas yang harus diemban secara taat asas, yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam satu wadah kerja sama untuk mencapai tujuan. Para birokrat harus memiliki sikap taat kepada komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan komitmen itu.

(2) Keadaan Saat Ini

Sampai saat ini komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah karena belum memahami benar mengenai urgensi dan makna visi dan misi itu sendiri. Di samping itu masih ada kepentingan pribadi atau golongan yang lebih menonjol jika dibandingkan dengan tujuan organisasi. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan (deviasi dan distorsi) dalam kebijakan publik yang

berdampak luas kepada masyarakat. Kebijakan publik yang baik dan benar sebagai penanda karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 lebih mengarah pada kesejahteraan kelompok tertentu saja. Kebijakan itu hanya menguntungkan konglomerat dan menyuburkan benih-benih KKN di kalangan birokrasi.

Banyak kebijakan, peraturan perundang-undangan dan instrumen manajemen yang telah diperbaiki tetapi dalam pelaksanaannya jauh berbeda dari yang diharapkan. Undang-undang pemberantasan korupsi, Keppres tentang pengadaan barang dan jasa, pertanahan, keuangan dan perbankan, pertambangan dan energi, ke-PU-an dll, masih banyak terjadi penyimpangan, karena sikap dan perilaku yang tidak konsisten dan cenderung memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan, paraktek KKN terutama disebabkan oleh sikap aparaturnegara yang tidak memegang teguh amanah dan Sapta Prasetya Korp Pegawai Negeri. Sistem birokrasi yang ada masih mengandung unsur KKN sehingga komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi tidak obyektif.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Para birokrat harus memahami dengan baik dan benar serta memegang teguh amanat konstitusi, visi, misi

instansi dan melaksanakannya dengan taat asa dalam tugas sehari-hari, dan mereka komitemen dan konsisten terhadap visi dan misi organisasi terus meningkat. Di samping itu dapat menempatkan dan membedakan antara kepentingan pribadi dan oraganisasi. Kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sementara itu, sistem birokrasi yang ada harus mendukung peningkatan komitemen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi.

b. Nilai Wewenang dan Tanggung Jawab

(1) Pengertian

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sementara tanggung jawab adalah kesediaan menanggung sesuatu. Bila salah wajib memperbaiki atau dapat dituntut, dan diperkarakan. Dengan demikian wewenang dan tanggung jawab memiliki hubungan yang amat dekat. Seorang aparatur negara dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan posisi jabatannya. Oleh karena itu para birokrat harus memahami kewenangan dan tanggung jawabnya, dan menjalankannya dengan baik, agar tidak ada pihak lain yang dirugikan.

(2) Keadaan Saat Ini

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab di lingkungan birokrasi pada saat ini belum seimbang. Masyarakat umumnya berpendapat bahwa tanggung jawab aparatur negara masih rendah, wewenang kurang jelas, dedikasi yang rendah, sistem manajemen pelayanan yang masih kurang baik, sehingga layanan aparatur kepada masyarakat masih jauh dari harapan, baik kualitas, kepastian maupun sikap aparaturnya. Arogansi pemegang wewenang/kekuasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya seakan-akan tidak dapat dipersalahkan.

Gambaran tentang keadaan saat ini di atas disebabkan oleh masih adanya kekuasaan yang berlebihan pada pemerintahan yang lalu dan belum dapat diperbaiki sepenuhnya. Banyak wewenang dan tanggung jawab yang belum diatur sesuai dengan kebutuhan organisasi bagi upaya peningkatan prestasi kerja. Sebagai contoh, pejabat yang melayani atasan secara berlebihan meskipun isi perintahnya tidak benar, agar tidak dipindahkan ke posisi yang kurang baik. Anggota keluarga pejabat yang terjun dalam dunia usaha dipermudah izin-izin yang diperlukan.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Dalam kehidupan birokrasi, wewenang dan tanggung jawab aparatur harus jelas dan tegas, ada kepastian dan

perlindungan hukum bagi aparatur yang menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta pemberian sanksi bagi yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Upaya optimal perlu dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang dapat mendukung bahkan menjamin peningkatan layanan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan mempertinggi kinerja aparatur negara.

c. Nilai Keikhlasan dan Kejujuran

(1) Pengertian

Ikhlas dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan (Lillahi ta'ala). Jujur adalah lurus hati, tidak curang. Ketika seseorang berlaku jujur harus dibarengi dengan rasa tulus dan ikhlas. Kejujuran adalah komponen rohani yang memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Setiap birokrat harus memiliki sikap ikhlas dan jujur dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Keadaan Saat Ini

Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, serta antara jujur dan tidak jujur.

Banyak masalah yang timbul pada era reormasi yang merupakan akibat kebitidakjujuran pada era orde Baru dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pejabat atasan yang KKN akan menyebabkan KKN meluas pula pada para pejabat bawahan dan masyarakat. Berawal dari memberi tip, hadiah atau upeti kepada pejabat sudah mengakar berkembang menjadi praktek KKN. Gaji PNS yang kecil yang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari menjadi alasan untuk mencari uang tambahan dengan cara-cara tidak jujur.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Dalam kehidupan birokrasi, kejujuran yang dilandasi oleh etika dan moral yang tinggi sangat diperlukan dalam pembuatan rencana, penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, penentuan anggaran dan setiap pelaksanaan pekerjaan. Aparat dalam melaksanakan tugas harus profesional dan jujur kepada siapapun, motivasi tinggi, dan selalu berusaha melaksanakan setiap tugas sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, seorang ibu secara ikhlas menyusui putra/putrinya tanpa motivasi lain, karena pekerjaan itu amanah yang harus ditunaikan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Aparatur negara yang bersih (jujur dan ikhlas) menjadi kunci bagi tumbuhnya rasa hormat dan kepercayaan masyarakat kepada aparatur

pemerintah, sehingga pemerintah menjadi dipercaya dan berwibawa.

d. Nilai Integritas dan Profesionalisme

(1) Pengertian

Kata integritas diartikan sebagai *“keterpaduan atau kebulatan, keutuhan, dan juga sebagai jujur dan dapat dipercaya”*. Sementara itu, profesionalisme berarti yang bersangkutan dengan profesi, yaitu bidang pekerjaan yang *“memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya”*. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini kepada para birokrat dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam bekerja, di samping tenaga yang profesional di bidangnya. Oleh karena itu dalam birokrasi Indonesia ke depan diperlukan birokrat yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.

(2) Keadaan Saat Ini

Dalam penyelenggaraan birokrasi masih banyak aparatur yang integritas dan profesionalismenya rendah, selalu mau menang sendiri dan biasanya tidak mau disalahkan karena menganggap dirinya sebagai penguasa resmi yang sah. Banyak sorotan masyarakat terhadap profesionalisme aparatur negara, menanda-kan bahwa

masyarakat belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara. Kurangnya kesadaran aparatur negara untuk meningkatkan integritas dan pro-fesionalisme pribadi melalui peningkatan ilmu dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi aktual. Di samping itu juga tidak adanya keharusan atau persyaratan untuk mengikuti pelatihan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sering terjadi Diklat yang diikuti tidak memiliki kaitan langsung dengan bidang tugasnya. Sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya tidak dilaksanakan dengan baik. Selain itu, masih banyak wewenang dan tanggung jawab yang belum diatur sesuai kebutuhan organisasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah sistem rekuritmen yang hanya mengandalkan pada ijasah, dan bukan kemampuan riil, pengalaman dan keahliannya.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Dalam penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh aparatur negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, dan berjiwa ksatria, berani mengakui kesalahan dan sanggup memperbaikinya.

e. Nilai Kreativitas dan Kepekaan

(1) Pengertian

Kreativitas diartikan sebagai ide-ide baru secara spontan karena suatu hal yang dianggap penting atau mendesak dalam kehidupan dan pekerjaannya. Ide tersebut diolah menjadi suatu inovasi yang dapat diaplikasikan pada kerja individu atau organisasi yang lebih baik atau menguntungkan. Inovasi itu bisa baik dan diadopsi menjadi nilai yang baik dan benar, tetapi bisa juga ide itu gagal mencapai suatu nilai mengandung resiko kalau kita tidak waspada. Kepekaan dapat diartikan sebagai respon seseorang atau organisasi dalam menghadapi sesuatu peristiwa yang mungkin menguntungkan, merugikan atau membahayakan. Tingkat kepekaan dapat berbeda-beda tergantung pada manusia dan peristiwanya. Kepekaan dapat bersifat reaktif, tetapi juga proaktif atau kejelian mengenal peluang. Jika kepekaan itu dimiliki oleh aparatur dalam organisasi, mereka akan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar lingkungan organisasi dan peluang untuk menyelamatkan diri dan organisasi lebih dini dapat disiapkan.

(2) Keadaan Saat Ini

Penyampaian ide baru (kreativitas) dari karyawan sering kurang mendapat perhatian atasan, karena dianggap

merepotkan atau mengganggu kebijakan dan prosedur yang sudah ada atau mapan. Aparatur negara umumnya belum peka terhadap keluhan masyarakat yang dilayani dan mengabaikan kritik yang muncul dari lingkungan karena dianggap biasa-biasa saja. Kondisi sistem penggajian yang belum memadai dan penghargaan prestasi yang rendah juga menjadi penyebab kreativitas aparat tidak berkembang. Sementara itu, banyak pejabat tidak tanggap dan tidak kreatif untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang ideal, karena tidak sesuai dengan kepentingan dan seleranya.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Birokrasi sebagai lingkungan kerja untuk berekspresi seharusnya mampu mendorong berkembangnya kreativitas aparatur terutama untuk memperbaiki cara kerja dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga aparatur yang kreatif dihargai dan diperhatikan. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara harus ditanggapi secara serius dan dicarikan jalan pemecahannya, bila perlu mengubah sistem dan prosedur yang ada. Kepekaan aparat terhadap keluhan dari masyarakat sangat diperlukan, sehingga timbul kreativitas untuk mengatasi permasalahan.

f. Nilai Kepemimpinan dan Keteladanan

(1) Pengertian

Kepemimpinan atau *leadership* diartikan sebagai kesadaran diri sebagai seorang pemimpin yang ditunjukkan melalui kemampuannya untuk mempengaruhi dan menjadikan dirinya sebagai teladan. Di samping itu juga mampu memotivasi orang lain terutama bawahannya agar tergerak mencapai sasaran yang lebih tinggi berdasarkan nilai-nilai moral yaitu integritas, komitmen, konsistensi, profesionalisme dan kemampuan komunikasi.

Kepemimpinan merupakan seni mengemudi dan mengendalikan organisasi secara cerdas, pandai, berpengalaman, peka, proaktif, selalu dekat dengan yang dipimpin, visioner, dan berperan sebagai juru bicara, pelatih, sumber perubahan dan pembaharuan. Gaya kepemimpinan mempunyai daya motivasi yang efektif untuk mencapai keberhasilan manajemen. Pengaruhnya tergantung pada lingkup dan intensitas tuntutan manajemen dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Keteladanan adalah sikap perilaku yang dinyatakan secara sadar maupun tidak disadari dari seorang pemimpin yang dipersepsi oleh bawahannya sebagai sesuatu yang memicu atau mendorong bawahan mencontoh.

Setiap perilaku yang menjadi kerangka acuan (frame of references) bawahan dalam hal yang berkaitan langsung dengan pekerjaan maupun nilai-nilai sehingga bawahan akan bertindak sesuai dengan kerangka acuan positif berdasarkan rasa hormat dan penghormatan. Sifat pemimpin yang tingkah lakunya dapat ditiru dan menjadi teladan bagi bawahannya dan orang lain antara lain: taqwa, profesional, belajar terus, integritas, adil, arif, tegas dan bertanggung jawab, ramah, rendah hati, gembira, silih asih, asuh, sabar, dan murah senyum.

(2) Keadaan Saat Ini

Kebanyakan aparatur negara ingin menang sendiri, tidak mau melihat kekurangan dirinya, bersifat otoriter, tidak memperlihatkan sifat dan perilaku yang dapat dijadikan contoh, bahkan sering bertentangan dengan yang diharapkan bawahan dan masyarakat. Para pemimpin belum memiliki sifat kepemimpinan yang bertumpu pada nilai moral dan kesadaran misi yang diemban. Mereka menempatkan dirinya sebagai 'penguasa' sehingga mempengaruhi bawahan atas dasar kekuasaan atau kewenangan resmi dan bukan atas rasa tanggung jawab moral dan sosial. Di samping itu para pemimpin masih menunjukkan sikap sebagai seorang 'birokrat feodal' yang selalu menuntut bawahannya untuk setia dan loyal, menuruti segala perintah dan keinginannya, sehingga menumbuhkan karakter

bawahan yang ABS/AIS atau mencari muka, senang dihormati dan dipuji dll. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut untuk berimprovisasi dan mendayagunakan kreativitas serta mengembangkan potensi bawahan dan organisasi. Hal lain yang kini sedang marak berkembang adalah budaya suap, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pemimpin dalam bekerja. Mereka berorientasi pada kesempatan, sehingga gaya kepemimpinannya lebih bersifat otoriter, memanfaatkan bawahan yang loyal, sehingga menjadi penghambat kreativitas bawahan. Para pemimpin tidak memberikan keteladan kepada bawahan, sehingga tidak memberikan iklim kerja yang serius dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Seorang pemimpin dalam birokrasi harus menguasai manajemen kepemimpinan, memahami visi dan misi organisasi dan segala yang harus dilakukan oleh bawahan. Seorang pemimpin harus berperan sebagai manajer yang mampu mengelola pekerjaan melalui pndayagunaan kemampuan bawahannya secara optimal, mau membuka diri untuk menerima gagasan yang kreatif dari bawahan dan mampu memotivasi dan memberdayakan bawahan. Selain itu juga harus berorientasi pada pencapaian kinerja positif,

bersikap terbuka, demokratis, melaksanakan sistem dan prosedur secara konsisten. Bagian yang paling penting adalah sebagai pemimpin harus mampu memberikan teladan baik kepada bawahan.

g. Nilai Kebersamaan dan Dinamika Kelompok

(1) Pengertian

Nilai kebersamaan (*togetherness*) adalah suatu sikap dan perilaku sekelompok individu yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan. Sikap kelompok individu itu untuk sementara menunjukkan kesatuan perasaan dan aksi karena dorongan bersama dan simpati yang berpusat pada objek, tuntutan, atau ide yang sama. Kebersamaan dimaksudkan sebagai suasana hati yang merasakan dirinya bagian dari satu kelompok kerja tertentu, sehingga tumbuh perasaan bersama dalam kelompok yang kuat yang melahirkan kelompok kerja dan sinergi dalam melaksanakan tugas bersama. Sementara itu dinamika kelompok diartikan sebagai sikap dan perilaku suatu kelompok yang teratur yang aggotanya mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

(2) Keadaan Saat Ini

Sikap kebersamaan jarang dijumpai karena masing-masing individu lebih banyak terpaku pada kepentingan

masing-masing dan enggan menerima resiko yang dapat merugikan setiap individu. Meskipun tujuan suatu kelompok sudah jelas, tetapi anggota biasanya menyerahkan segala sesuatunya kepada pengurus saja dan tidak secara aktif berperan dalam memajukan kegiatan kelompok, sebab masing-masing anggota tidak rela mengorbankan kepentingan individunya untuk kepentingan kelompok. Masing-masing bekerja dengan uraian tugas yang ada dan belum memiliki kesadaran kebersamaan bahwa dirinya bekerja dalam satu sistem yang menyeluruh (komprehensif).

Birokrat bekerja atas dasar kepentingan individu dan kurang merasakan tanggung jawab bersama, guna menjaga citra lembaga, sementara lingkungan kerja aparatur negara belum menjadi pemicu positif untuk bekerja secara sinergi. Mereka kurang mampu membangun kerja sama, sehingga pekerjaan tertunda atau tersendat karena tidak seirama dalam bekerja. Dalam hal pengendalian kerja tidak optimal karena rasa iri atau enggan menegur sehingga tidak ada orang yang merasa bertanggung jawab untuk mempercepat alur pelayanan (ada rasa masa bodoh). Selain itu, - sifat individualisme lebih menonjol dibanding dengan sikap dalam kebersamaan. Pengurus kelompok bertindak sendiri-sendiri, tertutup dan tidak mengikutsertakan anggotanya.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Setiap anggota/individu memiliki rasa kebersamaan sejak awal, tahu tanggung jawab, tahu resiko yang akan terjadi. Para aparat harus memiliki sifat transparan dalam segala tingkah laku kelompok dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam memajukan kelompok dan konsekuen dalam menanggung resiko yang merugikan individu. Selain itu, setiap aparat harus menyadari bahwa ia merupakan bagian dari mata rantai kelompok kerja.

h. Nilai Ketepatan dan Kecepatan Bekerja

(1) Pengertian

Ketepatan berarti mengenai sasaran, mencapai tujuan, penuh ketelitian dan bebas dari kesalahan. Kecepatan berarti menggunakan waktu yang singkat dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Dengan ketepatan dan kecepatan menyangkut masalah kepastian waktu, kuantitas, kualitas dan finansial yang diperlukan dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan.

(2) Keadaan Saat Ini

Dalam organisasi birokrasi tidak disusun rencana kerja secara rinci dan jelas sehingga aparat bekerja tidak

secara rapi dan terjadual. Kebiasaan kerja aparatur negara saat ini banyak yang kurang tepat dan tidak cepat dalam menyelesaikan suatu urusan, bahkan terkesan asal jadi, asal kerja, dan kurang berorientasi pada ketepatan dan kecepatan pelayanan. Di samping itu juga berkembang kebiasaan untuk tidak bekerja secara cepat dan tetap ada pemeeo yang berkembang: “selama masih bisa dipersulit kenapa dipermudah?” Selain itu berkembang pula kebiasaan bekerja tidak terencana dengan baik, menjadi terburu-buru sehingga hasilnya tidak akurat dan tidak ada sanksi terhadap kelambatan dan ketidakakuratan pekerjaan.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Dalam birokrasi analisis jabatan, uraian jabatan, persyaratan jabatan dan latihan jabatan dalam satuan kerja harus menjadi prosedur baku sehingga yang muncul adalah penempatan setiap orang pada jabatan/tugas yang tepat. Tersedianya kondisi lingkungan yang mendukung, fasilitas kerja yang sesuai standar kualitas untuk mendukung kecepatan dan ketepatan kerja serta pemberian pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan cepat.

i. Nilai Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi

(1) Pengertian

Rasionalitas diartikan berfikir cerdas, objektif, logis, sistematis, banyak terkait dengan proses ilmiah atau kemampuan intelektual. Kecerdasan memandang sesuatu dari aspek akal (ratio) yang menentukan nilai benar dan salah. Fungsi ratio terletak pada otak kiri, kemampuan logika, matematis, sistemik, sebab-akibat, eksak (Intellectual Quotient/IQ). Kecerdasan emosi memandang sesuatu dari aspek perasaan (emosi), matahati (Emotional Quotient?EQ), terletak pada otak sisi kanan, bersifat spontan, kreatif, inovatif, holistik, integratif, rinetetik, ruang, komunikasi kooperatif, silih asih-asuh, asuh, dll) (perasaan, kepekaan, bagian dari karakter, ketangguhan).

(2) Keadaan Saat Ini

Organisasi kurang mengembangkan sikap rasionalitas dan kecerdasan emosi. Banyak pejabat emosional dan lebih mementingkan kekuasaan daripada tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, kurang peka dalam menanggapi aspirasi masyarakat, banyak kebijakan dan keputusan yang dianggap tidak rasional. Sementara itu tingkat kesejahteraan yang tidak memadai berpengaruh pada maraknya budaya

KKN. Sikap yang lebih menonjolkan prestige, mengalahkan penonjolan sikap berprestasi, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan. Sistem seleksi (rekrutmen) pegawai yang tidak transparan dan kurang jelas. Sebagai contoh, dalam penunjukan pejabat atau pemilihan gubernur, bupati, walikota sering berbau money-politics.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Para birokrat bekerja berdasarkan pertimbangan rasional, sehingga dapat mendorong gerak dinamika birokrasi. Bekerja dilandasi oleh sikap rasional akan melahirkan kebijakan, keterbukaan, keluasan pandangan termasuk mau menerima masukan dari siapa saja. Dengan berkembangnya nilai rasionalitas maka konsep birokrasi e-government dapat berjalan karena dilandasi oleh pengembangan diri untuk menguasai iptek seluas mungkin. Emosi sebagai bagian karakter harus dapat menumbuhkan motivasi dan meninggikan kepekaan rasio dan emosi, tangguh menghadapi perubahan, tekanan dan kesulitan.

j. Nilai Keteguhan dan Ketegasan

(1) Pengertian

Keteguhan diartikan sebagai *"kuat dalam berpegang pada aturan, nilai moral, prinsip-prinsip manajemen dan lain-*

lain". Seseorang yang memiliki nilai keteguhan akan kuat dalam berpegang pada aturan, nilai moral, prinsip-prinsip manajemen dan lain-lain. Ketegasan diartikan sebagai *'sifat, watak dan tindakan yang jelas dan tidak ragu-ragu'*. Seseorang yang dikatakan memiliki nilai ketegasan berarti bertindak tidak ragu-ragu karena telah didasari oleh pertimbangan dan pemikiran yang matang. Penerapan nilai keteguhan sering dinilai sebagai orang yang 'kaku' dan susah diajak kompromi, sementara nilai ketegasan sering dinilai sebagai orang yang keras. Yang perlu dihindari dalam bertindak teguh maupun tegas adalah kesan bahwa orang itu tidak mau mendengarkan kata orang lain atau bertindak tegas tetapi diikuti dengan sifat marah atau kasar.

(2) Keadaan Saat Ini

Dalam kondisi birokrasi seperti sekarang ini (lihat hasil JP) nilai keteguhan dan ketegasan aparatur negara cenderung masih rendah. Aparatur negara masih suka ikut-ikutan dan tidak punya pendirian serta kurangnya obyektivitas dalam bekerja terutama dalam mengatasi konflik sosial, ekonomi dan lain-lain. Batas wewenang dan tanggung jawab kurang jelas, karena tidak adanya job-description dalam tugasnya sehingga sering ragu-ragu dalam setiap keputusannya. Tidak berani tegas karena khawatir mendapat reaksi yang negatif, dari orang lain. Di samping itu karena

kebanyakan birokrat kurang profesional, maka dalam pengambilan keputusan dinilai terkesan ragu-ragu dan takut salah.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Aparat birokrasi seharusnya memiliki keteguhan dan ketegasan pendirian agar tidak terombang-ambing oleh pendapat pihak lain. Keteguhan dan ketegasan tidak harus ditampakkan dengan sikap kaku, keras dan tidak supel. Oleh karena itu aparatur harus profesional, tahu wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga tidak ragu-ragu dalam tindakannya.

k. Nilai Disiplin dan Keteraturan Bekerja

(1) Pengertian

Disiplin, artinya tertib mengikuti aturan sehingga segala sesuatu itu menjadi baik, rapi, beres dan lancar. Penyelenggaraan Negara disebut tertib bila dalam diri setiap penyelenggara Negara memiliki kesadaran untuk disiplin mematuhi segala aturan. Disiplin harus dimulai dari dalam diri masing-masing orang. Dalam tertib berlalu lintas misalnya, orang akan mematuhi segala tanda lalu lintas meskipun tanpa ada polisi atau mungkin tanpa rambu-rambu. Penyelenggara negara harus mematuhi segala

aturan, serta dapat mengatur dan mengawasi dirinya sendiri. Untuk menuju ke arah pemerintahan yang baik dan bersih perlu ditanamkan sikap hidup teratur dan tertib. Teratur, artinya segala sesuatu sudah diatur baik-baik agar menjadi rapi. Dalam pengaturan agar segala sesuatu itu menjadi baik, rapi, beres dan lancar diperlukan berbagai perangkat peraturan, tanda-tanda, pedoman, dan petunjuk.

(2) Keadaan Saat Ini

Masih banyak staf dan bahkan pejabat yang tidak disiplin dan teratur dalam mengikuti pedoman dan aturan yang ada. Pelanggaran terhadap pedoman atau peraturan yang ada tidak dikuti dengan sanksi, sehingga ketidakdisiplinan dan ketidateraturan menjadi biasa terjadi di mana-mana. Kondisi tersebut dapat terjadi karena tidak adanya rencana kerja yang jelas dan jadual yang ketat.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Semua aparat pemerintah memiliki pedoman dan aturan yang jelas dan mudah dimengerti oleh staf, dan semua staf dan pejabat secara disiplin mematuhi segala pedoman dan aturan yang ada. Ppelanggaran terhadap pedoman dan aturan dikenai sanksi sehingga disiplin dan keteraturan kerja menjadi kebiasaan.

I. Nilai Keberanian dan Kearifan

(1) Pengertian

Keberanian diartikan sebagai berani menanggung resiko dalam pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat waktu. Sementara itu kearifan diartikan sebagai kebijaksanaan yakni merupakan landasan membentuk nilai-nilai yang bersumber perenungan dan kecerdasan dalam memangani masalah dan tantangan baru dengan mengambil tindakan yang diperlukan.

(2) Keadaan Saat Ini

Banyak pejabat atau petugas aparatur negara yang tidak berani mengambil resiko dalam mengambil keputusan yang mendesak diperlukan. Banyak pula pejabat/petugas yang hanya berani bertindak setelah mendapat petunjuk dan arahan dari atasan, dan tidak berani menanggung konsekuensi apabila terjadi kegagalan dalam pengambilan keputusan. beratnggung. Pejabat dari tingkat atas hingga yang terbawah pada umumnya tidak memiliki sikap berani dalam mengakui kesalahan dan tidak memiliki sikap arif dalam menghadapi persoalan, karena pada umumnya lebih menitikberatkan kepentingan material.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Para birokrat seharusnya memiliki jiwa berani dalam segala hal (berkorban, mengakui kesalahan, tampil sebagai

pemimpin) dan arif bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Pimpinan berani mendelegasikan wewenang-nya kepada bawahan sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya, tetapi juga bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi terhadap kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan tugasnya.

m. Nilai Dedikasi dan Loyalitas

(1) Pengertian

Dedikasi diartikan sebagai pengorbanan tenaga dan waktu untuk berhasilnya suatu usaha atau tujuan mulia. Dapat pula diartikan sebagai bentuk pengabdian. Loyalitas diartikan sebagai kesetiaan, ketaatan dan kepatuhan. Dalam lingkungan birokrasi dedikasi dan loyalitas diartikan sebagai sifat rela berkorban dan jiwa pengabdian terhadap instansi, bangsa, negara dan taat serta setia menjalankan tugas dan kewajibannya.

(2) Keadaan Saat Ini

Berdasarkan JP di atas, ditemukan data bahwa dedikasi dan loyalitas para aparatur negara masih rendahnya. Sikap loyal lebih banyak hanya ditujukan kepada atasan dan bukan pada institusi yang memberikan tugas dan tanggung jawab. Sementara sikap para atasan yang lebih banyak menuntut pelayanan dari bawahan ketimbang melayani

bawahan. Akibatnya tingkat kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan kualitas kerja birokrat pemerintah masih rendah. Di samping itu, visi, misi, tujuan dan program institusi yang dijadikan landasan kerja kurang jelas.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Dalam birokrasi pemerintah para aparat seharusnya memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada institusi dan bukan kepada atasan. Dengan dilandasi nilai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap institusi maka para aparat akan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dedikasi dan loyalitas dapat didorong oleh kejelasan visi, misi dan tujuan organisasi serta pemberian kesejahteraan yang cukup.

n. Nilai Semangat dan Motivasi

(1) Pengertian

Semangat adalah daya atau energi yang mendorong perilaku sampai pada tingkat yang tertinggi. Motivasi lebih merujuk kepada tujuan dari perilaku yang dasarnya pada tingkat yang tertinggi. Dalam birokrasi nilai semangat dan motivasi menjadi motor penggerak organisasi. Semangat dan motivasi akan mendorong para aparat tetap bekerja keras meskipun tidak sedang diawasi oleh pimpinan.

(2) Keadaan Saat Ini

Semangat dan motivasi sebagai aparatur negara yang telah bersumpah untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat bangsa dan negara pada saat ini masih belum menunjukkan tingkatan yang membanggakan. Orientasi kerja lebih dititikberatkan pada ukuran pemenuhan keinginan materi.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Dalam era persaingan antarbangsa yang semakin ketat, semua aparatur pemerintah seharusnya memiliki semangat kerja dan motivasi untuk pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia semakin tinggi. Masing-masing aparatur memiliki semangat dan motivasi yang tinggi mengembangkan kreativitas, aktivitas dan pengabdian sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

o. Nilai Ketekunan dan Kesabaran

(1) Pengertian

Ketekunan diartikan sebagai teliti, rajin mendalami sesuatu pekerjaan/tugas yang secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan komitmen yang disepakati. Kesabaran diartikan tidak emosional, tidak tergesa-gesa.

Kesabaran merupakan sikap mental seseorang yang bersifat tangguh, tekun dan bersungguh-sungguh, amanah untuk mencapai sasaran kerja dan prestasi kerja terbaiknya, tidak asal jadi. Dalam sikap kesabaran itu termasuk suasana hati yang kuat dalam menghadapi tekanan. Tekanan yang dimaksud dapat berupa target pekerjaan atau godaan internal (korupsi, penyalahgunaan jabatan) dan eksternal (suap, kolusi dan nepotisme)

(2) Keadaan Saat Ini

Banyak aparat yang tidak tekun dan sabar dalam melaksanakan tugas sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berlangsung secara cepat, tepat dan akurat. Banyak pula aparat yang kurang tekun dalam melaksanakan tugas, seringkali menunda pekerjaan karena merasa tidak ada beban dan tanggung jawab moral. Sementara sebagian lagi ingin menyelesaikan pekerjaan secepatnya tanpa memperhatikan kualitas hasil baik dari segi ketelitian maupun kesempurnaannya. Dalam melayani publik, petugas lebih suka menunda pelaksanaan atau memper-panjang waktu sehingga memberikan peluang untuk menempuh '*jalan pintas*' yang mendorong terjadinya penyimpangan.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Semua aparat memiliki sifat tekun dan sabar dalam melaksanakan tugas, mewenang dan tanggungjawabnya, semnetara institusi memiliki standar dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien. Di samping itu, semua aparat memiliki motivasi dan kesadaran untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi.

p. Nilai Keadilan dan Keterbukaan

(1) Pengertian

Kata adil mengandung makna '*tidak berat sebelah*' atau '*tidak memihak*'. Keadilah adalah sifat, perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil, tidak memihak pada salah satu. Terbuka atau keterbukaan dapat diartikan sebagai keadaan tidak tertutup, atau tidak hanya diketahui oleh sejumlah orang yang terbatas atau tidak ada yang dirahasiakan.

(2) Keadaan Saat Ini

Pada umumnya aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan dalam melayani kepentingan masyarakat. Masih banyak instansi yang tidak memberikan pelayanan masyarakat secara adil dan terbuka (deskriminatif), - masih lemahnya fungsi kontrol dari atas

ke bawahan tentang pemberian pelayanan masyarakat secara adil dan terbuka.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam setiap institusi belangsung secara adil dan terbuka. Masing-masing institusi memiliki alat untuk melakukan kontrol atau pengendalian pelaksanaan tugas dan tanggung jawan secara adil dan terbuka. Untuk mendapatkan aparat yang memiliki nilai keadilan dan keterbukaan perlu diperhatikan masalah rekrutmen dan pengembangan pegawai dengan mengikuti sistem merit.

q. Nilai Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(1) Pengertian

Kebudayaan sering diartikan sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menyesuaikan dan menanggapi lingkungannya. Salah satu perwujudan kemampuan itu adalah ilmu pengetahuan. Sebagai perwujudan kebudayaan ilmu pengetahuan lahir berdasarkan hasil studi, penelitian dan pengembangan suatu objek dengan metoda tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan individu, instansi maupun masyarakat. Sementara itu teknologi merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan produk barang atau jasa tertentu yang

dibutuhkan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teknologi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, antara lain menjadi lebih cepat, tepat, mudah dan efisien. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu termasuk yang diperlukan dalam proses manajemen yang cenderung menuju ke arah cepat, tepat, mudah dan efisien. Program e-government yang dicanangkan oleh pemerintah pada hakikatnya untuk mendorong para birokrat untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi birokrasi. Nilai ini diperlukan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan, terutama metode analisis dan pengambilan keputusan, keahlian/keterampilan manajerial, teknis, hukum, administrasi, keterampilan sosial dan komunikasi.

(2) Keadaan Saat Ini

Masih banyak institusi yang belum sepenuhnya dapat menerapkan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen, dan masih terbatasnya kemampuan aparatur negara yang menguasai hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya anggaran institusi untuk dapat menerapkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Keadaan Yang Seharusnya

Setiap aparatur negara menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi majanemn modern. Di samping itu setiap institusi berupaya menerapkan konsep “E-gavermment” yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk itu perlu disediakan anggaran yang cukup.

H. Evaluasi

Jawablah pertanyaan ini berdasarkan uraian dan hasil diskusi permasalahan dalam bab ini.

1. Mengapa nilai dasar komitmen dan konsisiten amat diperlukan dalam pembentukan karakter bangsa di lingkungan birokrasi?
2. Apa sebabnya setiap kebijakan atau keputusan perlu didasrkan pada nilai wewenang dan tanggung jawab/
3. Bagaimana kondisi nilai keikhlasan dan kejujuran dalam kehidupan masyarakat dan di lingkungan birokrasi Anda?
4. Dalam manajemen modern setiap pegawai dituntut untuk memiliki nilai profesionalisme. Mengapa?
5. Apakah bangsa Indonesia memiliki nilia dasar kreativitas dan kepekaan/ sensitivitas terhadap lingkungan masyarakat maupun tugas? Kalau tidak, mengapa?
6. Menurut Anada saat ini apakah Indonesia memiliki aset tokoh yang memiliki nilai dasar kepemimpinan dan keteladan yang tinggi?
7. Dalam melaksanakan setiap tugas perlu digalang keebersamaan

dan dinamika kelompok. Apa betul demikian?

8. Bangsa Indonesia dinilai tidak memiliki keakurasian dan kecepatan dalam bertindak. Apa betul?
9. Akhir-akhir ini ada yang menyatakan bahwa banyak kebijakan dan keputusan yang tidak didasari nilai Rasionalitas dan kecerdasan emosi. Bagaimana menurut Anda?
10. Sebagai pemimpin harus memiliki keteguhan dan ketegasan dalam berbagai hal. Menurut Anda apakah hal ini dimiliki oleh para pemimpin di Indonesia?
11. Bangsa Indonesia di mata orang asing dinilai tidak disiplin dan teratur dalam bekerja. Apa pendapat Anda tentang hal itu?
12. Keberanian dan kearifan dalam mengambil keputusan terutama dalam dan menangani konflik yang terjadi di masyarakat sangat diperlukan. Bagaimana halnya dengan di lingkungan birokrasi?
13. Setiap pegawai telah mengucapkan sumpah atau janji untuk bekerja dengan sungguh dan mengabdikan untuk masyarakat. Tetapi banyak yang menyatakan bahwa PNS kurang memiliki dedikasi dan loyalitas dalam bekerja. Anda setuju? Mengapa hal itu bisa terjadi?
14. Dalam bekerja perlu dilandasi oleh semangat dan motivasi yang tinggi sehingga menghasilkan out-put yang optimal. Bagaimana caranya mendorong semangat dan memotivasi para staf?
15. Masalah ketekunan dan kesabaran dalam bekerja sangat diperlukan. Apa betul kalau dikatakan bahwa bangsa Indonesia dikenal tekun dan sabar?

16. Di mana pun masalah keadilan dan keterbukaan selalu menjadi tuntutan, karena pemerintah cenderung berlaku tidak adil dan tidak terbuka. Menurut Anda bagaimana caranya untuk mencegah berlangsungnya kondisi seperti itu?
17. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, sehingga bagi siapa pun yang tidak mau belajar akan ketinggalan. Apakah masalah belajar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Anda harus diselenggarakan oleh instansi?

Do not ask the country, what the country can do for you, but ask yourself what you can do for the country.

Janganlah bertanya kepada negara, apa yang negara dapat berikan kepadamu, akan tetapi tanyakan pada dirimu apa yang dapat kamu berikan kepada Negara.

Presiden AS John F. Kennedy

BAB VII

P E N U T U P

Modul ini merupakan langkah awal yang masih mengandung banyak kekurangan dan kelemahan. Kelemahannya, terutama dari sisi tata urutan yang belum sepenuhnya sesuai dengan metode pendidikan atau pelatihan. Pola pendidikan dan pelatihan yang pernah dilaksanakan telah dinilai lebih mengarah kepada sistem indoktrinasi, dan hal itu kini mulai ditinggalkan. Pendekatan baru yang digunakan lebih menitikberatkan pada pendorongan pada individu untuk menganalisis materi. Sistem yang digunakan lebih bersifat pengenalan (sosialisasi), pemahaman (interpretasi) dan penghayatan (internalisasi) secara bebas oleh partisipan.

Sementara itu, dalam hal pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara atau pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, karena waktu penyusunan yang terbatas. Oleh karena itu, sejumlah data yang disajikan menggunakan data sekunder yang selama telah terkumpul yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dari data sekunder yang dapat dikumpulkan sesungguhnya masih terbatas, sehingga belum dapat menjadi faktor pendukung yang memadai.

Menghadapi realita sikap kebangsaan dan nilai budaya kerja dalam birokrasi seperti tersebut di atas, resep yang paling mujarab untuk memperbaiki segala kekurangan itu ada pada diri setiap

individu warga. Resep itu adalah kesediaan untuk masing-masing *membuka mata, membuka pikiran dan membuka hati*" (***open eyes, open mind, and open heart***), secara jernih, agar hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat berjalan seimbang. Sebab, jika kita menjadi buta mata berarti tidak dapat melihat keindahan, buta pikiran tidak dapat melihat kebenaran, dan jika buta hati tidak dapat melihat kebijakan.

Modul ini masih memerlukan penyempurnaan lagi. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan saran dari berbagai pihak. Sebelum modul ini diaplikasikan di kalangan birokrat seyogyanya dilakukan pengkajian dan pematapan terlebih dahulu, dalam bentuk diskusi, seminar atau uji petik (*try out*), sosialisasi dan persiapan untuk mencetak fasilitator yang akan melaksanakan program ini. Semoga Modul 4 ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Jakarta, akhir Desember 2004

Tim Penyusun,

Nunus Supardi

Sunardi Dwidjoesastro

Hasan Alwi

Daftar Bacaan:

1. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 2002
2. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara RI, 2002
3. Drs. Desi Fernanda, M.Sos. Sc, Etika Organisasi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara RI, 2003
4. Sistem Administrasi Negara RI jilid II, CV Masagung, 1994.
5. Drs. Idup Suhady, M.Si dan Drs. AM. Sinaga, M.Si, Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara RI, 2003
6. Prof. Dr. Said Aqil Husin Al-Munawar dan Prof. Dr. H. Tayar Yusuf, Etika Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan, Pemiagaan dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, 2001
7. Azizy, Qodri A. Pendidikan [Agama] untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak Sukses Masa Depan : Pandai dan Ber manfaat). Semarang: Aneka Ilmu, 2002
8. Kouzes, James and Posner, Barry "Credibility" San Francisco: Jossey Bass Publisher, 1993
9. Soemamo Soedarsono, Character Building Membentuk Watak, PT Elex Media Komputindo Jakarta: 2002
10. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

11. FX. Soedjadi, Analisis Manajemen Modern, CV Haji Masagung, 1994
12. Ketetapan MPR-RI, CV Tamita Utama, 2002
13. Visi, Misi, dan Strategi Kebudayaan Nasional Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, (naskah akhir).
14. Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, Wawasan Nusantara III, Alumni Bandung, 1993
15. Dr. Junus Melalatoa, Ensiklopedi Suku Bangsa: 1995
16. Sistem Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara RI, 1990
17. Harian Kompas

BIODATA PENULIS

1. NUNUS SUPARDI

Lahir di Madiun tanggal 19 Agustus 1943. Setelah lulus SR (1956) masuk ke Sekolah Guru B (SGB) terus ke Sekolah Guru A (SGA), lulus tahun 1962. Melanjutkan kuliah ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan lulus S1 tahun 1970. Sejak lulus Sarjana Muda tahun 1965 diangkat menjadi Asisten Dosen merangkap Kepala Tata Usaha Fakultas Keguruan Sastra dan Seni di IKIP Malang Cabang Madiun hingga tahun 1973.

Tahun 1973 pindah ke Jakarta menjadi staf di Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian menjabat Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 1985-1993. Mulai 1993-1998 menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian menjadi Direktur Purbakala mulai 1999-2001. Setelah diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5-2-2001 sampai dengan 14-11-2001), kemudian diangkat menjadi Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam tahun 1986 mengikuti Diklat Perencanaan selama 3 bulan, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan singkat "Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Proyek" (*Planning,*

Monitoring and Evaluation of Project) di Amerika Serikat tahun 1987. Tahun 1988, mengikuti training selama 2 minggu mengenai admintrasi kebudayaan (*High Level Cultural Administrator*) di Bangkok yang diselenggarakan oleh *Seameo Project of Fine Art and Archaeology (SPAFA)* ASEAN. Tahun 1995 mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi tingkat Nasional (SESPANAS).

Dalam Kongres Kebudayaan tahun 1991 di Jakarta duduk sebagai Sekretaris Umum, dalam Kongres Kesenian Indonesia tahun 1995 sebagai salah satu anggota Panitia Pengarah di samping sebagai Sekretaris Umum Panitia Penyelenggara. Dalam Prakongres dan Kongres Kebudayaan 2003 menjadi anggota Panitia Pengarah dan Penasihat Panitia Penyelenggara. Tahun 1996-1967 menjadi Koordinator Penyelenggara Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (*Indonesia-Japan Friendship Festival- Indonesia-Nihon Yukosai*) di Jepang.

Dalam hal ke-DIKLAT-an, tahun 1986 mengikuti "Training of Trainer" atau TOT dan setelah itu sering mengajar pada pendidikan dan pelatihan tenaga kebudayaan. Setelah pensiun tahun 2003 aktif di Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) dan anggota Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), serta Penasihat Sahabat Museum. Telah menulis buku: (1) Festival Perhabatan Indonesia-Jepang (1997); (2) Sebelas Tahun Gedung Pameran Seni Rupa

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998); (3) Pedoman Rehabilitasi Bangunan Bersejarah (Terjemahan) tahun 2003; (4) Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka (2003). Tahun 1997 mendapat Satyalencana Karya Satya dan tahun 1998 mendapat penghargaan “Sri Radyo Laksono” dari Kanjeng Sinuwun Pakoe Boewono XII, Keraton Kasunanan Surakarta.

005208.3



B4.3